



## KATA PENGANTAR



Om Swastiastu, Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa/Hyang Widhi Wasa atas Asung Kerta Wara Nugraha Nya, Pemerintah Provinsi Bali dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Provinsi Bali Tahun 2021. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Sebagai salah satu media pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah, serta kewenangan pengelolaan sumber daya berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang telah ditetapkan.

Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja secara maksimal dalam pelaksanaan kegiatan sampai dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2021.

LKjIP Provinsi Bali ini tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan mengingat implementasi sistem akuntabilitas masih perlu penyempurnaan secara terus menerus, namun demikian telah diupayakan semaksimal mungkin melalui koordinasi antar instansi terkait dan diskusi bersama terhadap permasalahan yang memerlukan asistensi nara sumber. Mudah-mudahan LKjIP Provinsi Bali dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan tahun 2021 dan dapat dijadikan sebagai bahan masukan untuk menyempurnakan pada tahun berikutnya.

Gubernur Bali,

Wayan Koster



## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GRAFIK	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
RINGKASAN EKSEKUTIF	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Ruang Lingkup	4
BAB II PERENCANAAN KINERJA	9
A. Rencana Strategis	9
B. Strategi dan Arah Kebijakan Umum	22
C. Indikator Makro Tahun 2020	23
D. Perjanjian Kinerja	24
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	30
A. Evaluasi Kinerja	31
B. Analisis Pencapaian Kinerja	34
BAB IV PENUTUP	105
LAMPIRAN – LAMPIRAN :	
Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021	
Pengukuran Kinerja 2021	

**DAFTAR TABEL**

Tabel	Halaman
1. Tabel 1.1 : Relasi Isu Strategis dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Prov. Bali	8
2. Tabel 2.1 : Tujuan dan Sasaran Pemerintah Provinsi Bali	16
3. Tabel 2.2 : Perbandingan Capaian/Realisasi Indikator Makro Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2018 s.d 2023	23
4. Tabel 2.3 : Perjanjian Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2021	27
5. Tabel 3.1 : Perbandingan Capaian/Realisasi Indikator Makro Provinsi Bali Tahun 2020 s.d. Tahun 2021	36
6. Tabel 3.2 : Perbandingan Capaian/Realisasi Pertumbuhan Ekonomi Bali Tahun 2020 s.d Tahun 2021	45
7. Tabel 3.3 : Nilai PDRB Provinsi Bali Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan 2010 s.d 2021	50
8. Tabel 3.4 : Nilai PDRB Bali Menurut Komponen Pengeluaran Atas Harga Berlaku dan Konstan 2010 s.d 2021	51
9. Tabel 3.5 : Perbandingan Capaian/Realisasi PDRB Tahun 2020 s.d Tahun 2021	51
10. Tabel 3.6 : Tabel Tingkat Inflasi November 2021, Tahun Kalender 2021 dan Tahun ke	53



				Tahun ke Tahun Menurut Kelompok Pengeluaran Kota Denpasar	
11.	Tabel	3.7	:	Tingkat Inflasi Kota di Seluruh Indonesia Tahun 2021	55
12.	Tabel	3.8	:	Perbandingan Capaian/Realisasi Tingkat Kemiskinan Bali Tahun 2020 s.d 2021	59
13.	Tabel	3.9	:	Perbandingan Capaian/Realisasi Tingkat Pengangguran Terbuka Bali Tahun 2020 s.d 2021	61
14.	Tabel	3.10	:	Dampak COVID-19 Terhadap Penduduk Usia Kerja	63
15.	Tabel	3.11	:	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Bali Menurut Pendidikan	64
16.	Tabel	3.12	:	Penduduk Bali yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha	65
17.	Tabel	3.13	:	Perbandingan Capaian/Realisasi Gini Ratio 2020 s.d Tahun 2021	66
18.	Tabel	3.14	:	Perbandingan Capaian/Realisasi Investasi, Ekspor dan Impor Bali Tahun 2020 s.d Tahun 2021	68
19.	Tabel	3.15	:	Indeks Pembangunan Manusia Bali Menurut Komponen	74
20.	Tabel	3.16	:	Perkembangan Capaian/Realisasi Indeks Pembangunan Manusia Bali Tahun 2020 s.d Tahun 2021	74
21.	Tabel	3.17	:	Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2021	75
22.	Tabel	3.18	:	Pengukuran capaian kinerja dibanding dengan target dalam pembangunan jangka menengah	78
23.	Tabel	3.19	:	Perbandingan Capaian/Realisasi Misi RPJMD Semesta Berencana Provinsi	81



---

Bali 2020 s.d Tahun 2021				
26.	Tabel	3.20	: Nilai Tukar Provinsi Bali September 2021 s.d Oktober 2021	83
27.	Tabel	3.21	: Nilai Tukar Nelayan dan Nilai Tukar Pembudidayaan Ikan September 2021-oktober 2021	85
28.	Tabel	3.22	: Nilai Tukar Petani Bali dan Nasional Tahun 2021	86
29.	Tabel	3.23	: Perbandingan Capaian/Realisasi RPJMD semesta Berencanaan Provinsi Bali Tahun 2020 s.d 2021	87
30.	Tabel	3.24	: Inkator Pendukung tercapainya UHH Provinsi Bali Tahun 2021	88
31.	Tabel	3.25	: Jumlah Kematian Ibu di Kabupaten/Kota 2016-2021	90
32.	Tabel	3.26	: IPM Provinsi Bali	105

**DAFTAR GRAFIK**

Grafik			Halaman
1.	Grafik	3.1 : Grafik Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Bali, 1961-2020	38
2.	Grafik	3.2 : Pertumbuhan Perekonomian Bali Selama Tahun 2021	41
3.	Grafik	3.3 : Grafik Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha Tahun 2020 dan 2021	48
4.	Grafik	3.4 : Grafik Tingkat Kemiskinan Seluruh Provinsi Tahun 2021	59
5.	Grafik	3.5 : Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Bali 2021	62
6.	Grafik	3.6 : Perkembangan Gini Ratio Bali dan Nasional 2021	67
7.	Grafik	3.7 : Distribusi Pendapatan per Kapita Penduduk	67
8.	Grafik	3.8 : Pangsa Nilai Ekspor Komoditas 2021	70
9.	Grafik	3.9 : Perkembangan Ekspor Barang 2021	70
10.	Grafik	3.10 : Perubahan Indeks NTP Menurut Provinsi di Indonesia, Oktober 2021	86
11.	Grafik	3.11 : Angka Kematian Ibu Provinsi Bali Tahun 2015-2021	89
12.	Grafik	3.12 : Penyebab Kematian Ibu di Provinsi Bali	90



13.	Grafik	3.13	: Tren Incidence Rate (IR) DBD di Provinsi Bali 2015-2021	98
14.	Grafik	3.14	: Proporsi Balita Gizi Buruk/kurang 2018-2021	100
15.	Grafik	3.15	: Proposal Balita Gizi Buruk/kurang per Kab/kota Tahun 2021	101
16.	Grafik	3.16	: Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Sekolah Provinsi Bali Tahun 2010-2021	103



## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Gambar 3.1 : Peta Jumlah Penduduk Provinsi Bali Tahun 2021	37
2. Gambar 3.2 : Perekonomian Provinsi Bali 2021	40
3. Gambar 3.3 : Bisnis Model Ekspor Komoditas Melalui Kemitraan	72
4. Gambar 3.4 : IPM Provinsi Bali	105



## RINGKASAN EKSEKUTIF

Memenuhi amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), maka Pemerintah Provinsi Bali menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021 sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta pengelolaan *resources* yang tersedia. Penyusunan LAKIP berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Substansi Laporan Kinerja ini memuat Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2018-2023. Implementasinya dijabarkan dalam pencapaian prioritas Pembangunan Provinsi Bali yang dituangkan dalam Indikator kinerja Utama Pemerintah Provinsi Bali pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021.

Uraian Laporan Kinerja ini menyajikan kondisi yang ingin diwujudkan oleh Pemerintah Provinsi Bali, Indikator kinerja, yang didukung oleh Program, Kegiatan, Anggaran, Capaian, masalah dan upaya mengatasi masalah agar capaian program pada tahun mendatang menjadi lebih baik.

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Tahun 2018-2023 yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019, Visi Pemerintah Provinsi Bali adalah “***Nangun Sat Kerthi Loka Bali***” Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana

Visi tersebut bermakna menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya, untuk mewujudkan kehidupan *krama* dan *gumi* Bali yang sejahtera dan bahagia, *sakala-niskala* sesuai dengan prinsip Trisakti Bung Karno: berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, melalui pembangunan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila 1 Juni 1945.



Orientasi, arah kebijakan dan Program Pembangunan Bali di masa datang yang diselenggarakan dengan menerapkan Pola Pembangunan Semesta Berencana, merupakan untaian benang merah yang menghubungkan Bali dalam dimensi waktu menurut konsep Tri Semaya: Atita (masa lalu), Nagata (masa kini), dan Wartamana (masa datang), yaitu kondisi Bali di masa lalu, kondisi Bali di masa kini, dan kondisi Bali di masa datang.

Bali di masa lalu ditandai oleh masa keemasan kebudayaan Bali, sebagai masa Romantika; Bali di masa kini ditandai oleh dinamika pembangunan yang hasilnya memberi manfaat bagi kesejahteraan Krama Bali, namun sekaligus juga menimbulkan masalah dan tantangan baru, sebagai masa Dinamika; dan Bali di masa datang merupakan suatu kondisi baru (sintesis) yang dirumuskan berdasarkan suatu proses dan hasil dari tesis dan antitesis terhadap kondisi Bali di masa lalu, di masa kini, dan kebutuhan serta permasalahan dan tantangan Bali di masa datang, sebagai masa Dialektika.

Dengan pola pembangunan demikian, akan terbangun kondisi yang diyakini mampu mengantarkan Bali menuju Era Baru, yaitu suatu Era yang ditandai dengan tatanan kehidupan baru; Bali yang *Kawista*, Bali *kang tata-titi tentram kerta raharja, gemah ripah lohjinawi*, yakni tatanan kehidupan holistik yang meliputi 3 (tiga) dimensi utama:

A. Dimensi Pertama: terpeliharanya keseimbangan Alam, Krama, dan Kebudayaan Bali (Genuine Bali)

1) Alam Bali :

- a. Memelihara dan melestarikan keagungan, kesucian, dan taksu Alam Bali; tempat-tempat suci, laut, danau, sungai, sumber mata air lain, gunung, hutan, tumbuh-tumbuhan (pertanian dan perkebunan), dan lingkungan alam secara niskala dengan melaksanakan Upakara/Upacara Pakertih Yadnya secara periodik, yaitu: Atma Kertih, Segara Kertih, Wana Kertih, Danu Kertih, Jana Kertih dan Jagat Kertih.
- b. Sedangkan secara sakala, upaya memelihara dan melestarikan Alam Bali dilaksanakan dengan regulasi, kebijakan, dan program



untuk konservasi alam: perlindungan tempat-tempat suci, laut, danau, sungai, sumber mata air lain, gunung, hutan, tumbuh-tumbuhan (pertanian dan perkebunan), dan lingkungan alam sehingga Alam Bali menjadi hijau, indah, dan bersih.

- c. Menjadikan Bali sebagai Padma Bhuwana, sebagai pusat atau muaranya dunia dan sebagai pusat peradaban dunia.

## 2) Krama Bali :

- a. Mengembangkan tata kehidupan Krama Bali berdasarkan nilai-nilai filsafat Sad Kertih baik secara sakala maupun niskala: Atma Kertih, Danu Kertih, Wana Kertih, Segara Kertih, Jana Kertih, dan Jagat Kertih.
- b. Mengembangkan jatidiri, integritas, dan kualitas Krama Bali sesuai dengan nilai nilai adat istiadat, agama, tradisi, seni, dan budaya, serta kearifan local masyarakat Bali, yaitu: Pertama, tampilnya jatidiri Krama Bali dalam bentuk rasa syukur, bahagia, dan bangga dilahirkan sebagai orang Bali; Kedua, tampilnya integritas Krama Bali dalam bentuk karakter positif, etika, moralitas, kejujuran, disiplin, ketekunan/keuletan, dan kecintaan dalam setiap aktivitas kehidupan; Ketiga, tampilnya kualitas Krama Bali dalam bentuk kompetensi, profesional, kreatif, inovatif, dan memiliki daya saing dengan semangat pantang menyerah.

## 3) Kebudayaan Bali :

- a. Memajukan Kebudayaan Bali dari hulu sampai ke hilir yang meliputi: adat istiadat, agama, tradisi, seni, dan budaya, serta kearifan lokal Bali melalui upaya perlindungan, pembinaan, pengembangan, dan pemanfaatan obyek pemajuan kebudayaan.
- b. Menjadikan Kebudayaan Bali sebagai hulu pembangunan Bali yang menjiwai segala aspek pembangunan Bali; mengarusutamakan budaya dalam berbagai aspek pembangunan Bali.
- c. Menjadikan Kebudayaan Bali sebagai basis dan pilar utama pembangunan perekonomian masyarakat Bali.



- B. Dimensi Kedua, terpenuhinya kebutuhan, harapan, dan aspirasi Krama Bali dalam berbagai aspek kehidupan;
- 1) Terpenuhinya kebutuhan dasar Krama Bali: pangan, sandang, papan, air, listrik, kesehatan, dan pendidikan dalam jumlah dan kualitas yang memadai.
  - 2) Terpenuhinya jaminan sosial dan perlindungan tenaga kerja Krama Bali.
  - 3) Terpenuhinya kebutuhan pelayanan dalam pelaksanaan kehidupan adat, agama, tradisi, seni, dan budaya bagi Krama Bali: sarana-prasarana, transportasi, dan infrastruktur dalam jumlah dan kualitas yang memadai.
  - 4) Terpenuhinya pendapatan per kapita, dan tersedianya lapangan kerja sesuai dengan kebutuhan bagi Krama Bali.
  - 5) Terpenuhinya rasa aman dan nyaman kehidupan Krama Bali.
- C. Dimensi Ketiga, memiliki kesiapan yang cukup (suatu manajemen resiko) dalam mengantisipasi/menghadapi munculnya permasalahan dan tantangan baru, dalam tataran lokal, nasional, dan global yang akan berdampak secara positif maupun negative Terhadap kondisi di masa yang akan datang.
- 1) Penguatan dan pelembagaan adat, agama, tradisi, seni, dan budaya agar tetap kokoh.
  - 2) Pengarusutamaan sumber daya lokal Bali dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam pengembangan dan pengelolaan perekonomian.
  - 3) Peningkatan daya saing Krama Bali.
  - 4) Membangkitkan kembali rasa jengah sebagai orang Bali dan rasa tindih erhadap Bali.
  - 5) Memperkuat rasa kebersamaan, budaya gotong royong, dan sikap-sikap kolektif Krama Bali.



Dalam upaya mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Semesta Berencana Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2018-2023, Pemerintah Provinsi Bali disamping melaksanakan program-program yang konvensional pada semua bidang/sector, juga melaksanakan terobosan-terobosan baru (*innovation breakthrough*) pada beberapa bidang-bidang yang strategis sebagai upaya akselerasi (percepatan) pencapaian tujuan.

Program Prioritas Pembangunan Bali sebagai pelaksanaan Pola Semesta Berencana mencakup 5 (lima) bidang dan 1 (satu) bidang prioritas Pendukung, yaitu:

**A. Bidang 1 : Pangan, Sandang, dan Papan dengan sasaran pembangunan :**

- 1) Meningkatnya ketahanan pangan bagi Krama Bali dengan program pendukung diantaranya : Peningkatan Ketersediaan Pangan. Peningkatan Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan, Peningkatan Sarana Produksi Pertanian, Pengembangan Budidaya Ikan, Pengembangan Perikanan Tangkap, Peningkatan Populasi Ternak Lokal Bali, Revitalisasi Fungsi Lumbung Sebagai Penyangga Stock Pangan Daerah, Peningkatan Keamanan Pangan, Peningkatan Sertifikat Mutu Pangan Segar;
- 2) Meningkatnya pemenuhan kebutuhan sandang masyarakat miskin dengan program Pendukung Pemenuhan Sandang Penyandang Masalah Kesejahteraan Social, Peningkatan Produksi Sandang Lokal Bali. Peningkatan Aksesibilitas Produk Sandang Lokal Bali;
- 3) Meningkatnya rasio rumah tangga Krama Bali memiliki rumah layak huni dengan program pendukung diantaranya Pengembangan Utilitas Perumahan Dan Permukiman, Peningkatan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin;
- 4) Terkendalinya Stabilitas Harga Pangan yang dengan program pendukung diantaranya : Stabilisasi Harga Pangan Dan Pengendalian Kebijakan Perekonomian Daerah



- 5) Meningkatnya diversifikasi dan optimalisasi potensi sumber daya pangan lokal dengan program pendukung diantaranya : Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Ramah lingkungan, Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Pertanian, Pengembangan Pertanian Organik;
- 6) Meningkatnya kualitas hasil pertanian Krama Bali dengan program pendukung diantaranya : Pengembangan Pertanian Taman Gumi Banten, Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pengembangan Agribisnis Peternakan, Peningkatan Nilai Tambah Hasil Perikanan dan Pengembangan Pertanian Hidroponic Perkotaan (Urban Farming);
- 7) Meningkatnya Kapasitas SDM pertanian Krama Bali dengan program pendukung diantaranya Peningkatan Kapasitas SDM Petani.

**B. Bidang 2 : Kesehatan dan Pendidikan dengan sasaran pembangunan**

:

- 1) Terwujudnya akses pelayanan kesehatan bagi seluruh krama Bali yang terjangkau dengan baik dan pasti, dengan program yang pendukung diantaranya : Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Pengembangan Sistem Database Kesehatan;
- 2) Meningkatnya standard kualitas pelayanan kesehatan Krama Bali, dengan program pendukung diantaranya Peningkatan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat, Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pada UPTD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali, Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak/Hewan;
- 3) Meningkatnya peserta dalam sistem jaminan kesehatan masyarakat dengan program pendukung diantaranya Jaminan Kesehatan Krama Bali Sejahtera (KBS);
- 4) Meningkatnya pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang terjangkau, merata, adil, dan berkualitas, dengan program pendukung



diantaranya Peningkatan Kapasitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan;

- 5) Terwujudnya wajib belajar 12 tahun dengan program pendukung diantaranya Peningkatan akses dan mutu pendidikan Menengah dan Peningkatan kualitas Pendidikan Khusus dan Bahasa;
- 6) Meningkatnya pelayanan pendidikan berbasis Keagamaan pada tingkat sekolah dasar sampai dengan menengah dalam bentuk pasraman dengan program pendukung diantaranya Pengembangan layanan Pendidikan berbasis Nilai-Nilai Hindu;
- 7) Meningkatnya daya saing SDM Krama Bali dengan program pendukung diantaranya Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja, Pengembangan pemuda, Peningkatan prestasi olahraga.

**C. Bidang 3 : Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan dengan sasaran pembangunan :**

- 1) Meningkatnya kualitas Pemenuhan kebutuhan hidup dasar yang layak Krama Bali, dengan program yang pendukung diantaranya Peningkatan Rehabilitasi Sosial, Peningkatan Perlindungan dan Jaminan Sosial, Peningkatan Pemberdayaan social, Pelayanan Sosial, Penanganan Fakir Miskin;
- 2) Meningkatnya kompetensi tenaga kerja, dengan program yang pendukung diantaranya Revitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK)/Techno Park dan Peningkatan Kompetensi Calon Tenaga Kerja;
- 3) Meningkatnya akses bagi tenaga kerja di dalam dan diluar negeri, dengan program yang pendukung diantaranya Peningkatan kualitas penempatan dan perluasan kesempatan kerja dan Pengembangan Kawasan Pekerja Sektor Informal;
- 4) Meningkatnya kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan, dengan program yang pendukung diantaranya Perlindungan Tenaga Kerja dan Peningkatan kualitas lingkungan kerja dan kesehatan kerja.



**D. Bidang 4 : Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya dengan sasaran pembangunan :**

- 1) Terwujudnya pemajuan kebudayaan melalui peningkatan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan Bali, program yang pendukung diantaranya Pemajuan Nilai Sejarah dan Tradisi, Pemajuan Kesenian dan Tenaga Kebudayaan, Pemajuan Cagar Budaya dan Permuseuman, Pemajuan Bahasa Aksara dan Sastra;
- 2) Meningkatnya kualitas tata kehidupan Krama Bali berdasarkan nilai-nilai Sad Kerthi program yang pendukung diantaranya Pengembangan Tata Kehidupan Krama Bali berdasarkan Nilai- nilai Atma Kerthi, Pengembangan Tata Kehidupan Krama Bali berdasarkan Nilai- nilai Jana Kerthi, Pengembangan Tata Kehidupan Krama Bali berdasarkan Nilai- nilai Wana Kerthi, Pengembangan Tata Kehidupan Krama Bali berdasarkan Nilai- nilai Danu Kerthi, Pengembangan Tata Kehidupan Krama Bali berdasarkan Nilai- nilai Segara Kerthi, Pengembangan Tata Kehidupan Krama Bali berdasarkan Nilai- nilai Jagat Kerthi;
- 3) Menguatnya kedudukan, tugas dan fungsi Desa Adat dan Subak, program yang pendukung diantaranya Penguatan Desa Adat dan Penguatan Subak

**E. Bidang 5 : Pariwisata dengan sasaran pembangunan :**

- 1) Meningkatnya kualitas destinasi pariwisata budaya berbasis komunitas program yang pendukung diantaranya Pengembangan Destinasi Pariwisata;
- 2) Berkembangnya produk pariwisata kreatif dan inovatif berbasis budaya di kabupaten/kota Provinsi Bali, program yang pendukung diantaranya Pengembangan Produk Pariwisata;



- 3) Meningkatnya pasar pariwisata Bali di pasar domestik dan global, program yang pendukung diantaranya Peningkatan Pemasaran Pariwisata;
- 4) Meningkatnya tingkat kepuasan wisatawan program yang pendukung diantaranya Pengembangan Standar Industri Pariwisata dan Pengembangan Informasi Pariwisata;
- 5) Meningkatnya Kualitas SDM Pariwisata program yang pendukung diantaranya Pengembangan SDM Pariwisata.

**F. Bidang Prioritas Pendukung dengan sasaran pembangunan :**

- 1) Meningkatnya Investasi yang lebih merata di wilayah Bali dengan program yang pendukung diantaranya Pengembangan Kawasan Pusat-Pusat Perekonomian berbasis sinergi pariwisata dengan pertanian dan Pengembangan investasi;
- 2) Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Lokal dengan program yang pendukung diantaranya Pengembangan Produk Lokal Krama Bali dan Penguatan distribusi produk local;
- 3) Meningkatnya kualitas produk IKM branding Bali berorientasi Ekspor dengan program yang pendukung diantaranya Pengembangan Industri Kreatif Kerajinan Rakyat dan Peningkatan ekspor industri kreatif;
- 4) Meningkatnya pusat-pusat perekonomian kecil dan menengah Krama Bali dengan program yang pendukung diantaranya Pemberdayaan Usaha Ekonomi Desa (UED), Pengembangan Kelembagaan Subak Sebagai Koperasi Tani, Pengembangan Koperasi Pengrajin Tenun, Penguatan Kelembagaan Koperasi, Pengembangan dan Penciptaan Iklim Usaha Koperasi, Penciptaan Iklim Usaha Dan Pengembangan Kewirausahaan Usaha, Mikro Kecil Dan Menengah, Peningkatan Kompetensi SDM KUMKM, Pengembangan sarana distribusi perdagangan;



- 5) Meningkatnya kualitas pelayanan transportasi dengan program yang pendukung diantaranya Peningkatan pelayanan angkutan Trans Sarbagita, Pengembangan infrastruktur transportasi public, Peningkatan pengendalian persimpangan berbasis Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) Provinsi, Pengembangan manajemen keselamatan lalu lintas dan angkutan pelayaran dan Peningkatan kualitas Jalan dan Jembatan Provinsi;
- 6) Meningkatnya rasa aman dan nyaman Krama Bali dan Wisatawan melakukan aktivitas kehidupannya, dengan program yang pendukung diantaranya Peningkatan Sistem Keamanan Terpadu, Pengendalian Bencana, Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan, Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Keamanan Tradisional, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Peningkatan Keamanan Lingkungan;
- 7) Meningkatnya peran serta Krama Bali dalam ketaatan hukum dan menjalankan hak- hak konstitusi dengan cara- cara demokratis dengan program yang pendukung diantaranya Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat, Pemantapan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, Peningkatan Pemberdayaan Perempuan;
- 8) Meningkatnya keharmonisan tata kehidupan Krama Bali berbasis wilayah dan lingkungan dengan program yang pendukung diantaranya Peningkatan kualitas penataan ruang, Peningkatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Pemberdayaan Masyarakat dan Perhutanan Sosial, Perlindungan Sumber Daya Air, Peningkatan Kualitas Bangunan dan Lingkungan;
- 9) Terwujudnya ekosistem yang berkelanjutan dengan program yang pendukung diantaranya Penuaan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, Peningkatan Kualitas Pelayanan Persampahan, Peningkatan Pengelolaan Sampah, Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral;



- 10) Meningkatnya kualitas pelayanan sektor public, dengan program yang pendukung diantaranya Peningkatan Kualitas Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Peningkatan Kualitas Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Publik, Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, Peningkatan Kualitas Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah, Peningkatan Layanan Arsip dan Perpustakaan dan Peningkatan Pendaftaran Kependudukan;
- 11) Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, dengan program yang pendukung diantaranya Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah, Penelitian dan Pengembangan, Pengembangan Data Statistik Daerah, Peningkatan Kualitas Perencanaan Keuangan Daerah, Peningkatan Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah, Peningkatan Kualitas Pelaksanaan dan Pelaporan Keuangan Daerah, Peningkatan Pengolahan Arsip, Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah, Pengembangan Manajemen Karir, Peningkatan Penilaian Kinerja ASN, Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Aparatur dan Legislatif, Peningkatan Pelayanan Produk Hukum Daerah, Peningkatan Tata Kelola Kepemerintahan, Peningkatan Kualitas Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik, Peningkatan Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah, Peningkatan Pelayanan Kehumasan, Peningkatan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa, Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa, Peningkatan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik, Peningkatan Kapabilitas APIP, Peningkatan Maturitas SPIP, Peningkatan pelayanan administrasi pemerintahan, Peningkatan administrasi pembangunan dan Pelayanan komunikasi dan penyebarluasan Informasi Potensi Daerah;
- 12) Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dengan program yang pendukung diantaranya Peningkatan Kapasitas Pendapatan Daerah dan Pengembangan kapasitas Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);



Berdasarkan pengukuran terhadap kinerja seluruh program dan kegiatan sesuai Daftar Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021 sebagaimana tersaji dalam Laporan Kinerja ini, hampir seluruh program dan kegiatan Perangkat Daerah (PD) memperlihatkan capaian kinerja yang baik, bahkan beberapa indikator-indikator pendidikan dan kesehatan sudah berada di atas rata-rata Nasional. Dengan demikian secara umum kinerja Pemerintah Provinsi Bali, baik secara kuantitatif maupun kualitatif sudah termasuk kategori baik. Pencapaian kinerja ini dipengaruhi beberapa variabel seperti kepemimpinan yang visioner, komitmen membangun pemerintahan yang berkinerja baik dan akuntabel, serta sinergi seluruh jajaran aparatur Pemerintah Provinsi Bali. Kekurangan, kelemahan, capaian yang belum optimal menjadi referensi dalam perencanaan kinerja ke depan.



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pembangunan Daerah Bali pada masa mendatang masih menghadapi tantangan yang berat mengingat kondisi perekonomian daerah yang masih fluktuatif, angka kemiskinan dan pengangguran yang masih tinggi, serta terbatasnya secara nyata sumber-sumber pembiayaan pembangunan. Perhatian pemerintah, sektor swasta dan segenap komponen masyarakat sangat diperlukan guna menyikapi tantangan tersebut, termasuk pula keharusan pemerintah untuk terus melakukan regulasi, deregulasi, debirokratisasi, rekapitalisasi, reposisi, relokasi dan restrukturisasi berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan iklim usaha yang lebih kondusif dan kehidupan masyarakat yang lebih nyaman dan sejahtera.

Untuk menggerakkan segenap potensi pembangunan yang ada di daerah, sesuai dengan kewenangan dan kewajiban dalam penyelenggaraan otonomi daerah hendaknya dilakukan secara terencana dan terukur. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan pembangunan daerah sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan dan tantangan yang semakin berat.

Pembangunan ditujukan untuk meningkatkan harkat dan martabat serta memperkuat jati diri dan kepribadian masyarakat dalam pendekatan lokal, nasional dan global yang meliputi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam perencananan pembangunan daerah, Provinsi Bali memperhatikan keseimbangan berbagai aspek dalam satu kesatuan wilayah pembangunan ekonomi, hukum, sosial, budaya, politik, pemerintahan dan



lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan, dengan diikuti oleh penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel (*good governance*).

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sisten Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dalam salah satu pasal dari Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan Negara meliputi kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan Negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Asas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan setiap penyelenggara Negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kepemerintahan yang akuntabel merupakan sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan aspirasi serta cita-cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Berkaitan dengan hal itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sehubungan dengan itu, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sisten Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Pemerintah Provinsi Bali beserta Pejabat Eselon II diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Bali tahun 2021 dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan program dan kegiatan utama yang dicerminkan dari pencapaian kinerja sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2018-2023. Penyusunan Laporan Kinerja ini mempunyai manfaat sangat penting, disamping sebagai dokumen pelaksanaan Perencanaan



taktis strategis, juga untuk menunjukkan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan selama satu tahun anggaran dan RPJMD Semesta Berencana Pemerintah Provinsi Bali tahun 2018-2023.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Bali merupakan upaya untuk menunjukkan arah dan dimensi kebijakan pembangunan di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

Sasaran Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Bali tahun 2021 adalah sebagai Laporan pencapaian sasaran Strategis Perangkat Daerah berupa pelaksanaan program dan kegiatan utama sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan pencapaian sasaran pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2018-2023.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan Laporan pencapaian Sasaran Strategis berupa analisis hasil Pengukuran pencapaian sasaran serta rangkuman hasil kinerja masing-masing Perangkat Daerah sebagaimana telah direncanakan dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023.

LKjIP Pemerintah Provinsi Bali disusun berdasarkan beberapa landasan sebagai berikut :

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);



- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023;
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Bali Tahun 2018 tentang anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Tahun 2019;
- Peraturan Gubernur Bali Nomor 37 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana 2021
- Dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2021.

## **B. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Laporan Kinerja Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Bali tahun 2021 adalah :

1. Pencapaian Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2021
2. Prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2021;

## **C. Isu Strategis Provinsi Bali**

Berdasarkan permasalahan pembangunan yang ada, dan melihat Bali sebagai bagian dari Negara Republik Indonesia serta sebagai etalase bagi masyarakat internasional, maka perlu dilakukan identifikasi isu-isu strategis yang perlu mendapat perhatian dan pemecahan. Terdapat enam rumusan isu strategis yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan pembangunan lima tahun ke depan. Enam isu strategis yang dimaksud, yaitu kesenjangan, daya saing, nilai tambah, *sustainability*/keberlangsungan, reformasi birokrasi dan layanan umum, serta perubahan iklim dan penanganan bencana.

### Gambar 1.1 Isu Strategis Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2018-2023

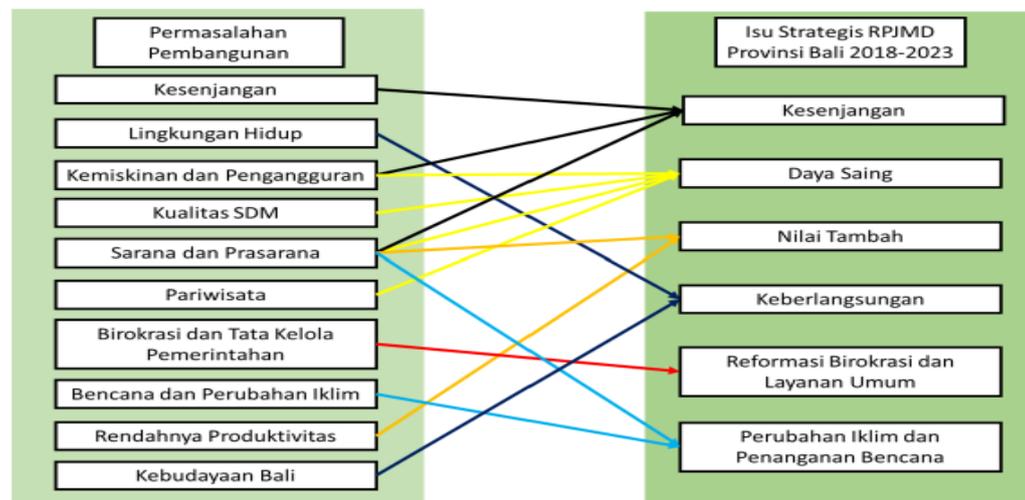


Sumber : RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023

Berdasarkan gambar isu strategis, terdapat empat isu strategis di tataran program Pemerintah Provinsi Bali yang saling terkait satu dengan yang lainnya. Empat isu strategis yang dimaksud yaitu kesenjangan, daya saing, nilai tambah, dan keberlangsungan (*sustainability*). Keempat isu strategis tersebut akan saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Nantinya program-program yang dilakukan untuk menyelesaikan keempat isu strategis tersebut tidak dapat dilakukan terpisah harus saling terintegrasi melalui pendekatan THIS (*Targetted, Holistic, Integrated, dan Spatial*). Dalam hal ini, *targetted* berarti harus ada target yang dapat diukur, dapat dicapai, dan waktu pencapaiannya jelas. *Holistic* dan *integrated* berarti program yang dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi baik dari hulu sampai hilir maupun melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Selain itu, *spatial* berarti adanya detail lokasi dan pemanfaatan tata ruangnya. Untuk melaksanakan program-program yang terkait dengan keempat isu strategis tersebut, sangat tergantung dari kapasitas dan kualitas dari birokrasi. Sehingga perlu adanya reformasi birokrasi dan layanan umum untuk menunjang pelaksanaannya agar keempat isu strategis tersebut dapat ditangani, dengan baik. Selain itu, perlu juga memperhatikan faktor eksternal yaitu kondisi geografis

Provinsi Bali dan perubahan iklim yang menyebabkan besarnya risiko bencana yang dapat terjadi. Faktor eksternal tersebut dapat mempengaruhi keempat isu strategis tersebut.

**Gambar 1.2 Keterkaitan Permasalahan Pembangunan Dengan Isu Strategis Pemerintah Provinsi Bali 2018-2023**



Sumber : RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023

Enam isu strategis tersebut terkait dengan permasalahan pembangunan. Permasalahan pembangunan kesenjangan, kemiskinan dan pengangguran, serta sarana dan prasarana sangat terkait dengan isu strategis kesenjangan. Sedangkan isu strategis daya saing terkait dengan permasalahan pembangunan kemiskinan dan pengangguran, kualitas SDM, sarana dan prasarana, serta pariwisata. Permasalahan pembangunan sarana dan prasarana serta rendahnya produktivitas terkait dengan isu strategis nilai tambah. Permasalahan pembangunan lingkungan hidup dan kebudayaan Bali terkait erat dengan isu strategis keberlangsungan. Birokrasi dan tata kelola pemerintah yang menjadi permasalahan pembangunan sangat terkait dengan isu strategis reformasi birokrasi dan layanan umum. Permasalahan pembangunan sarana dan prasarana serta bencana dan perubahan iklim memiliki keterkaitan dengan isu strategis perubahan iklim dan penanganan bencana.

Isu strategis tidak hanya berkaitan dengan permasalahan pembangunan yang telah diuraikan sebelumnya, namun berkaitan juga dengan permasalahan



yang menjadi fokus dalam visi *Nangun Sat Kerthi Loka Bali*. Permasalahan yang dimaksud yaitu alam Bali, manusia Bali, dan kebudayaan Bali. Isu strategis keberlangsungan sangat terkait dengan ketiga permasalahan yaitu alam, manusia, dan kebudayaan Bali. Isu strategis perubahan iklim dan penanganan bencana erat kaitannya dengan permasalahan alam Bali. Sedangkan isu strategis daya saing sangat terkait dengan permasalahan manusia Bali. Isu strategis nilai tambah terkait dengan permasalahan manusia dan kebudayaan Bali. Isu strategis kesenjangan erat kaitannya dengan permasalahan manusia Bali. Isu strategis yang terakhir yaitu reformasi birokrasi dan layanan umum terkait dengan isu strategis yang lainnya dan terkait dengan ketiga permasalahan yaitu alam, manusia, dan kebudayaan Bali.

Enam isu strategis yang telah diuraikan sebelumnya telah sinkron dengan lima prioritas dan sasaran pembangunan Provinsi Bali. Lima prioritas dan sasaran pembangunan tersebut, yaitu (1) pembangunan manusia melalui peningkatan pelayanan dasar, (2) pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui pengembangan infrastruktur dan pelestarian lingkungan, (3) peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, pariwisata, industri kreatif dan jasa produktif, (4) menjaga ketentraman dan ketertiban serta pelestarian budaya, (5) peningkatan tata kelola pemerintahan dan birokrasi yang berkualitas. Keterkaitan isu strategis dengan prioritas dan sasaran pembangunan Provinsi Bali dapat dilihat pada tabel di bawah.



**Tabel 1.1 Relasi Isu Strategis Dengan Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Provinsi Bali**

ISU STRATEGIS	LINGKUP	PRIORITAS	PENDUKUNG
<b>Kesenjangan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Antar Wilayah (utara vs selatan)</li> <li>• Antar Sektor (pariwisata vs pertanian)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pengembangan infrastruktur dan pelestarian lingkungan</li> <li>• peningkatan pelayanan dasar</li> <li>• pertanian, pariwisata, industri kreatif dan jasa produktif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• menjaga ketentraman dan ketertiban serta pelestarian budaya</li> <li>• Birokrasi dan Tata Kelola yang berkualitas</li> </ul>
<b>Nilai Tambah &amp; Produktivitas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Produktivitas produksi, budaya dan lahan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pertanian, pariwisata, industri kreatif dan jasa produktif</li> <li>• menjaga ketentraman dan ketertiban serta pelestarian budaya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pengembangan infrastruktur dan pelestarian lingkungan</li> <li>• peningkatan pelayanan dasar</li> <li>• Birokrasi dan Tata Kelola yang berkualitas</li> </ul>
<b>Daya Saing</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Destinasi &amp; atraksi wisata</li> <li>• Produk lokal (<i>Made in Bali</i>)</li> <li>• Sumber Daya Manusia</li> <li>• Investasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• menjaga ketentraman dan ketertiban serta pelestarian budaya</li> <li>• pertanian, pariwisata, industri kreatif dan jasa produktif</li> <li>• pengembangan infrastruktur dan pelestarian lingkungan</li> <li>• peningkatan pelayanan dasar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Birokrasi dan Tata Kelola yang berkualitas</li> </ul>
<b>Sustainability/ Keberlangsungan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Daya Dukung Lingkungan</li> <li>• Ketahanan Budaya</li> <li>• Kualitas Sumber Daya Manusia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pertanian, pariwisata, industri kreatif dan jasa produktif</li> <li>• pengembangan infrastruktur dan pelestarian lingkungan</li> <li>• peningkatan pelayanan dasar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• menjaga ketentraman dan ketertiban serta pelestarian budaya</li> <li>• Birokrasi dan Tata Kelola yang berkualitas</li> </ul>
<b>Reformasi Birokrasi dan Layanan Umum</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reformasi Birokrasi</li> <li>• Administrasi Publik</li> <li>• Tata Kelola</li> <li>• Ketertiban</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• menjaga ketentraman dan ketertiban serta pelestarian budaya</li> <li>• Birokrasi dan Tata Kelola yang berkualitas</li> </ul>	
<b>Perubahan Iklim dan Penanganan Bencana</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mitigasi dampak perubahan iklim</li> <li>• Penataan lingkungan</li> <li>• Kebencanaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pengembangan infrastruktur dan pelestarian lingkungan</li> <li>• menjaga ketentraman dan ketertiban serta pelestarian budaya</li> <li>• Birokrasi dan Tata Kelola yang berkualitas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pertanian, pariwisata, industri kreatif dan jasa produktif</li> <li>• peningkatan pelayanan dasar</li> </ul>

Sumber : RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023



## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

Upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dilaksanakan melalui pembangunan secara berkelanjutan, optimalisasi sumber daya dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan. Untuk menggerakkan potensi pembangunan daerah sesuai dengan kewenangan dan kewajiban dalam penyelenggaraan otonomi daerah hendaknya dilakukan secara terencana dan terukur. Pembangunan yang berdayaguna dan berhasil guna akan dapat diwujudkan apabila didahului oleh adanya perencanaan yang terpadu, baik perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan perencanaan tahunan.

Sebagai kerangka perencanaan jangka panjang dijabarkan dengan perencanaan jangka menengah melalui penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 sesuai Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019. Penjabaran lebih lanjut dalam perencanaan tahunan dituangkan kedalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021 dan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Provinsi Bali Tahun 2021 sesuai Nota Kesepakatan Pemerintah Provinsi Bali dengan DPRD Provinsi Bali.

#### **A. Rencana Strategis**

Rencana Strategis dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 merupakan suatu proses awal dari rangkaian proses dalam usaha untuk mencapai tujuan. Dalam Rencana Strategis hal yang diperhatikan adalah lingkungan Internal (Kekuatan dan Kelemahan) serta Lingkungan Eksternal



(Peluang dan Tantangan) suatu organisasi. Rencana Strategis meliputi penetapan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran serta cara mencapai Tujuan dan Sasaran Strategis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

## 1. VISI

RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali 2018-2023 merupakan penjabaran dari visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur hasil pemilihan kepala daerah tahun 2018 yang telah resmi dilantik pada tanggal 5 September 2018. Visi “***Nangun Sat Kerthi Loka Bali***” dengan 22 misi diwujudkan melalui pola pembangunan semesta berencana yang dilaksanakan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi. Pola pembangunan semesta berencana merupakan model pembangunan untuk mencapai kehidupan masyarakat Bali yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan sesuai dengan Tri Sakti Bung Karno dan nilai-nilai Pancasila 1 Juni 1945.

Pembangunan Semesta Berencana berlandaskan nilai-nilai kearifan lokal Bali *Sad Kerthi* yaitu 6 (enam) sumber utama kesejahteraan dan kebahagiaan kehidupan masyarakat Bali, meliputi penyucian jiwa (*atma kerthi*), penyucian laut (*segara kerthi*), penyucian sumber air (*danu kerthi*), penyucian tumbuh-tumbuhan (*wana kerthi*), penyucian manusia (*jana kerthi*) dan penyucian alam semesta (*jagat kerthi*) sertalandakan filosofi *Tri Hita Karana* yaitu hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia dan manusia dengan alam.

Penyelenggaraan pembangunan Semesta Berencana Bali harus dilakukan dengan paradigma/pendekatan yang meliputi 7 (tujuh) prinsip:

1. Pembangunan yang mengandung dimensi *sakala* dan *niskala*, yaitu penyelenggaraan pembangunan dengan segala upaya untuk mencapainya harus senantiasa diawali dengan memohon restu, petunjuk, dan tuntunan Hyang Widhi Wasa sesuai nilai-nilai luhur



tatanan kehidupan Bali sehingga proses dan pelaksanaan pembangunan bisa berlangsung dengan lancar, sukses, dan rahayu.

2. Pembangunan bersifat Holistik; membangun seluruh wilayah Bali secara terpola, terencana, terarah, dan terintegrasi yang memastikan adanya keseimbangan, pemerataan, dan keadilan pembangunan antarwilayah Kabupaten/Kota se-Bali;
3. Pembangunan bersifat integratif; Pemerintah Provinsi Bali harus membangun Kabupaten/Kota, bukan membangun di Kabupaten/Kota secara parsial dengan tujuan, sasaran, dan obyek yang berbeda antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota. Membangun Kabupaten/Kota artinya pembangunan yang diselenggarakan harus melalui proses perencanaan yang dilakukan secara bersama-sama oleh Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota;
4. Pembangunan berbasis perencanaan yang bersifat sinergis dalam konteks kepentingan membangun Kabupaten/Kota se-Bali, yang wilayah kewenangannya berada di Pemerintah Kabupaten/Kota. Sehingga Pemerintah Provinsi harus lebih banyak berperan sebagai koordinator, regulator, dan fasilitator; bukan sebagai operator langsung;
5. Pembangunan Berbasis Kepemimpinan bersifat Kultural. Gubernur Bali sebagai Kepala Pemerintahan di daerah dan perwakilan Pemerintah Pusat di daerah harus menerapkan kepemimpinan yang lebih mengedepankan kepemimpinan bersifat kultural, bukan formalistik yang bersifat hierarki dan struktural dalam memimpin pembangunan Bali yang di dalamnya terdapat Bupati/Walikota yang memiliki kewenangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
6. Pembangunan dengan pendekatan Satu Kesatuan Wilayah. Bali yang wilayahnya sangat kecil dan memiliki sumber daya sangat terbatas, maka pembangunan Bali harus dilakukan dengan pendekatan



pembangunan dalam satu kesatuan wilayah, satu pulau, satu pola, dan satu tata kelola;

7. Pembangunan yang Berpihak pada Kepentingan Bali. Pembangunan Bali dalam berbagai sektor, khususnya yang berkaitan dengan kepariwisataan, maka untuk menjawab adanya berbagai tantangan dan permasalahan yang bersifat lokal, nasional, dan global diperlukan kepemimpinan yang lurus, *lascarya*, prinsipil, berani, dan tegas. Bersikap lurus dalam mengambil posisi terutama terkait penegakan peraturan perundang-undangan, kepemimpinan yang berani dalam *nindihin* Gumi Bali, guna menjaga dan memelihara *Genuine* Bali; termasuk kepemimpinan yang berani melakukan terobosan kebijakan baru terhadap segala upaya untuk memajukan Bali.

## 2. Misi

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut maka perlu dituangkan dalam bentuk Misi yang dapat memberikan arah, tujuan yang ingin dicapai, dan memberikan fokus terhadap program yang akan dilaksanakan serta untuk menumbuhkan partisipasi semua pihak.

Untuk mewujudkan visi tersebut, ditempuh melalui dua puluh dua misi pembangunan Provinsi Bali sebagai berikut:

1. Memastikan terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, dan papan dalam jumlah dan kualitas yang memadai bagi kehidupan Krama Bali.
2. Mewujudkan kemandirian pangan, meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian, dan meningkatkan kesejahteraan petani.
3. Mengembangkan pelayanan kesehatan masyarakat yang terjangkau, merata, adil dan berkualitas serta didukung dengan pengembangan sistem dan data base riwayat kesehatan Krama Bali berbasis kecamatan.



4. Memastikan tersedianya pelayanan pendidikan yang terjangkau, merata, adil, dan berkualitas serta melaksanakan wajib belajar 12 tahun.
5. Mengembangkan sistem pendidikan dasar dan pendidikan menengah berbasis keagamaan Hindu dalam bentuk Pasraman di Desa Pakraman/Desa Adat.
6. Mengembangkan sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi, yaitu berkualitas dan berintegritas: bermutu, profesional dan bermoral, serta memiliki jati diri kokoh yang dikembangkan berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal Krama Bali.
7. Mengembangkan sistem jaminan sosial secara komprehensif dan terintegrasi bagi kehidupan Krama Bali sejak mulai kelahiran, tumbuh dan berkembang sampai akhir masa kehidupannya.
8. Menghasilkan tenaga kerja yang kompeten, produktif, berkualitas dan memiliki daya saing tinggi serta memperluas akses kesempatan kerja di dalam dan di luar negeri.
9. Mengembangkan sistem jaminan sosial dan perlindungan tenaga kerja yang komprehensif, mudah dijangkau, bermutu, dan terintegrasi bagi Krama Bali yang bekerja di dalam dan di luar negeri.
10. Memajukan kebudayaan Bali melalui peningkatan perlindungan, pembinaan, pengembangan dan pemanfaatan nilai-nilai adat, agama, tradisi, seni, dan budaya Krama Bali.
11. Mengembangkan tata kehidupan Krama Bali secara sakala dan niskala berdasarkan nilai-nilai filsafat Sad Kertih, yaitu Atma Kertih, Danu Kertih, Wana Kertih, Segara Kertih, Jana Kertih, dan Jagat Kertih.
12. Memperkuat kedudukan, tugas dan fungsi Desa Pakraman/ Desa Adat dalam menyelenggarakan kehidupan Krama Bali yang meliputi Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan.



13. Mengembangkan destinasi dan produk pariwisata baru berbasis budaya dan berpihak kepada rakyat yang terintegrasi antar-Kabupaten/Kota se-Bali.
14. Meningkatkan promosi pariwisata Bali di dalam dan di luar negeri secara bersinergi antar-Kabupaten/Kota se-Bali dengan mengembangkan inovasi dan kreativitas baru.
15. Meningkatkan standar kualitas pelayanan kepariwisataan secara komprehensif.
16. Membangun dan mengembangkan pusat-pusat perekonomian baru sesuai dengan potensi Kabupaten/Kota di Bali dengan memberdayakan sumber daya lokal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dalam arti luas.
17. Membangun dan mengembangkan industri kecil dan menengah berbasis budaya (branding Bali) untuk memperkuat perekonomian Krama Bali.
18. Meningkatkan pembangunan infrastruktur (darat, laut dan udara) secara terintegrasi serta konektivitas antarwilayah untuk mendukung pembangunan perekonomian serta akses dan mutu pelayanan publik di Bali.
19. Mengembangkan sistem keamanan terpadu yang ditopang dengan sumber daya manusia serta sarana prasarana yang memadai untuk menjaga keamanan daerah dan Krama Bali serta keamanan para wisatawan.
20. Mewujudkan kehidupan Krama Bali yang demokratis dan berkeadilan dengan memperkuat budaya hukum, budaya politik, dan kesetaraan gender dengan memperhatikan nilai-nilai budaya Bali.
21. Mengembangkan tata kehidupan Krama Bali, menata wilayah, dan lingkungan yang bersih, hijau dan indah.



22. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, terbuka, transparan, akuntabel dan bersih, serta meningkatkan pelayanan publik terpadu yang cepat, pasti, dan murah.

### 3. Tujuan dan Sasaran

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Success Factor*) yang ditetapkan setelah penetapan Visi dan Misi. Penetapan Tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi.

Sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai. Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 seperti tabel di bawah ini.



Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Pemerintah Provinsi Bali

NO	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR
1	2	3	4	5	6
1	Memastikan Terpenuhinya Kebutuhan Pangan, Sandang dan Papan Dalam Jumlah dan Kualitas yang Memadai bagi Kehidupan Krama Bali	Terpenuhinya kebutuhan dasar Krama Bali dengan Kualitas yang layak	Tingkat Infasi Bali	Meningkatnya Ketahanan pangan bagi Krama Bali	Ketersediaan Pangan Utama
2	Mewujudkan Kemandirian Pangan, Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Pertanian serta Meningkatkan Kesejahteraan Petani	Terwujudnya swasembada pangan Krama Bali dan daya saing pertanian	Indeks Ketahanan Pangan	Meningkatnya diversifikasi dan optimalisasi potensi sumber daya pangan lokal	Nilai Tambah Produk Pertanian (NTTP)
				Meningkatnya kualitas hasil pertanian dan pertanian krama bali	Nilai Tukar Petani (NTP)



1	2	3	4	5	6
					Nilai Tukar Nelayan (NTN)
3	Mengembangkan Pelayanan Kesehatan Masyarakat yang terjangkau, Merata, Adil dan Berkualitas serta didukung dengan pengembangan Sistem dan Data Base Riwayat Kesehatan Krama Bali berbasis Kecataman	Meningkatnya derajat kesehatan Krama Bali	Umur Harapan Hidup (UHH)	Meningkatnya Standar kualitas Pelayanan kesehatan Krama Bali	Indeks Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Kesehatan
4	Memastikan peserta dalam sistem jaminan kesehatan masyarakat	Terwujudnya wajib belajar 12 Tahun yang berkualitas	Rata-rata lama sekolah	Terwujudnya Wajib belajar 12 Tahun	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk usia 16-18
				Meningkatnya pelayanan pendidikan dasar dan menengah terjangkau, merata, adil dan berkualitas	Angka Harapan Lama sekolah



1	2	3	4	5	6
5	Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang berdaya Saing Tinggi yaitu Berkualitas dan Berintegritas, Bermutu, Profesuonal dan Bermoral serta memiliki Jatidiri yang kokoh yang dikembangkan berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal Krama Bali	Terwujudnya Daya Sumber Daya Manusia (SDM) Krama Bali unggul dan berdaya saing tinggi	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Meningkatnya Daya Saing SDM Krama Bali	Indeks Daya Saing SDM Provinsi Bali
6	Mengembangkan Sistem Jaminan Sosial secara Komprehensif dan Terintegrasi Bagi Kehidupan Krama Bali Sejak Mulai Lahir, Tumbuh dan berkembang sampai akhir masa Kehidupannya	Terwujudnya Kesejahteraan sosial Krama Bali	Persentase Kemiskinan	Terwujudnya Kesejahteraan Sosial Krama Bali	Persentase Kemiskinan
7	Menghasilkan Tenaga Kerja yang Kompeten, Produktif, Berkualitas dan Memiliki Daya Saing Tinggi Serta Memperluas Akses Kesempatan Kerja di Dalam dan di Luar Negeri	Terwujudnya tenaga kerja yang berkompeten dan Berdaya Saing	Tingkat Pengangguran Terbuka	Meningkatnya kompetensi tenaga Kerja	Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)



1	2	3	4	5	6
8	Meningkatkan Promosi Pariwisata Bali di Dalam dan Luar Negeri Secara Bersinergi antar Kota/Kabupaten Se- Bali dengan mengembangkan Kreativitas Inovasi	Meningkatnya a pasar Pariwisata Bali	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	Meningkatnya pasar Pariwisata Bali di Pasar Domestik dan Global	Jumlah Devisa Sektor Pariwisata
9	Meningkatkan Standar Kualitas Pelayanan Kepariwisataa n secara Komprehensif	Meningkatnya Kualitas pelayanan kepariwisataa n	indeks kepuasan wisatawan	Meningkatnya kualitas kepuasan wisatawan	Persentase kunjungan wisatawan mancanegara dan nusantara
10	Membangun dan mengembangkan pusat perekonomian baru sesuai dengan potensi Kab/Kota Bali dengan memberdayakan sumber daya lokal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dalam arti luas	Terwujudnya pemerataan pertumbuhan ekonomi bali	Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya investasi yang lebih merata di wilayah Bali	Persentase PMA DAN PMDN diluar wilayah SARBAGITA
11	Membangun dan mengembangkan industri kecil dan menengah berbasis Budaya (Branding Bali) untuk Memperkuat Perekonomian Krama Bali	Berkembangnya perekonomian berbasis budaya bali	Kontribusi KUMKM terhadap PDRB Bali		



1	2	3	4	5	6
12	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur (Darat, Laut Dan Udara) Secara Terintegrasi Dan Terkoneksi Antar Wilayah Untuk Mendukung Pembangunan Perekonomian Serta Akses Dan Mutu Pelayanan Publik Di Bali.	Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur darat, laut dan udara secara terintegrasi dan terkoneksi mendukung pertumbuhan perekonomian baru	Indeks konektivitas		
13	Mengembangkan Sistem Keamanan Terpadu Yang Ditopang Dengan Sumber Daya Manusia Serta Sarana Prasarana Yang Memadai Untuk Menjaga Keamanan Daerah Dan Krama Bali Serta Keamanan Para Wisatawan	Terwujudnya stabilitas keamanan dan kenyamanan Krama Bali dan Wisatawan	Persentase Penyelesaian pelanggaran ketenteraman, kenyamanan dan ketertiban umum	Meningkatnya rasa aman dan nyaman Krama Bali dan Wisatawan melakukan aktivitas kehidupannya.	Angka kriminalitas



1	2	3	4	5	6
14	Mewujudkan Kehidupan Krama Bali Yang Demokratis Dan Berkeadilan Dengan Memperkuat Budaya Hukum, Budaya Politik Dan Kesetaraan Gender Dengan Memperhatikan Nilai-Nilai Budaya Bali.	Terwujudnya tata kehidupan Krama Bali yang Madani sesuai dengan nilai-nilai Budaya Bali	Indeks demokrasi	Meningkatnya peran serta Krama Bali dalam ketaatan hukum dan menjalankan hak-hak konstitusi dengan cara-cara demokratis	Persentase masyarakat Bali yang terdaftar sebagai pemilih dalam setiap Pemilu/Pilkada
15	Mengembangkan Tata Kehidupan Krama Bali, Menata Wilayah Dan Lingkungan Yang Bersih, Hijau Dan Indah.	Terwujudnya Tata Kehidupan Krama Bali yang harmonis	Koefisien Wilayah Terbangun (KWT)	Terwujudnya wilayah dan lingkungan hidup yang bersih, hijau dan indah	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Indeks kualitas udara Mitigasi Gas Rumah Kaca (GRK) Persentase bauran Energi Baru dan Terbarukan (EBT)
16	Mengembangkan Sistem Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Efektif, Terbuka, Transparan, Akuntabel Dan Bersih Serta Meningkatkan Pelayanan Publik Terpadu Yang Cepat, Pasti Dan Murah.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Survey Eksternal Pelayanan Publik	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Indeks Reformasi Birokrasi Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

Sumber : RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023.



## B. Strategi dan Arah Kebijakan Umum

Untuk mencapai Visi dan melaksanakan Misi Pemerintah Provinsi Bali, strategi yang akan ditempuh adalah:

1. Meningkatkan koordinasi dan sistem pembiayaan *cost sharing* dengan kabupaten/kota.
2. Meningkatkan peran serta masyarakat dan penguatan kelembagaan masyarakat serta melakukan penegakan hukum secara konsisten.
3. Meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan pengawasan program-program pembangunan.
4. Mengembangkan instrumen regulasi yang relevan untuk mendukung kebijakan pembangunan daerah.
5. Intensifikasi sumber-sumber pendapatan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.
6. Melaksanakan advokasi ke pemerintah pusat untuk kemungkinan mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru untuk membiayai pembangunan.

Arah Kebijakan Umum Pembangunan Daerah Bali Tahun 2021 disusun berdasarkan rumusan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah yang melibatkan pihak-pihak terkait, masukan DPRD berupa pokok-pokok pikiran serta penjabaran RPJMD. Selanjutnya Arah Kebijakan Umum ini menjadi kesepakatan antara pihak Legislatif dan Eksekutif, sehingga wajib menjadi pedoman bagi semua Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.



### C. Indikator Makro Tahun 2021

Seluruh kebijakan pembangunan yang tertuang dalam sasaran misi dan prioritas pembangunan Tahun 2021 diarahkan untuk mencapai sasaran indikator makro Provinsi Bali Tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 2.2 Perbandingan Capaian/Realisasi Indikator Makro Provinsi Bali Tahun 2018 s.d 2023 :

No.	Indikator Makro	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Jumlah Penduduk	4,2 Juta	4,30 juta	4,32 juta	4,32 juta		
2.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,35	5,63	-9,31	4,52		
3.	PDRB Perkapita (ADHK)	34 juta	36 juta	32 juta	36 juta		
4.	PDRB Perkapita Nominal (ADHB)	50 juta	58 juta	51 juta	51 Juta		
5.	Inflasi	3,13	1,57	0,8	1,09		
6.	Tingkat Kemiskinan (%)	3.91	3,79	4,45	4,71		
7.	Jumlah Penduduk Miskin	171,7 6	163,85	165,19	201.97		
8.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	1,4	1,57	5,63	5,37		
9.	Gini Ratio	0,36	0,37	0,36	0,37		
10.	IPM	74,46	74,77	75,50	75,69		
11.	Investasi	5,57 juta	22.343. 296	n/a	21.15		
12.	Jumlah Ekspor	n/a	US\$ 59	US\$ 41	110		

Sumber : BPS Provinsi Bali & SIPD Provinsi Bali (Data diolah B. Organisasi 2022)



#### **D. Perjanjian Kinerja**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Bali Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021 sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) memuat isu strategis, kondisi dan permasalahan pembangunan, kerangka makro ekonomi, prioritas pembangunan, program dan kegiatan serta perkiraan pembiayaan pembangunan yang bersumber dari dana desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2019-2023. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang pada umumnya sering disebut Rencana Kerja Tahunan (RKT) dalam hal ini adalah kegiatan dalam APBD tahun anggaran 2021, disusun setiap tahun dan memuat informasi tentang : 1) Sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan; 2) Indikator kinerja sasaran dan target capaiannya.

Sasaran adalah hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu satu tahun tertentu. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, sehingga penetapan sasaran harus selaras dan mempunyai hubungan logis dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana strategik. Sasaran bersifat spesifik dan terukur berdasarkan indikator kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan



pencapaiannya. Sasaran yang akan dicapai Pemerintah Provinsi Bali selama Tahun 2021 secara rinci disajikan dalam formulir pengukuran kinerja.

Indikator Kinerja Utama adalah tolok ukur kinerja utama berupa indikator pelaksanaan sasaran/program/kegiatan sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-Perangkat Daerah). Indikator Kinerja Utama merupakan upaya untuk menunjukkan arah dan dimensi kebijakan pembangunan di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Bali Tahun 2018-2023 melalui kompilasi seluruh sasaran strategis dari seluruh Perangkat Daerah.

Indikator Kinerja Utama ini memuat aspek, fokus, indikator dan penjelasan tentang ukuran keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan dari Pemerintah Provinsi Bali yang mencerminkan sesuatu yang akan dicapai secara nyata dari pelaksanaan program dalam rumusan yang spesifik, terukur, dan berorientasi pada hasil (*outcome*) sebagaimana telah direncanakan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Bali Tahun 2018-2023, Arah Kebijakan Umum APBD serta Strategi dan Skala Prioritas APBD Provinsi Bali berdasarkan bidang kewenangan pemerintahan.

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Bali terdiri dari 22 (dua puluh dua) aspek yang menjadi prioritas pembangunan daerah Bali.



Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki. Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Pemerintah Provinsi Bali ditetapkan dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, berisi program utama, sasaran yang hendak dicapai dengan target indicator *output* dan atau *outcome* pada tabel terlampir.

Sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan.

Pencapaian sasaran sekurang-kurangnya menyajikan informasi tentang pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama, penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja, perbandingan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja lima tahunan yang direncanakan. Pencapaian Indikator Sasaran yang tertuang dalam Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Bali selama Tahun 2021 adalah sebagai berikut :



Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET 2021
1	2	3	4
1	Terpenuhinya kebutuhan dasar Krama Bali dengan kualitas layak	Tingkat Inflasi Bali	3.00
		Persentase Ketersediaan pangan utama	100
2	Terwujudnya swasembada pangan Krama Bali dan daya saing pertanian	Indeks Ketahanan Pangan	80
3	Meningkatnya diversifikasi dan optimalisasi potensi sumber daya pangan lokal	Nilai Tambah Produk Pertanian (NTPP)	31
4	Meningkatnya kualitas hasil pertanian Krama Bali	Nilai Tukar Petani (NTP)	105
		Nilai Tukar Nelayan (NTN)	117,9
5	Meningkatnya derajat kesehatan Krama Bali	Umur Harapan Hidup	72,3
6	Terwujudnya wajib belajar 12 Tahun yang berkualitas	Rata-rata lama sekolah	10,56
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk usia 16-18 Tahun	82,92
7	Meningkatnya pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang terjangkau, merata, adil, dan berkualitas	Angka harapan lama sekolah	13,77
8	Terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) Krama Bali yang unggul dan berdaya saing tinggi	Indeks Pembangunan Manusia	75,61
9	Meningkatnya daya saing SDM Krama Bali	Indeks Daya Saing SDM Bali	70
10	Terwujudnya kesejahteraan sosial krama bali	Persentase Kemiskinan	1,90
11	Terwujudnya tenaga kerja yang berkompoten dan berdaya saing	Tingkat pengangguran terbuka	1,07



1	2	3	4
12	Meningkatnya kompetensi tenaga	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	76,30
13	Terwujudnya tata kehidupan Krama Bali berdasarkan nilai-nilai Sad Kerthi	Indeks Kebahagiaan	73,98
14	Meningkatnya pasar Pariwisata Bali	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	45
15	Meningkatnya pasar pariwisata Bali di pasar domestik dan global	Jumlah Devisa sektor pariwisata	9,620
16	Meningkatnya kualitas pelayanan kepariwisataan	Indeks Kepuasan wisatawan	81
17	Terwujudnya pemerataan pertumbuhan ekonomi Bali	Persentase Pertumbuhan Ekonomi	6,60
18	Berkembangnya perekonomian berbasis budaya bali	Kontribusi KUMKM terhadap PDRB Bali	12,5
19	Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar, laut dan udara secara terintegrasi an terkoneksi mendukung pertumbuhan perekonomian baru	Indeks konektivitas	2,5
20	Meningkatnya rasa aman Krama Bali dan Wisata melakukan aktivitas kehidupannya	Angka Kriminalitas	3.200
21	Terwujudnya tata kehidupan Krama Bali yang Madani sesuai dengan nilai-nilai Budaya Bali	Indeks demokrasi	81
		Indeks Pemberdayaan gender	64,75
22	Meningkatnya keharmonisan tata kehidupan Krama Bali berbasis wilayah dan lingkungan	Persentase Daya dukung lingkungan	17,46



1	2	3	4
23	Terwujudnya ekosistem yang berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	63,21
		Mitigasi Gas Rumah Kaca (GRK)	13,3
		Persentase bauran Energi Baru dan Terbarukan (EBT)	7,14
24	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	72



### BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2021 ini didasarkan kepada evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang telah ditetapkan sebelumnya serta telah berakhirnya pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2021, serta pencapaian sasaran strategis selama tahun 2021.

Pengukuran keberhasilan dengan tolak ukur akuntabilitas kinerja mengandung arti bahwa setiap akhir tahun anggaran dilakukan proses pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis pencapaian kinerja. Pengukuran Kinerja merupakan proses membandingkan target kinerja dengan realisasinya yang digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan/program/kebijakan sesuai dengan sasaran dan tugas yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah.

Penetapan target kinerja atas program dan kegiatan yang tercantum dalam APBD Tahun Anggaran 2021 telah ditetapkan pada saat pengajuan anggaran untuk kegiatan yang bersangkutan dalam formulir Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) berupa: *input, output, dan outcome*. Selanjutnya setelah APBD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2021 disetujui dan ditetapkan ditindaklanjuti dengan menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2021.



## A. EVALUASI KINERJA

Evaluasi kinerja ini dilakukan dengan menghitung pencapaian kinerja dengan cara membandingkan antara rencana kinerja dengan realisasi ditinjau dari aspek *input*, *output*, maupun *outcome*.

Evaluasi kinerja kegiatan yang dimaksud di dalam laporan ini adalah evaluasi secara internal/mandiri terhadap kinerja kegiatan Pemerintah Provinsi Bali, guna memberikan gambaran lebih lanjut tentang :

1. Efisiensi kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan.
2. Efektivitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan.
3. Pencapaian sasaran pada tahun berjalan.

Evaluasi dilakukan dengan cara membandingkan antara kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan. Namun perbandingan dengan pemerintah daerah lain ataupun dengan standar nasional maupun internasional, akan berusaha dilakukan, hal ini terkendala dari keterbatasan data yang dimiliki. Dalam evaluasi diuraikan mengenai hal-hal yang mendukung keberhasilan dan faktor-faktor yang menimbulkan kegagalan (hambatan), serta langkah perbaikan (solusi pemecahan masalah) yang akan dilakukan guna perbaikan di masa yang akan datang.

### 1. Efisiensi Kegiatan

Efisiensi kegiatan adalah kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan *input* yang lebih sedikit tetapi dapat menghasilkan *output* yang sama, atau *input* yang sama dapat menghasilkan *output* yang lebih besar. Fokus perhatian dalam pengukuran efisiensi adalah indikator *input* dan *output* dari suatu kegiatan. Angka capaian efisiensi diperoleh dengan membandingkan capaian *output* dengan capaian *input*. Angka capaian efisiensi tersebut kemudian dibandingkan dengan standar efisiensi. Dalam laporan ini standar efisiensi yang dipakai adalah angka capaian efisiensi menurut rencana/target, yaitu bila angka capaian efisiensi sama atau lebih besar dari standar efisiensi, maka kegiatan yang bersangkutan dianggap efisien. Sebaliknya bila angka capaian efisiensi lebih kecil dari standar efisiensi, maka kegiatan tersebut dianggap tidak efisien.



Tingkat efisiensi pencapaian sasaran secara umum adalah termasuk kategori efisien. Namun ada beberapa kegiatan yang belum efisien, ketidak efisienan kegiatan-kegiatan tersebut antara lain disebabkan antara lain:

- Kelemahan dalam penetapan target pada indikator output, yang terlalu tinggi.
- Anggaran tersedia sesuai kebutuhan, dan realiasi biaya administrasi tetap dikeluarkan namun realisasi fisik kegiatan masih kurang dari yang ditargetkan.
- Kegiatan tidak optimal terealisasi karena pengesahan DPA perubahan baru turun pada bulan Nopember 2021.
- Pembatalan pembangunan fisik.
- Gagal tender dan tender ulang.

Untuk kegiatan-kegiatan yang belum efisien ini, akan dilakukan evaluasi yang lebih mendalam, sehingga kegiatan pada tahun berikutnya dapat lebih efisien, antara lain :

- Percepatan proses pengadaan barang/jasa di Biro Pengadaan Barang Jasa maupun Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Bali.
- Menyusun rencana kerja kegiatan Tahun Anggaran 2021 baik itu bulanan, triwulan, semesteran maupun tahunan yang terintegrasi sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan anggaran kas Tahun Anggaran 2021.
- Mencermati kembali Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan anggaran kas Tahun 2021, bila terdapat kesalahan baik substansi kegiatan maupun kode rekening agar segera direvisi.



## 2. Efektivitas Kegiatan

Efektivitas kegiatan diartikan sebagai “tingkat kemampuan suatu kegiatan untuk mewujudkan hasil yang diinginkan”. Pengukuran efektivitas kegiatan difokuskan pada capaian indikator *outcome* dari kegiatan tersebut.

Efektivitas kegiatan di bagi atas dua macam, yaitu:

(a) Efektivitas individual kegiatan;

Efektivitas individual kegiatan adalah kemampuan suatu kegiatan mencapai target *outcome/benefit/impact* yang telah ditetapkan untuk kegiatan yang bersangkutan.

(b) Efektivitas terkait sasaran.

Sedangkan efektivitas terkait sasaran merupakan kemampuan kegiatan bersama-sama dengan kegiatan lain untuk mewujudkan pencapaian sasaran strategisnya.

### 2.1) Kegiatan Yang Efektif

Suatu kegiatan dikategorikan efektif bila mampu mencapai angka rata-rata *outcome* minimal 100 persen. Faktor-faktor pendukung yang dominan sehingga kegiatan-kegiatan tersebut dapat terlaksana secara efektif, antara lain adalah tersedianya dana dalam jumlah yang cukup untuk melaksanakan kegiatan serta tingginya komitmen para pelaksana/penanggungjawab kegiatan untuk menghasilkan yang terbaik. Namun perbaikan-perbaikan masih perlu terus dilakukan, antara lain melalui penyempurnaan kualitas indikator kinerja dan peningkatan validitas data realisasi kinerja.

### 2.2) Kegiatan Yang Kurang Efektif

Kegiatan dinyatakan kurang efektif apabila capaian rata-rata indikator *outcome*-nya di bawah 100 persen. Kegiatan yang kurang/tidak efektif antara lain disebabkan oleh faktor eksternal yang *uncontrolable*, lemahnya kemampuan SDM pelaksana/penanggungjawab kegiatan, dan lemahnya pembinaan dari atasan langsung. Bagi SDM yang tidak mempunyai kemampuan dalam pengelola kegiatan, akan dilakukan



pembinaan/peningkatan pengetahuan/ketrampilan personil melalui kegiatan pendidikan/pelatihan, mengingat Pemerintah Provinsi Bali memandang bahwa sumber daya manusia merupakan salah satu aset penting yang harus ditingkatkan dan dimanfaatkan secara optimal untuk mencapai misinya. Sedangkan kegiatan-kegiatan yang bersangkutan akan dievaluasi secara lebih mendalam mengenai kelangsungannya. Di samping itu, Pemerintah Provinsi Bali akan melakukan langkah-langkah penyempurnaan, antara lain berupa penyempurnaan indikator kinerja, validitas data kinerja, peningkatan kualitas pengendalian dan monitoring, serta peningkatan kemampuan/kualitas atasan langsung dari pelaksana/penanggungjawab kegiatan.

### **2.3) Kegiatan Yang Belum Dapat Diukur Efektivitasnya**

Kegiatan yang belum dapat diukur efektivitasnya adalah kegiatan yang belum dirumuskan indikator kinerja outcome-nya. Selama tahun 2021, tidak terdapat terdapat kegiatan yang termasuk di dalam katagori ini.

Jadi tidak terdapat hambatan dalam penentuan indikator kinerja, hal ini menunjukkan kemampuan pengelola kegiatan sudah memadai dalam merumuskan indikator kinerja kegiatan sesuai pedoman yang berlaku. Pada tahun berikutnya, akan lebih ditingkatkan pengelola kegiatan untuk lebih mampu merumuskan indikator kinerja kegiatan yang dilaksanakannya.

## **B. ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Bali (LKjIP) Tahun 2021 memuat data dan informasi yang relevan dengan kebutuhan bagi pembuat keputusan agar dapat menginterpretasikan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, faktor-faktor yang menjadi permasalahan dan solusi pemecahan masalah secara lebih luas dan mendalam. Untuk itu diperlukan analisis terhadap hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran.

Analisis atas pencapaian sasaran strategis dari indikator kinerja utama selama Tahun Anggaran 2021, sesuai dengan perjanjian kinerja yang ditetapkan oleh Gubernur Bali berupa dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Bali,



Indikator Kinerja Utama dan Rencana Kinerja Pemerintah Daerah tentang Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Bali Tahun 2021 dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil.

### **1. Capaian Indikator Makro**

Tujuan pembangunan Provinsi Bali telah ditetapkan dan dituangkan dalam pernyataan visi dan misi. Hal ini memberikan kejelasan bahwa arah pembangunan Provinsi Bali telah disusun dalam suatu kebijakan yang bertahap, terstruktur dan berkesinambungan. Oleh karenanya, kebijakan yang telah ditetapkan dalam kerangka kinerja pembangunan daerah harus dapat menginformasikan sejauhmana kebijakan tersebut dalam mendukung tujuan pembangunan itu sendiri.

Adapun representasi ketercapaian tujuan pembangunan daerah tersebut dituangkan dalam indikator makro pembangunan daerah, yang akhirnya bermuara terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Atas dasar telah ditetapkannya indikator tersebut, maka kinerja pembangunan daerah dapat diukur, melalui informasi gambaran ketercapaian dan permasalahan yang terjadi dari setiap indikator makro. Tetapi persoalan yang perlu dicermati bersama adalah ketercapaian setiap indikator makro tersebut merupakan akumulasi dari peran serta seluruh stakeholder pembangunan yang meliputi : Pemerintah, Swasta dan, Masyarakat.

Oleh karena itu dalam menyikapi kinerja kebijakan pemerintah dalam konstelasi pencapaian indikator makro, perlu diterjemahkan terlebih dahulu kerangka pikir kontribusi kebijakan dan pelaku terhadap capaian indikator makro tersebut. Sehingga gambaran pencapaian indikator makro merupakan hasil kinerja dari seluruh pelaku pembangunan, dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 3.1 Perbandingan Capaian/Realisasi Indikator Makro Provinsi Bali Tahun 2020 s.d. Tahun 2021.

NO	Indikator kinerja	Capaian Tahun 2020	2021			Target akhir tahun renstra 2023	Capaian s/d 2021 trhdp 2023 (%)
			Target	Realisasi	Capaian %		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Jumlah Penduduk	4,32 juta	4,42 juta	4,32 juta	97,73	4,5 juta	96
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	-9.31	6,8	4,52	66,47	7,2	62,77
3	PDRB Perkapita (ADHK)	32 Juta	40 juta	36 juta	90	44 juta	81,81
4	PDRB Perkapita Nominal (ADHB)	51 juta	59 juta	51 Juta	86,44	66 juta	77,27
5	Inflasi	0,62	3,00	1,09	275	3,00	275
6	Tingkat Kemiskinan (%)	4,45	2,95	4,71	62,63	1,00	21,23
7	Jumlah Penduduk Miskin	196,92	120	201.97	59,70	42,00	20,89
8	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,63	1,07	5,37	19,92	0,90	16,75
9	Gini Ratio	0,36	0,30	0,37	81,01	0,25	67,56
10	IPM	75,50	75,61	75,69	100,10	80	94,61
11	Investasi	7,63	22,50	21.15	94	28,10	75,26
12	Jumlah Ekspor	US\$ 41	626	110	17,57	684,662	16,08

Sumber : Badan Pusat Statistik & Perangkat Daerah Prov.Bali, 2021 (data diolah B.organisasi Setda Prov.Bali 2022)

## 1.1 Jumlah Penduduk Provinsi Bali

Dengan luas daratan Provinsi Bali sebesar 5.780,06 kilometer persegi, maka kepadatan penduduk Bali sebanyak 747 jiwa per kilometer persegi. Angka ini meningkat dari hasil Sensus Penduduk 2000 yang mencatat kepadatan penduduk Bali sebanyak 544 jiwa per kilometer persegi dan hasil Sensus Penduduk Tahun 2010 yang mencapai 673 jiwa per kilometer persegi.

Penduduk di Provinsi Bali tersebar pada 9 kabupaten/kota, Kabupaten Buleleng merupakan daerah dengan penduduk terbanyak di Bali dengan jumlah 791.813 jiwa atau sebesar 18,34 persen dari penduduk Bali. Kota Denpasar merupakan daerah dengan penduduk terbanyak kedua dengan jumlah penduduk sebanyak 725.314 jiwa atau sebesar 16,80 persen. Kabupaten Badung, Gianyar, Karangasem, dan Tabanan merupakan kabupaten yang persentase sebaran penduduknya terhadap Bali di atas 10 persen. Kabupaten Jembrana, Bangli, dan Klungkung persentase sebaran penduduknya di bawah 8 persen. Kabupaten Klungkung merupakan kabupaten dengan penduduk paling sedikit dengan jumlah penduduk sebanyak 206.925 jiwa atau 4,79 persen dari total jumlah penduduk Bali.

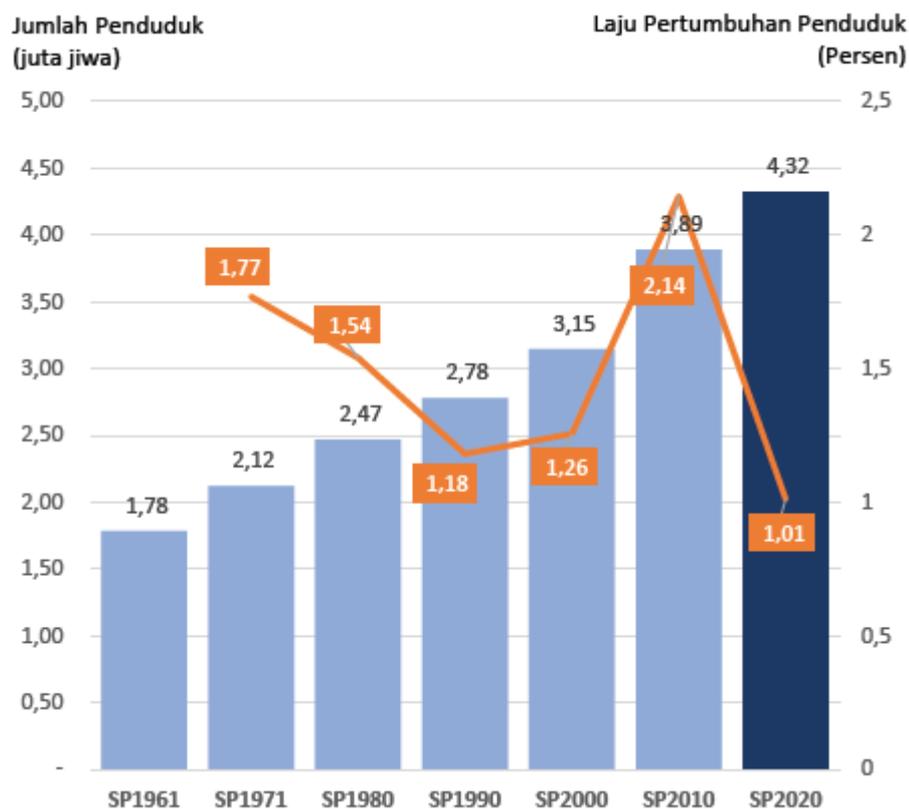
### Gambar 3.1 Peta Jumlah Penduduk Provinsi Bali Tahun 2021



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Bali Tahun 2021

Sensus Penduduk Tahun 2020 mencatat penduduk Provinsi Bali pada bulan September 2020 sebanyak 4,32 juta jiwa. Dibandingkan dengan hasil sensus sebelumnya, jumlah penduduk Provinsi Bali terus mengalami peningkatan. Dalam jangka waktu sepuluh tahun sejak tahun 2010, jumlah penduduk Bali mengalami penambahan sekitar 426,65 ribu jiwa atau rata-rata sebanyak 42,66 ribu setiap tahun. Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir (2010-2020), rata-rata laju pertumbuhan penduduk Bali sebesar 1,01 persen per tahun. Terjadi penurunan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,13 poin jika dibandingkan dengan periode 2000-2010 yang sebesar 2,14 persen per tahun. Selengkapnya dapat dilihat pada Grafik 3.1.

### 3.1 Grafik Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Bali, 1961-2020



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Bali Tahun 2021



Dari 4,32 juta penduduk Bali sebesar 87,73 persen atau sekitar 3,79 juta penduduk berdomisili sesuai Kartu Keluarga (KK). Sementara sebesar 12,27 persen atau sekitar 0,53 juta penduduk lainnya berdomisili tidak sesuai KK. Jumlah ini merupakan indikasi adanya penduduk yang bermigrasi dari wilayah tempat tinggal sebelumnya karena sekarang sudah tidak tinggal pada alamat yang tertera di KK lagi.

Struktur penduduk dapat menjadi salah satu modal pembangunan ketika jumlah penduduk usia produktif sangat besar. Hasil Sensus Penduduk Tahun 2020 mencatat mayoritas penduduk Bali didominasi oleh generasi Z dan X. Proporsi generasi Z sebesar 26,10 persen dan generasi X sebesar 24,50 persen dari total populasi penduduk Bali. Kedua generasi ini termasuk dalam usia produktif yang dapat menjadi peluang untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi.

Dari sisi demografi, seluruh Generasi X dan Milenial merupakan penduduk yang berada pada kelompok usia produktif pada tahun 2020. Sedangkan Generasi Z terdiri dari penduduk usia belum produktif dan produktif. Sekitar 7 tahun lagi, seluruh Generasi Z akan berada pada kelompok penduduk usia produktif. Hal ini merupakan peluang dan tantangan bagi Bali, baik di masa sekarang maupun masa depan, karena generasi inilah yang berpotensi menjadi aktor dalam pembangunan yang akan menentukan masa depan Indonesia khususnya Bali.

Persentase penduduk usia produktif (15-64 tahun) terus meningkat sejak tahun 1980. Pada tahun 1980 proporsi penduduk usia produktif adalah sebesar 56,31 persen dari total populasi dan meningkat menjadi 70,96 persen di tahun 2020. Perbedaan yang tajam antara persentase penduduk usia produktif dan non produktif (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas) terlihat semakin tajam di tahun 2020. Hal ini mencerminkan bahwa Bali masih berada dalam masa bonus demografi karena sebesar 70,96 persen penduduknya masih berada di usia produktif.

## 1.2 Laju Perekonomian Provinsi Bali



Gambar 3.2 Perekonomian Povinsi Bali

Perekonomian Bali pada tahun 2021 yang diukur berdasarkan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) atas dasar harga berlaku (ADHB) tercatat sebesar Rp219,80 triliun. Atau jika diukur atas dasar harga konstan (ADHK) tahun 2010, PDRB Bali tersebut tercatat sebesar Rp 143,87 triliun. Peningkatan tersebut menyebabkan ekonomi Bali pada

Tahun 2021 tumbuh 4,52. Terdapat dua momentum yang di duga mempengaruhi peningkatan aktivitas ekonomi di Bali selama 2021. Pertama, pelonggaran pelaksanaan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) selama 2021 seiring dengan penurunan kasus harian positif Covid-19, telah mampu memberikan ekosistem usaha yang lebih segar dibandingkan sebelumnya. Momentum kedua adalah adanya liburan Natal dan Tahun Baru (Nataru) serta sejumlah agenda kegiatan besar berskala internasional dan nasional yang berlangsung selama 2021. Dengan demikian, perekonomian Bali mampu tumbuh cukup baik).

### Grafik 3.2 Pertumbuhan Perekonomian Bali Selama Tahun 2021



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Bali Tahun 2021

Tiga pertumbuhan tertinggi pada triwulan IV-2021 tercatat pada lapangan usaha Kategori C (Industri Pengolahan) yang tercatat tumbuh sebesar 17,71 persen, diikuti Kategori D (Pengadaan Listrik dan Gas) yang tumbuh sebesar 13,55 persen, dan Kategori I (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum) yang tumbuh sebesar 7,21 persen.

Aktivitas pada lapangan usaha Kategori C (Industri Pengolahan) selama triwulan IV-2021 mengalami peningkatan yang signifikan. Tendensi peningkatan tersebut dapat terlihat berdasarkan indikator konsumsi listrik pada segmen pelanggan industri yang mengalami peningkatan sekitar 1,31 persen. Pada triwulan III-2021 diberlakukan kebijakan PPKM darurat yang menekan berbagai aktivitas masyarakat baik aktivitas ekonomi maupun upacara adat di Bali.

Kemudian, pada triwulan IV-2021, penerapan kebijakan PPKM yang dilonggarkan menyebabkan aktivitas masyarakat yang sebelumnya tertunda, akhirnya direalisasikan pada triwulan IV-2021. Selain peningkatan permintaan domestik, adanya momen libur Nataru juga membawa peningkatan permintaan wisatawan untuk produk-produk hasil industri seperti produk kerajinan, tekstil dan



pakaian serta olahan makanan dan minuman yang biasa digunakan sebagai cinderamata. Tidak hanya itu, permintaan akan produk hasil industri dari pasar global juga membaik selama triwulan IV-2021 yang tercermin pada indikator ekspor luar negeri untuk produk hasil industri pengolahan yang tercatat mengalami peningkatan sekitar 29,69 persen dibandingkan triwulan sebelumnya.

Pertumbuhan tertinggi berikutnya tercatat pada lapangan usaha Kategori D (Pengadaan Listrik dan Gas). Seperti yang telah disinggung sebelumnya, konsumsi listrik pada segmen pelanggan industri tercatat mengalami peningkatan secara. Tidak hanya itu, konsumsi listrik pada segmen pelanggan lainnya juga turut mengalami peningkatan secara *q-to-q*. Berdasarkan data PLN Distribusi Bali, pada triwulan IV 2021 secara total tercatat peningkatan kwh jual sekitar 11,39 persen dibandingkan triwulan III 2021. Peningkatan terbesar tercatat segmen pelanggan bisnis sebesar 20,22 persen dan pelanggan rumah tangga sebesar 6,64 persen. Hal tersebut kiranya mengkonfirmasi peningkatan aktivitas masyarakat yang terjadi selama triwulan IV-2021 dengan adanya pelonggaran pemberlakuan kebijakan PPKM di Bali.

Nilai tambah yang dihasilkan dari aktivitas Kategori I (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum) tercipta dari aktivitas usaha perhotelan dan restoran/rumah makan di Bali. Perayaan libur Nataru yang bisa dilaksanakan di tengah penerapan PPKM mendorong peningkatan kunjungan wisatawan ke Bali. Di samping itu, selama triwulan IV-2021 juga berlangsung sejumlah agenda kegiatan berskala internasional seperti: *International Badminton Festival 2021*, kunjungan delegasi dalam rangka persiapan G-20 dan *ASEAN Summit 2023*, serta agenda kegiatan rapat koordinasi dan kunjungan kerja kementerian/lembaga. Data kunjungan wisatawan baik wisatawan domestik (*wisdom*) dan wisatawan mancanegara (*wisman*) menunjukkan adanya peningkatan pada triwulan IV-2021 dibandingkan triwulan sebelumnya.

Dinas Pariwisata Provinsi Bali mencatat kunjungan *wisdom* ke Bali selama triwulan IV-2021, mencapai 1,6 juta kunjungan, atau meningkat sebesar 6,49 persen. Lebih lanjut, peningkatan jumlah kunjungan wisatawan tersebut



berpengaruh pada peningkatan permintaan terhadap usaha perhotelan dan restoran/rumah makan di Bali. Rata-rata tingkat penghunian kamar (TPK) hotel berbintang di Bali pada triwulan IV-2021 berada pada kisaran 22,97 persen, meningkat dibandingkan rata-rata TPK triwulan sebelumnya yang berada pada kisaran 6,74 persen.

Selain ketiga kategori lapangan usaha tersebut, pertumbuhan positif juga tercatat pada sebelas kategori lapangan usaha lainnya. Dari 17 kategori lapangan usaha, hanya tiga kategori yang tercatat mengalami pertumbuhan negatif atau kontraksi yaitu: Kategori E (Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang), Kategori F (Konstruksi), dan Kategori K (Jasa Keuangan dan Asuransi). Lapangan usaha E (Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang) tercatat kontraksi sedalam 0,01 persen secara *q-to-q*. Berdasarkan data PDAM dari 9 kabupaten/kota di Bali, secara total tercatat penurunan volume distribusi air bersih pada kisaran di bawah satu persen. Pertumbuhan negatif sedalam 0,10 persen pada lapangan usaha Kategori F (Konstruksi) selama triwulan IV-2021 disebabkan realisasi pengerjaan proyekproyek konstruksi yang lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya.

Berdasarkan data realisasi pengadaan semen di Bali tercatat adanya penurunan sedalam 10,19 persen. Hal tersebut mengkonfirmasi penurunan aktivitas konstruksi yang berlangsung selamatriwulan IV-2021. Selanjutnya, kontraksi pada lapangan usaha Kategori K (Jasa Keuangan dan Asuransi) yang tercatat minus 2,87 persen dipengaruhi oleh penurunan penyaluran kredit dan pembiayaan melalui lembaga perantara keuangan dan lembaga keuangan lainnya serta penurunan pada aktivitas asuransi dan jasa penunjang keuangan lainnya.

### **Pertumbuhan Ekonomi Bali Tahun 2021 terhadap Tahun 2020**

Ekonomi Bali pada Tahun 2021 jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya tercatat tumbuh tipis sebesar 0,51 persen. Apabila dibandingkan dengan kondisi pada Tahun 2020, aktivitas masyarakat selama pandemi Covid-19 berlangsung dalam suasana tatanan era baru (*new normal*) dan



tingkat rata-rata kasus harian positif Covid-19 berada pada angka di bawah 100 kasus. Sementara kondisi pada Tahun 2021, aktivitas masyarakat berlangsung dalam penerapan kebijakan PPKM dan tingkat rata-rata kasus harian positif Covid-19 yang lebih rendah yakni di kisaran 20 kasus. Namun demikian, kondisi yang tidak jauh berbeda di antara kedua periode tersebut menyebabkan ekonomi Bali hanya mampu tumbuh.

Dari 17 kategori lapangan usaha penyusun PDRB, sebanyak 12 kategori mencatatkan pertumbuhan positif, sedangkan lima kategori lainnya mengalami kontraksi pada Tahun 2021. Pertumbuhan tertinggi tercatat pada lapangan usaha Kategori D (Pengadaan Listrik dan Gas) yaitu sebesar 10,62 persen, diikuti pertumbuhan pada Kategori C (Industri Pengolahan) yaitu sebesar 8,68 persen, dan pertumbuhan pada Kategori Q (Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial) yaitu sebesar 7,00 persen.

Peningkatan nilai tambah pada Kategori D (Pengadaan Listrik dan Gas) pada Tahun 2021 dibandingkan Tahun 2020 utamanya bersumber dari aktivitas ketenagalistrikan. Berdasarkan data PLN Distribusi Bali, volume kwh listrik terjual selama Tahun 2021 mengalami peningkatan pada kisaran 2,56 persen dibandingkan dengan Tahun 2020. Peningkatan utamanya bersumber dari peningkatan konsumsi listrik pada segmen pelanggan bisnis yang tercatat naik sebesar 9,82 persen. Peningkatan konsumsi listrik pada segmen tersebut kiranya juga dapat mengindikasikan adanya geliat peningkatan aktivitas ekonomi di Bali secara umum pada periode Tahun 2021 dibandingkan dengan Tahun 2020.

Aktivitas pada lapangan usaha Kategori C (Industri Pengolahan) selama Tahun 2021 juga turut tercatat mengalami peningkatan apabila dibandingkan triwulan yang sama tahun sebelumnya. Berbagai pameran dan festival kuliner, produk tekstil, serta produk industri lainnya yang terselenggara lebih banyak pada 2021 dibandingkan 2020 diduga mampu mengangkat nilai tambah yang tercipta pada lapangan usaha Kategori C (Industri Pengolahan) di tengah pandemi Covid-19 yang masih berlangsung. Dari sisi permintaan global terhadap produk hasil industri juga menunjukkan adanya peningkatan pada Tahun 2021 dibandingkan



Tahun 2020. Hal tersebut salah satunya tercermin pada indikator ekspor luar negeri untuk barang-barang hasil industri pengolahan yang tercatat mengalami peningkatan sekitar 26,61 persen.

### Permasalahan dan Solusi dalam memperbaiki kinerja di Tahun 2022

**Tabel 3.2 Perbandingan Capaian/Realisasi Pertumbuhan Ekonomi Bali Tahun 2020 s.d. Tahun 2021.**

NO	Indikator kinerja	Capaian Tahun 2020	2021			Target akhir tahun renstra 2023	Capaian s/d 2021 trhdp 2023 (%)
			Target	Realisasi	Capaian %		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	-9,31	6,8	4,52	66,47	7,2	62,77

Sumber : Biro Organisasi Setda Provinsi Bali Tahun 2022

Terlihat dari target yang tertuang pada RPJMD semesta berencana 2018 s.d 2023, pada tahun 2021 menargetkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali 6,8% terealisasi hanya 4,52% dengan capaian terhadap target sebesar 66,47%. Sedangkan apabila dibandingkan dengan akhir RPJMD di Tahun 2023 capaian terhadap 2021 sebesar 62,77%. bila di dilihat dari pertumbuhan perekonomian Provinsi Bali pada triwulan I-2021 sampai dengan triwulan IV-2021 atau sepanjang tahun 2021, perekonomian Bali masih tercatat mengakumulasi pertumbuhan negatif atau kontraksi sedalam 2,47 persen. Walaupun masih belum pulih, namun besaran kontraksi ekonomi tersebut tidak sedalam yang terjadi pada tahun 2020 yang tercatat sedalam -9,31 persen.

Aktivitas pariwisata yang selama ini menjadi penopang perekonomian Bali pada tahun 2021 masih berada pada tingkatan kondisi yang lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun 2020. Hal tersebut tercermin pada tiga kontraksi terdalam pada tahun 2021 yang tercatat pada Kategori H (Transportasi dan Pergudangan) dengan kontraksi sedalam 17,50 persen, Kategori I (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum) terkontraksi 10,20 persen, dan Kategori D (Pengadaan Listrik dan Gas) terkontraksi 5,08 persen.



Walaupun Demikian, ditengah pandemi Covid-19, potensi Bali sebagai destinasi utama pariwisata masih sangat tinggi. Secara internasional, Bali dinobatkan Tripadvisor sebagai “*The Most Popular Destination 2021*” (mengalahkan London). Secara domestik, hasil pengolahan *big data google trend* menunjukkan pencarian Bali lebih populer dibanding destinasi domestik lainnya di Indonesia.

Langkah kongkrit yang akan dilakukan Pemerintah Provinsi Bali dalam memacu pertumbuhan perekonomian di Tahun 2022 diantaranya Mempercepat pemberian vaksin kepada penduduk di Provinsi Bali, mengundang perwakilan Negara yang banyak berkunjung ke Bali seperti Australia, China, Jepang dan lain lain dalam rangka mempromosikan kembali pariwisata bali, mempersiapkan dengan baik acara G-20 yang dilaksanakan Provinsi Bali dan mengadakan event intenational maupun Nasional, menekan penyebaran covid di provinsi bali dengan sistem pemantauan dari Desa Adat di Provinsi Bali;

### **1.3 PDRB Pekapita (ADHK) dan PDRB Perkapita Nominal (ADHB)**

PDRB merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan; semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak tak langsung dikurangi subsidi).

PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajian ini dikelompokkan menjadi 9 lapangan usaha (sektor) yaitu :

1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan
2. Pertambangan dan Penggalian
3. Industri Pengolahan



4. Listrik, Gas dan Air Bersih
5. Konstruksi
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran
7. Pengangkutan dan Komunikasi
8. Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan
9. Jasa-jasa termasuk jasa pelayanan pemerintah. Setiap sektor tersebut dirinci lagi menjadi sub-sub sektor.

Perekonomian Bali pada tahun 2021 yang diukur berdasarkan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) atas dasar harga berlaku (ADHB) tercatat sebesar Rp 219,80 triliun. Atau jika diukur atas dasar harga konstan (ADHK) tahun 2010, PDRB Bali tersebut tercatat sebesar Rp 143,87 triliun.

Struktur PDRB Bali pada tahun 2021 masih didominasi oleh Kategori I (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum) dengan besaran nilai tambah Rp. 36,62 triliun, atau 16,66 persen dari total PDRB Bali. Kontributor terbesar kedua disumbangkan oleh Kategori A (Pertanian, Kehutanan dan Perikanan) dengan kontribusi sebesar 15,71 persen, kemudian disusul oleh Kategori F (Konstruksi) dengan kontribusi sebesar 11,00 persen.

Bila dilihat berdasarkan penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Bali sepanjang tahun 2021, pertumbuhan ekonomi Bali dengan kontraksi sedalam 2,47 persen bersumber dari Kategori I (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum) dengan sumbangan minus 1,65, persen, Kategori H (Transportasi dan Pergudangan) dengan sumbangan minus 0,96 persen, dan Kategori K (Jasa Keuangan dan Asuransi) dengan sumbangan minus 0,14 persen. Sedangkan gabungan dari 14 kategori lainnya tercatat memberi sumbangan pertumbuhan positif sebesar 0,28 persen terhadap pertumbuhan ekonomi Bali tahun 2021.

### 3.3 Grafik Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha Tahun 2020 dan 2021



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Bali Tahun 2021 (Diolah B.Organisasi)

#### Perbandingan Capaian PDRB Tahun 2021 dengan Tahun 2020

Seperti disebutkan sebelumnya, pada triwulan IV-2020 indikator PDRB Provinsi Bali Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) tercatat senilai Rp. 55,61 triliun. Mengalami peningkatan dibandingkan capaian triwulan III-2020 yang sebesar Rp. 54,81 triliun. Sementara berdasarkan Atas Dasar Harga Konstan tahun 2010 (ADHK), PDPDRB Bali menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku triwulan IV-2021 tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Perekonomian Bali masih didominasi oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) yang mencakup lebih dari separuh PDRB Bali yaitu sebesar 55,19 persen; diikuti oleh komponen PMTB/Investasi sebesar 29,12 persen; Komponen PK-P sebesar 15,64 persen; Komponen Ekspor Luar Negeri sebesar 3,57 persen; Komponen PK-LNPRT sebesar 1,49 persen; dan Komponen Perubahan Inventori sebesar 0,23 persen. Sementara itu, Komponen Impor Luar Negeri sebagai faktor pengurang dalam PDRB memiliki peran sebesar 0,36 persen. Sedangkan Net Ekspor Antar



Daerah tercatat menyumbang dalam bentuk net impor yakni minus 4,88 persen. RB Bali triwulan IV-2020 tercatat sebesar RP. 36,74 triliun. Lebih tinggi dibandingkan capaian triwulan III-2020 yang tercatat Rp. 36,39 triliun. Dari sisi pengeluaran, pada PDRB Provinsi Bali triwulan IV-2020, menempatkan komponen “pengeluaran konsumsi rumah tangga” sebagai yang masih menjadi pengguna terbesar PDRB Bali, meski kali ini menunjukkan sedikit penurunan.

Atas dasar harga berlaku (ADHB) penurunannya tercatat dari Rp. 29,83 triliun (triwulan III-2020) menjadi Rp. 29,70 triliun (triwulan IV-2020). Sedangkan dalam pengukuran ADHK (atas dasar harga konstan) 2010, penurunannya adalah dari Rp. 20,39 triliun menjadi Rp 20,25 triliun. Peningkatan aktifitas transportasi udara domestik selama triwulan IV-2021 diduga merupakan indikator mulai kembalinya kunjungan wisatawan domestik ke Bali. Keberangkatan penumpang domestik pada triwulan IV-2021 tercatat meningkat sekitar 80,85 persen jika dibandingkan triwulan yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan aktifitas ini diduga telah mendorong bergerakinya aktifitas ekonomi di Bali terkait wisatawan domestik. Selain itu, adanya pelonggaran penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di wilayah Provinsi Bali diduga juga telah memberi ruang lebih luas pada masyarakat dan dunia usaha meski dengan penerapan prokes yang ketat.



**Tabel 3.3**  
**Nilai PDRB Provinsi Bali Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan 2010 Triwulan IV-2020, Triwulan III-2021 dan Triwulan IV-2021 (triliun rupiah)**

Lapangan Usaha	Harga Berlaku (ADHB)			Harga Konstan 2010 (ADHK)		
	Trw IV-2020	Trw III-2021	Trw IV-2021	Trw IV-2020	Trw III-2021	Trw IV-2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	8,69	8,63	9,02	5,45	5,31	5,50
B. Pertambangan dan Penggalian	0,52	0,55	0,56	0,33	0,35	0,35
C. Industri Pengolahan	3,70	3,48	4,14	2,48	2,29	2,69
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0,12	0,11	0,13	0,07	0,07	0,07
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,10	0,11	0,11	0,08	0,08	0,08
F. Konstruksi	5,98	6,14	6,19	3,99	4,01	4,01
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,01	5,07	5,30	3,50	3,49	3,63
H. Transportasi dan Pergudangan	3,45	2,83	3,03	1,83	1,54	1,63
I. Penyediaan Akomodasi dan Makanan dan Minuman	9,75	8,63	9,39	5,77	5,06	5,43
J. Informasi dan Komunikasi	3,65	3,70	3,78	3,16	3,16	3,22
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	2,29	2,44	2,44	1,55	1,56	1,52
L. Real Estat	2,49	2,52	2,59	1,88	1,88	1,92
M,N. Jasa Perusahaan	0,65	0,61	0,65	0,44	0,40	0,43
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,26	3,21	3,42	2,24	2,18	2,31
P. Jasa Pendidikan	3,42	3,40	3,57	2,30	2,27	2,37
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,47	1,55	1,61	1,02	1,06	1,09
R,S,T,U. Jasa Lainnya	0,99	0,93	1,01	0,65	0,60	0,65
<b>Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)</b>	<b>55,53</b>	<b>53,93</b>	<b>56,95</b>	<b>36,72</b>	<b>35,31</b>	<b>36,91</b>

Sumber : BPS Provinsi Bali, Tahun 2021



**Tabel 3.4**  
**Nilai PDRB Bali Menurut Komponen Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan (2010=100) Triwulan IV-2020, Triwulan III-2021 dan Triwulan IV-2021 (Triliun Rupiah)**

Komponen	Harga Berlaku (ADHB)			Harga Konstan 2010 (ADHK)		
	Trw IV-2020	Trw III-2021	Trw IV-2021	Trw IV-2020	Trw III-2021	Trw IV-2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	29,70	30,04	31,43	20,25	20,17	21,05
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	0,76	0,78	0,85	0,50	0,51	0,55
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	9,43	7,36	8,91	5,52	4,40	5,21
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	16,84	17,13	16,58	11,52	11,28	10,84
5. Perubahan Inventori	0,12	0,12	0,13	0,06	0,07	0,07
6. Ekspor Luar Negeri	1,70	1,56	2,03	1,00	0,94	1,20
7. Impor Luar Negeri <sup>1)</sup>	0,34	0,16	0,21	0,23	0,10	0,13
8. Net Ekspor Antar Daerah	-2,69	-2,90	-2,78	-1,90	-1,94	-1,86
<b>Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)</b>	<b>55,53</b>	<b>53,93</b>	<b>56,95</b>	<b>36,72</b>	<b>35,31</b>	<b>36,91</b>

Sumber : BPS Provinsi Bali, Tahun 2021 (data diolah B. Organisasi)

### Kesimpulan dan langkah Percepatan Kinerja di Tahun 2022

**Tabel 3.5 Perbandingan Capaian/Realisasi PDRB Bali Tahun 2020 s.d. Tahun 2021.**

NO	Indikator kinerja	Capaian Tahun 2020	2021			Target akhir tahun renstra 2023	Capaian s/d 2021 trhdp 2023 (%)
			Target	Realisasi	Capaian %		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PDRB Perkapita (ADHK)	32 Juta	40 juta	36 juta	90	44 juta	81,81
2	PDRB Perkapita Nominal (ADHB)	51 juta	59 juta	51 Juta	86,44	66 juta	77,27

Sumber : Biro Organisasi Setda Prov. Bali Tahun 2022

PDRB Perkapita (ADHK) yang ditargetkan tahun 2021 40 juta teralisasi diakhir tahun 36 juta per kapita, dengan capaian kinerja 90%, Capaian 2021 terhadap 2023 sebesar 81,81%. Guna meningkatkan kinerja ditahun 2022, pemerintah provinsi bali akan melaksanakan pemantauan terhadap kebutuhan



pokok masyarakat, sehingga stabilitas harga kebutuhan pokok di wilayah provinsi bali dapat terkendali, disamping itu langkah yang akan dipercepat pembangunan diberbagai infrastrukrur yang dikerjakan provinsi bali, serta menggenjod UMKM, kelompok tani dan nelayan di provinsi bali mengekspor produk mereka ke luar negeri.

#### **1.4 Laju Inflasi Bali**

Berdasarkan hasil pemantauan perkembangan harga barang dan jasa sepanjang November 2021 di Kota Denpasar tercatat inflasi setinggi 0,71 persen atau terjadi peningkatan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 104,79 (2018=100) pada Oktober 2021 menjadi 105,53 pada November 2021. Sementara itu, tingkat inflasi tahun kalender (November 2021 terhadap Desember 2020) tercatat setinggi 1,26 persen dan tingkat inflasi tahun ke tahun (November 2021 terhadap November 2020) tercatat setinggi 1,88 persen.

Inflasi yang tercatat di Kota Denpasar pada bulan November 2021 ditunjukkan oleh peningkatan indeks pada tujuh kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok IV (perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga) setinggi 3,76 persen; kelompok XI (perawatan pribadi dan jasa lainnya) setinggi 1,24 persen; kelompok VI (transportasi) setinggi 1,15 persen; kelompok I (makanan, minuman, dan tembakau) setinggi 0,90 persen; kelompok V (kesehatan) setinggi 0,03 persen; kelompok III (perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga) setinggi 0,02 persen; dan kelompok X (penyediaan makanan dan minuman/ restoran) setinggi 0,02 persen. Sementara itu, dua kelompok pengeluaran lainnya tercatat mengalami deflasi yaitu: kelompok VIII (rekreasi, olahraga, dan budaya) sedalam 0,07 persen dan kelompok II (pakaian dan alas kaki) sedalam 0,06 persen. Dua kelompok lainnya tercatat tidak mengalami perubahan indeks atau stagnan yaitu kelompok VII (informasi, komunikasi, dan jasa keuangan) dan kelompok IX (pendidikan).

Jika diurai menurut penyumbangya, inflasi Kota Denpasar bulan November 2021 yang setinggi 0,71 persen tercatat disumbang masing-masing oleh kelompok



IV (perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga) sebesar 0,2657 persen; kelompok I.

### 3.6 Tabel Tingkat Inflasi November 2021, Tahun Kalender 2021, dan Tahun ke Tahun Menurut Kelompok Pengeluaran Kota Denpasar

No.	Kelompok Pengeluaran	IHK November 2020	IHK Desember 2020	IHK November 2021	Tingkat Inflasi November 2021*)	Tingkat Inflasi Tahun Kalender 2021**)	Tingkat Inflasi Tahun ke Tahun***)	Andil Inflasi November 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Makanan, minuman, dan tembakau	100,70	102,44	104,23	0,90	1,75	3,51	0,2174
2.	Pakaian dan alas kaki	102,69	101,94	100,31	-0,06	-1,60	-2,32	-0,0028
3.	Perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar lainnya	103,08	103,08	102,97	0,02	-0,11	-0,11	0,0033
4.	Perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga	97,62	100,51	108,79	3,76	8,24	11,44	0,2657
5.	Kesehatan	103,94	104,06	104,73	0,03	0,64	0,76	0,0010
6.	Transportasi	100,78	101,21	102,60	1,15	1,37	1,81	0,1347
7.	Informasi, komunikasi, dan jasa keuangan	103,87	104,29	105,02	0,00	0,70	1,11	0,0000
8.	Rekreasi, olahraga, dan budaya	104,30	103,65	100,21	-0,07	-3,32	-3,92	-0,0013
9.	Pendidikan	110,90	110,90	110,16	0,00	-0,67	-0,67	0,0000
10.	Penyediaan makanan dan minuman/restoran	109,88	109,97	110,50	0,02	0,48	0,56	0,0020
11.	Perawatan pribadi dan jasa lainnya	109,86	109,45	112,77	1,24	3,03	2,65	0,0857
	<b>Umum</b>	<b>103,58</b>	<b>104,22</b>	<b>105,53</b>	<b>0,71</b>	<b>1,26</b>	<b>1,88</b>	<b>0,7100</b>

Sumber : BPS Provinsi Bali, Tahun 2021 (data diolah B. Organisasi)

### Perbandingan Inflasi Tahunan

Setelah Oktober lalu mencatat deflasi sedalam 0,23 persen maka sampai dengan November 2021 ini hitungan inflasi tahun kalender Kota Denpasar tercatat sebesar 1,26 persen. Hitungan tersebut diperoleh dari hasil membandingkan IHK bulan November 2021 dengan IHK bulan Desember 2020. Sementara itu, tingkat inflasi tahun ke tahun November 2021 tercatat sebesar 1,88 persen. Hasil tersebut diperoleh dari membandingkan IHK bulan November 2021 dengan IHK bulan November 2020. Dengan cara yang sama diperoleh hitungan inflasi tahun ke tahun bulan November tahun 2019 dan 2020 yang masing-masing sebesar 2,34 persen dan 0,72 persen.

Pada bulan November 2021, dari 90 kota amatan inflasi Nasional tercatat 84 kota mengalami inflasi dan 6 kota mengalami deflasi. Inflasi tertinggi tercatat di Kota Sintang (Kalimantan Barat) setinggi 2,01 persen, sedangkan inflasi terendah tercatat di Kota Bima (Nusa Tenggara Barat) dan Kota Pontianak (Kalimantan Barat) masing-masing setinggi 0,02 persen. Sementara itu, deflasi terdalam



tercatat di Kota Kotamobagu (Sulawesi Utara) sedalam 0,53 persen, sedangkan deflasi terdangkal tercatat di Kota Tual (Maluku) sedalam 0,16 persen. Jika diurutkan dari inflasi tertinggi, maka Kota Denpasar dengan inflasi 0,71 persen menempati urutan ke-12 dari 84 kota yang mengalami deflasi.



## 3.7 Tabel Tingkat Inflasi Kota di seluruh Indonesia Tahun 2021

No	Kota	IHK	Inflasi (%)	No	Kota	IHK	Inflasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(4)
1	Sintang	113,80	2,01	31	Yogyakarta	107,77	0,45
2	Ambon	108,93	1,14	32	Bulukumba	108,26	0,45
3	Tarakan	107,19	1,06	33	Padangsidempuan	108,30	0,44
4	Banda Aceh	107,68	0,87	34	Cirebon	104,64	0,42
5	Batam	106,61	0,86	35	Bukittinggi	106,63	0,40
6	Tanjung Pinang	105,26	0,85	36	Dki Jakarta	107,10	0,40
7	Lhokseumawe	108,07	0,82	37	Purwokerto	106,36	0,40
8	Bau-Bau	105,84	0,80	38	Pekanbaru	106,46	0,39
9	Pangkal Pinang	105,82	0,77	39	Surabaya	106,90	0,39
10	Pare-Pare	107,51	0,74	40	Tanjung Pandan	109,67	0,38
11	Gunungsitoli	107,76	0,71	41	Tanjung	108,89	0,38
12	<b>Denpasar</b>	<b>105,53</b>	<b>0,71</b>	42	Makassar	106,94	0,38
13	Padang	106,31	0,70	43	Dumai	107,84	0,36
14	Manokwari	110,20	0,68	44	Cilacap	105,35	0,36
15	Sumenep	106,90	0,65	45	Timika	108,06	0,35
16	Banjarmasin	108,54	0,62	46	Kotabaru	109,61	0,34
17	Bungo	107,21	0,60	47	Tembilahan	107,11	0,33
18	Kupang	104,44	0,60	48	Surakarta	106,55	0,33
19	Pematang Siantar	106,88	0,58	50	Semarang	106,85	0,33
20	Sukabumi	107,10	0,57	49	Mamuju	107,54	0,33
21	Palembang	106,10	0,56	51	Bekasi	109,18	0,32
22	Bandar Lampung	107,57	0,53	52	Sampit	109,65	0,32
23	Bengkulu	106,44	0,52	53	Kudus	105,79	0,31
24	Jambi	107,48	0,49	54	Jember	106,72	0,31
25	Meulaboh	110,49	0,48	55	Cilegon	108,71	0,30
26	Metro	108,15	0,48	56	Lubuklinggau	106,42	0,29
27	Maumere	106,50	0,48	57	Jayapura	103,89	0,29
28	Sibolga	107,97	0,47	58	Depok	107,98	0,28
29	Medan	105,46	0,46	59	Banyuwangi	104,93	0,28
30	Tegal	107,18	0,46	60	Balikpapan	104,96	0,27



No	Kota	IHK	Inflasi (%)	No	Kota	IHK	Inflasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(4)
61	Bogor	108,58	0,26	76	Bandung	106,95	0,14
62	Malang	105,08	0,26	77	Singaraja	106,92	0,12
63	Palangka Raya	106,78	0,26	78	Samarinda	105,74	0,09
64	Kediri	106,31	0,25	79	Watampone	105,54	0,09
65	Ternate	107,46	0,25	80	Singawang	106,17	0,08
66	Probolinggo	105,56	0,24	81	Mataram	105,14	0,05
67	Madiun	105,64	0,22	82	Manado	107,54	0,03
68	Luwuk	109,04	0,22	83	Bima	105,89	0,02
69	Palopo	106,89	0,22	84	Pontianak	107,06	0,02
70	Kendari	108,19	0,19	85	Tual	108,77	-0,16
71	Serang	109,02	0,18	86	Merauke	104,25	-0,17
72	Palu	108,58	0,18	87	Sorong	106,10	-0,30
73	Tasikmalaya	104,33	0,17	88	Waingapu	106,33	-0,34
74	Tangerang	106,21	0,17	89	Gorontalo	106,14	-0,36
75	Tanjung Selor	103,50	0,17	90	Kotamobagu	107,95	-0,53

Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2022 (Data Diolah B. Organisasi)

### Perbaikan Kinerja pada Tahun 2022 dan Upaya dilakukan di Tahun 2021

Dalam rangka pengendalian inflasi Provinsi Bali, TPID Provinsi Bali dan TPID Kabupaten/Kota di Bali terus meningkatkan koordinasi secara intensif namun dalam skala terbatas. Di tengah tekanan Pandemi COVID-19 yang masih berlanjut hingga Triwulan III 2021, kegiatan pemantauan harga yang biasanya dilakukan secara fisik oleh TPID mengalami pengurangan frekuensi seiring perpanjangan periode Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) hingga September 2021. Hal yang sama juga berlaku bagi kegiatan pasar murah atau sidak pasar selama periode PPKM.

Permasalahan pengendalian inflasi pada Triwulan III 2021 adalah kenaikan harga dari kelompok core inflation. Secara umum, kenaikan harga canang sari sejalan dengan tingginya frekuensi kegiatan upacara keagamaan sepanjang bulan September 2021, yang dipercaya merupakan bulan baik oleh masyarakat Bali.



Beberapa harga kebutuhan lainnya (seperti pipa, baju kaos berkerah pria, dan *hand body lotion*) juga tercatat mengalami peningkatan harga seiring dengan meningkatnya konsumsi masyarakat selama perayaan Hari Keagamaan. Meski demikian, penurunan harga di triwulan III 2021 pada komoditas cabai rawit, cabai merah, dan angkutan udara mampu menahan peningkatan harga lebih lanjut.

Dalam kerangka kebijakan pengendalian inflasi 4K, khususnya ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga dan kelancaran distribusi, TPID Kabupaten Bangli telah melakukan penandatanganan kesepakatan bersama dengan Pemkab. Tabanan dan Pemkab. Lombok Barat pada tanggal 22 September 2021. Komoditas yang menjadi lingkup dalam Kerjasama Antar Daerah (KAD) tersebut adalah komoditas pertanian, hewan ternak serta energi terbarukan. KAD ini merupakan upaya dari TPID di Provinsi Bali maupun TPID di Provinsi NTB dalam pengendalian inflasi daerah melalui kepastian ketersediaan pasokan bahan pangan sehingga dapat sehingga tercapai stabilitas harga pangan di Bali.

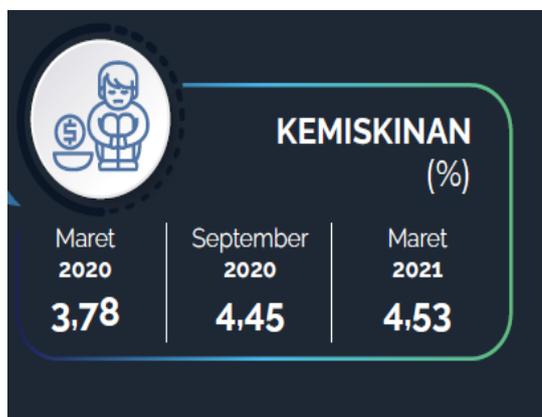
Pada tanggal 25 Agustus 2021 telah diselenggarakan Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian (Rakornas) Inflasi 2021 bersama Kementrian/Lembaga yang tergabung pada Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP). Adapun dalam rapat disampaikan penghargaan TPID Awards kepada provinsi dan kabupaten/kota yang dianggap berhasil dalam merealisasikan pengendalian inflasi di daerah selama tahun 2020. TPID Kabupaten Badung dan TPID Kabupaten Bangli masuk sebagai nominasi pemenang dalam kategori TPID Kab/Kota Non IHK Berprestasi Tahun 2020 wilayah Jawa-Bali. Program unggulan dari masing-masing TPID adalah Nelayan Go Digital, MATANABE (Masyarakat Desa Tanam Cabe) dan SIBERTANI (Siswa Belajar Bertani) untuk Kab. Badung. Sedangkan TPID Kab. Bangli memiliki program unggulan KELOR BANGLI (Kebijakan Telor Kabupaten Bangli) yaitu pemetaan peluang pasar dan perumusan kebijakan stabilisasi terkait harga telur melalui digitalisasi, program pasar gotong royong dan KAD.

Secara keseluruhan, inflasi Bali tahun 2022 diperkirakan akan meningkat dalam kisaran  $3\pm 1\%$  (yoy), lebih tinggi dibanding perkiraan inflasi Bali tahun 2021. Perkiraan inflasi tahun 2022 tersebut juga masih berada dalam rentang sasaran

inflasi Nasional. Peningkatan ini terjadi di seluruh kelompok barang, sebagai dampak perbaikan daya beli masyarakat seiring dengan perkiraan perbaikan lapangan usaha utama di Bali. Berdasarkan disagregasinya, meningkatnya tekanan inflasi tahun 2022 terutama bersumber dari seluruh kelompok yaitu *volatile food*, *administered price* dan *core inflation*.

### 3.2 Tingkat Kemiskinan Provinsi Bali dan

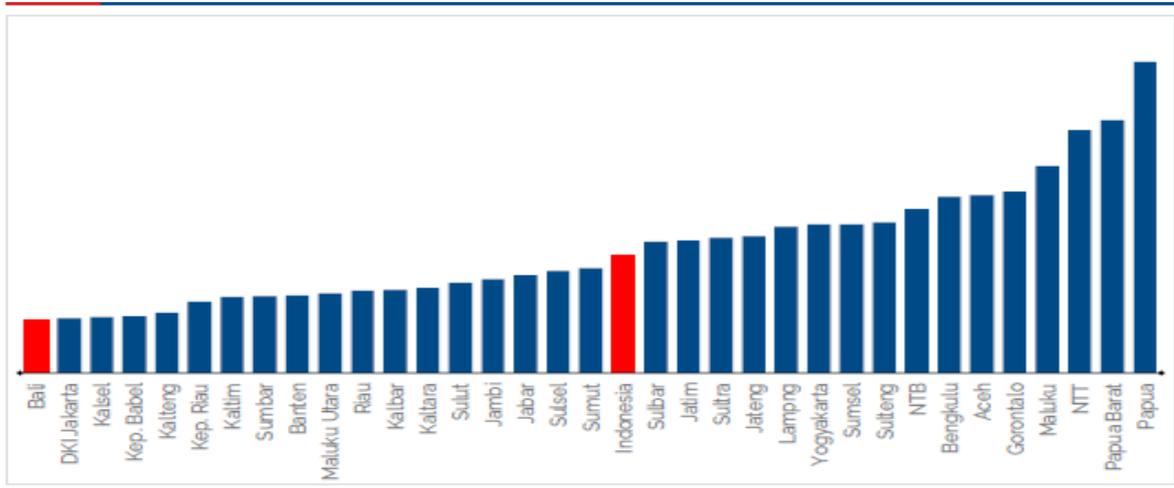
### 3.3 Jumlah Kemiskinan Provinsi Bali



Sejalan dengan masih terbatasnya pertumbuhan ekonomi Bali, tingkat kemiskinan masyarakat Bali pada Maret 2021 tercatat meningkat. Hal ini terkonfirmasi dari persentase penduduk miskin pada Maret 2021 yang tercatat sebesar 4,53%, atau

sejumlah 201,97 ribu orang, meningkat dibandingkan dengan periode September 2020 yang sebesar 4,45% (196,92 ribu orang) dan periode Maret 2020 yang sebesar 3,78% (165,19 ribu orang). Berdasarkan daerah tinggal, jumlah penduduk miskin, baik di daerah perkotaan maupun perdesaan, tercatat meningkat. Pada bulan Maret 2021, jumlah penduduk miskin di wilayah perkotaan tercatat sejumlah 129,58 ribu orang (4,12%), lebih tinggi dibanding periode September 2020 sejumlah 125,48 ribu orang (4,04%). Sementara itu, di wilayah perdesaan, jumlah penduduk miskin tercatat sejumlah 72,39 ribu orang (5,52%), yang juga meningkat dibandingkan dengan periode September 2020 dengan persentase penduduk miskin sebesar 5,40%. Dengan demikian, tingkat kemiskinan Maret 2021 merupakan yang tertinggi dalam 5 (lima) tahun terakhir. Namun demikian, dibandingkan provinsi lain, tingkat kemiskinan Bali terendah di antara 34 provinsi.

### 3.4 Grafik Tingkat Kemiskinan Seluruh Provinsi Tahun 2021



Sumber : BPS Provinsi Bali Tahun 2021 (Data diolah B.Organisasi)

### Perbandingan Capaian Kinerja Tingkat Kemiskinan Provinsi Bali Tahun 2021 s.d 2020

### 3.8 Perbandingan Capaian/Realisasi Tingkat Kemiskinan Bali Tahun 2020 s.d. Tahun 2021.

NO	Indikator kinerja	Capaian Tahun 2020	2021			Target akhir tahun renstra 2023	Capaian s/d 2021 trhdp 2023 (%)
			Target	Realisasi	Capaian %		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Tingkat Kemiskinan (%)	4,45	2,95	4,71	62,63	1,00	21,23
2	Jumlah Penduduk Miskin	196,92	120	201.97	59,70	42,00	20,89

Melihat realisasi target pada Tahun 2021 Tingkat kemiskinan Provinsi Bali meningkat dengan realisasi 4,71%, bila dirata-ratakan capaian provinsi Bali pada tahun 2021 dengan capaian 62,63%, capaian 2021 terhadap 2023 belum sepenuhnya baik yang teralisasi sebesar 21,23%.



Berdasarkan data Maret 2021, Indeks Kedalaman Kemiskinan Provinsi Bali tercatat sebesar 0,68, lebih tinggi dari data periode September 2020 sebesar 0,61. Kondisi ini menjelaskan bahwa rata-rata total pengeluaran penduduk di Bali (miskin dan nonmiskin) masih berada 0,68% di bawah garis kemiskinan (Rp452.221,00 per kapita per bulan). Kondisi ini sejalan dengan penurunan pendapatan masyarakat, tercermin antara lain dari penurunan NTP dan turunnya daya beli masyarakat sejalan dengan tingkat inflasi yang melambat. Sementara itu, Indeks Keparahan Kemiskinan pada periode Maret 2021 sedikit meningkat disbanding periode September 2020, yaitu dari 0,12 menjadi 0,15, menunjukkan bahwa ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin di Bali semakin besar.

Berdasarkan daerah tempat tinggal, indeks P1 pada Maret 2021 di perkotaan terlihat lebih rendah disbanding daerah perdesaan. Nilai indeks P1 di perkotaan tercatat sebesar 0,653, sedangkan di daerah perdesaan tercatat sebesar 0,753. Demikian juga dengan indeks P2 di periode yang sama, perkotaan mencatat indeks P2 sebesar 0,154, sedikit lebih rendah dibandingkan dengan indeks P2 di daerah perdesaan sebesar 0,156. Kondisi ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin di daerah perkotaan di Bali lebih dekat dengan garis kemiskinan dibanding penduduk miskin di daerah perdesaan, sedangkan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin di perdesaan lebih tinggi atau cenderung lebih heterogen dibanding daerah perkotaan.

**Tabel 3.8 Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan Provinsi Bali Tahun 2021**

Periode	Kota	Desa	Kota+Desa
<b>Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)</b>			
Maret 2020	0.468	0.648	0.524
September 2020	0.550	0.752	0.610
Maret 2021	0.653	0.753	0.682
<b>Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)</b>			
Maret 2020	0.094	0.123	0.103
September 2020	0.114	0.143	0.123
Maret 2021	0.154	0.156	0.154

Sumber : BPS Provinsi Bali Tahun 2021, (Data diolah B. Organisasi)



### Solusi Permasalahan Kesmiskinan :

Peningkatan angka kemiskinan secara umum tertahan oleh pelaksanaan program bantuan sosial maupun program pengentasan kemiskinan, baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Dari aspek perlindungan sosial, pada tahun 2021 Pemerintah Pusat melakukan perpanjangan penyaluran bantuan sosial nontunai, berupa Program Sembako dengan besaran bantuan Rp 200 ribu/KPM/bulan dan Program Keluarga Harapan (PKH). Selain bantuan sosial nontunai, Pemerintah Pusat juga meningkatkan target penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) pada tahun 2021 dari 10 juta KPM menjadi 12 juta KPM secara nasional dengan indeks Rp300 ribu/KPM, serta perpanjangan bantuan subsidi listrik bagi pelanggan rumah tangga 450 VA sampai dengan 900 VA. Secara spasial, program pengentasan kemiskinan juga dilakukan oleh Pemerintah Daerah, diantaranya melalui pengalokasian anggaran untuk masyarakat miskin berupa keikutsertaan sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan, pemberian bantuan sosial tunai dan sumbangan pembinaan pendidikan (BST-SPP), hingga perluasan Program Padat Karya.

### 3.4 Tingkat Pengangguran Terbuka

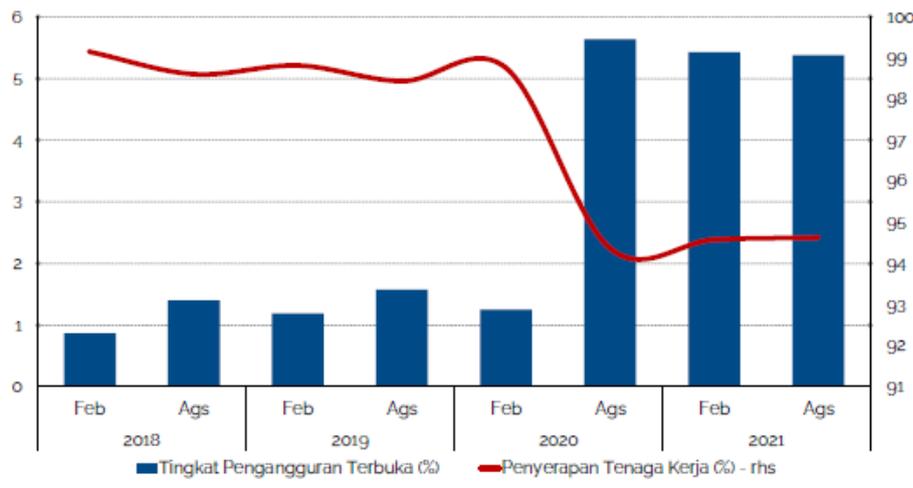
**Tabel 3.9 Perbandingan Capaian/Realisasi Tingkat Pengangguran terbuka Bali Tahun 2020 s.d. Tahun 2021.**

NO	Indikator kinerja	Capaian Tahun 2020	2021			Target akhir tahun renstra 2023	Capaian s/d 2021 trhdp 2023 (%)
			Target	Realisasi	Capaian %		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,63	1,07	5,37	19,92	0,90	16,75

Bila melihat dari table diatas realisasi tingkat pengangguran terbuka Provinsi Bali masih belum terealisasi mendekati target yang tertuang pada RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali dengan capaian kinerja 19,92 %, akan tetapi bila

dibandingkan dengan tahun 2020, kondisi pengangguran di Provinsi Bali tercatat membaik. Jumlah pengangguran menurun yaitu dari 139,14 ribu orang pada Februari 2021 menjadi 138,67 ribu orang pada Agustus 2021. Penurunan angka pengangguran terutama didorong oleh membaiknya aktivitas pariwisata seiring peningkatan aktivitas wisatawan domestik. Perbaikan juga tidak terlepas dari penerapan program pemerintah sebagai upaya pemulihan pariwisata diantaranya program *Work from Bali* dan persiapan pelaksanaan *event* internasional di akhir tahun. Di sisi lain, penduduk usia kerja di Bali pada Agustus 2021 tercatat sebesar 3,51 juta orang atau meningkat dibandingkan dengan bulan Februari 2021 yang sejumlah 3,48 juta orang. Sejalan dengan itu, jumlah angkatan kerja di Bali juga turut meningkat dari 2,57 juta orang pada Februari 2021 menjadi 2,58 juta orang pada Agustus 2021.

### Grafik 3.5 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Bali 2021



Sumber : BPS Provinsi Bali Tahun 2021 (data diolah B.Organisasi 2022)

Penduduk usia kerja yang terdampak COVID-19 meningkat pada Agustus 2021 seiring dengan penebalan kebijakan PPKM yang diterapkan sejak awal triwulan III 2021. Total penduduk yang terdampak COVID-19 selama bulan Februari 2021 sampai dengan Agustus 2021 adalah sejumlah 714,20 ribu orang atau mencapai 20,35% dari total penduduk usia kerja yang ada di Bali. Angka ini meningkat dibandingkan laporan periode Agustus 2020 sampai dengan Februari 2021 yang berjumlah 656,94 ribu orang atau 18,87% dari total penduduk usia kerja



di Provinsi Bali. Lebih lanjut, dampak COVID-19 terhadap ketenagakerjaan di Provinsi Bali terutama disebabkan pengurangan jam kerja sebagaimana dipaparkan pada Tabel 3.10.

**Tabel 3.10 Dampak COVID-19 Terhadap Penduduk Usia Kerja (Ribu Orang)**

Komponen	Ags-20	21-Feb	Ags-21	Perubahan (Feb-21 - Ags-20)	Perubahan (Ags-21 - Feb-21) ribu orang
Pengangguran karena COVID-19 <sup>22</sup>	98.18	58.83	48.89	-39.35	-9.94
Bukan Angkatan Kerja (BAK) <sup>23</sup> karena COVID-19	34.52	32.25	33.41	-2.27	1.16
Sementara tidak bekerja <sup>24</sup> karena COVID-19	72.19	40.08	38.15	-32.11	-1.93
Penduduk Bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena COVID-19	648.25	525.78	593.75	-122.47	67.97
<b>Jumlah penduduk usia kerja terdampak COVID-19</b>	<b>853.14</b>	<b>656.94</b>	<b>714.20</b>	<b>-196.2</b>	<b>57.26</b>
<b>Penduduk Usia Kerja (PUK)</b>	<b>3455.13</b>	<b>3481.6</b>	<b>3509.09</b>		
% terhadap PUK	24.69%	18.87%	20.35%		

Sumber : BPS Provinsi Bali Tahun 2021 (Data Diolah B.Organisasi)

Berdasarkan jenjang pendidikannya, peningkatan pengangguran terjadi pada lulusan setingkat SMA ke bawah. Kondisi ini diperkirakan sejalan dengan kebijakan *reopening* beberapa usaha yang membutuhkan kompetensi dan kualifikasi yang lebih tinggi. Di sisi lain, meningkatnya pengangguran tamatan SMA ke bawah perlu direspon dengan upaya peningkatan kualitas agar mampu bersaing dengan kelompok yang memiliki latar belakang pendidikan lebih tinggi.

Dilihat dari komposisinya, mayoritas pekerja di Provinsi Bali memiliki latar belakang tingkat pendidikan SMP ke bawah, yaitu sebanyak 1,09 juta orang (pangsa 44,81%) yang diperkirakan terserap ke sektor informal dan tidak membutuhkan kualifikasi pendidikan yang tinggi. Disisi lain, pekerja dengan tingkat pendidikan Diploma merupakan golongan pekerja dengan jumlah yang paling kecil yakni 121 ribu orang dengan pangsa 5,00%.

**Tabel 3.11 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Bali Menurut Pendidikan**

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	2018		2019		2020		2021	
	Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari	Agustus
SMP ke bawah (%)	0.37	0.52	0.56	0.55	0.37	5.50	4.47	9.05
SMA (%)	1.66	1.46	1.55	2.01	1.41	7.79	5.82	6.47
SMK (%)	1.99	3.45	2.01	2.92	2.46	10.12	8.58	8.02
Diploma I / II / III (%)	0.90	2.57	2.86	4.13	3.88	13.15	11.18	6.91
Universitas (%)	1.25	1.75	1.58	2.09	1.81	5.26	9.43	4.05
<b>TOTAL</b>	<b>6.17</b>	<b>9.75</b>	<b>8.56</b>	<b>11.70</b>	<b>9.93</b>	<b>41.82</b>	<b>39.48</b>	<b>34.50</b>

Sumber : BPS Provinsi Bali Tahun 2021 (data diolah Biro Organisasi)

Beberapa lapangan usaha menunjukkan peningkatan penyerapan tenaga kerja. LU Industri Pengolahan, Administrasi Pemerintahan, dan Akmamin menunjukkan peningkatan jumlah tenaga kerja dengan perubahan masing-masing sebesar 88,95 ribu orang, 25,23 ribu orang, dan 13,84 ribu orang dibandingkan dengan kondisi bulan Februari 2021. Secara pangsa sektoral, LU Pertanian menjadi penyumbang terbesar dalam penyerapan tenaga kerja di Provinsi Bali sejak tahun 2020, menggeser dominasi LU Perdagangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa sektor pertanian menjadi bantalan yang efektif dalam menyerap tenaga kerja di tengah situasi pertumbuhan ekonomi yang negatif.

Hal ini dikarenakan lapangan kerja di sektor pertanian bersifat informal sehingga dapat menyerap tenaga kerja dari bidang yang berbeda dengan kebutuhan tingkat pendidikan yang tidak terlalu ketat. Pada Agustus 2021, LU Pertanian menyerap tenaga kerja terbanyak dengan pangsa 21,90% dari total penduduk yang bekerja, diikuti oleh LU Perdagangan dan Industri Pengolahan dengan pangsa masing-masing sebesar 20,96% dan 16,14%. Disisi lain, LU Akmamin tercatat mengalami peningkatan sebesar 6,29% sejalan dengan membaiknya aktivitas pariwisata yang didorong oleh wisatawan domestik.

**Tabel 3.12 Penduduk Bali yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha**

Lapangan Usaha 17 Sektor	2018		2019		2020		2021	
	Feb	Ags	Feb	Ags	Feb	Ags	Feb	Ags
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	470	506	543	463	507	546	564	534
Pertambangan dan Penggalian	5	6	15	10	7	9	9	8
Industri Pengolahan	440	370	386	369	396	382	305	394
Pengadaan Listrik dan Gas	4	6	4	6	6	6	3	4
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	4	6	5	12	5	8	3	7
Konstruksi	165	159	163	162	179	159	155	155
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	510	511	457	481	502	496	535	511
Transportasi dan Pergudangan	58	73	79	77	97	60	88	58
Penyedia Akomodasi dan Makan Minum	343	325	324	328	316	236	220	234
Informasi dan Komunikasi	16	8	11	13	7	14	23	17
Jasa Keuangan dan Asuransi	65	62	84	71	69	62	67	63
Real Estate	7	3	-	4	8	3	6	3
Jasa Perusahaan	42	59	54	59	70	43	33	34
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	144	139	120	125	122	114	112	137
Jasa Pendidikan	124	118	95	100	107	103	101	109
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	56	51	38	55	56	51	59	56
Jasa Lainnya	133	124	131	135	152	131	145	118
<b>Jumlah</b>	<b>2,585</b>	<b>2,526</b>	<b>2,510</b>	<b>2,469</b>	<b>2,607</b>	<b>2,423</b>	<b>2,428</b>	<b>2,440</b>

Sumber : BPS Provinsi Bali Tahun 2021 (Data diolah B. Organisasi)

Pada Agustus 2021, jenis pekerjaan didominasi oleh kelompok orang yang bekerja pada kegiatan informal. Kondisi ini berbeda dengan masa sebelum pandemic COVID-19 (periode Februari 2020) yang lebih didominasi oleh kelompok pekerja formal. Pada Agustus 2021, penduduk yang bekerja pada kegiatan informal tercatat sebanyak 57,09% dari total penduduk yang bekerja, lebih tinggi dibanding periode Februari 2021 sebesar 56,07%. Sementara itu, orang yang bekerja pada kegiatan formal tercatat sebanyak 42,90% dari total penduduk yang bekerja. Tingginya kelompok orang yang bekerja pada kegiatan informal mengindikasikan bahwa bekerja di sektor informal merupakan cara yang ditempuh oleh para pekerja untuk memperoleh pendapatan di tengah perlambatan kinerja ekonomi akibat COVID-19. Di samping itu, sektor informal relatif lebih mudah untuk dijangkau, mengingat tidak terdapat persyaratan ketat terkait latar belakang pendidikan maupun kompetensi tertentu.



## Solusi Permasalahan

Salah satu upaya peningkatan kualitas dapat dilakukan dengan memanfaatkan program pemerintah “kartu prakerja1”. Kartu Prakerja adalah program pengembangan kompetensi dari Pemerintah Pusat berupa bantuan biaya yang ditujukan untuk pencari kerja, pekerja ter-PHK atau pekerja yang membutuhkan peningkatan kompetensi.

### 3.5 Gini Ratio (Ketimpangan Pendapatan)

**Tabel 3.13 Perbandingan Capaian/Realisasi Gini Ratio Bali Tahun 2020 s.d. Tahun 2021.**

NO	Indikator kinerja	Capaian Tahun 2020	2021			Target akhir tahun renstra 2023	Capaian s/d 2021 trhdp 2023 (%)
			Target	Realisasi	Capaian %		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Gini Ratio	0,36	0,30	0,37	81,01	0,25	67,56

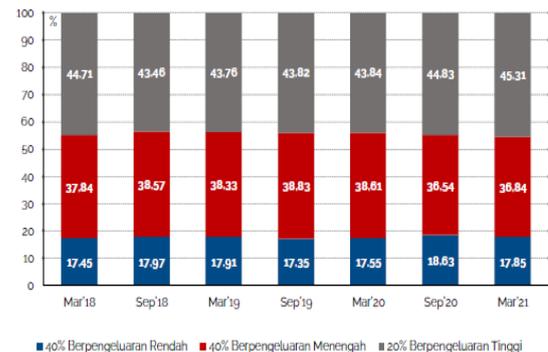
Tingkat ketimpangan di Provinsi Bali pada periode Maret 2021 menunjukkan peningkatan. Hal ini tercermin dari indeks rasio gini yang tercatat sebesar 0,378 pada Maret 2021, lebih tinggi dibanding dengan periode September 2020 yang tercatat sebesar 0,369. Kondisi ini menunjukkan semakin meningkatnya kesenjangan ekonomi antar penduduk di Provinsi Bali. Berdasarkan daerah tempat tinggal, indeks rasio gini di daerah perkotaan pada Maret 2021 tercatat sebesar 0,387, lebih tinggi 0,009. poin dibanding periode September 2020 yang tercatat sebesar 0,378. Sementara di daerah perdesaan, indeks rasio gini pada tercatat menurun dari 0,304 pada bulan September 2020 menjadi 0,301 pada bulan Maret 2021. Peningkatan rasio gini didorong oleh semakin kecilnya distribusi pendapatan pada kelompok penduduk 40% terbawah di Provinsi Bali yaitu sebesar 17,85% pada Maret 2021, menurun dibanding periode September 2020 sebesar 18,63%.

Namun demikian, menurut kriteria Bank Dunia, tingkat ketimpangan di Provinsi Bali masih termasuk dalam kategori ketimpangan rendah.

**Grafik 3.6 Perkembangan Gini Ratio Bali dan Nasional 2021**



**Grafik 3.7 Distribusi Pendapatan per kapita Penduduk**



Sumber : BPS Provinsi Bali Tahun 2021 (data diolah B.Organisasi)

Capaian Gini Ratio Provinsi Bali bila dibandingkan dengan Nasional, Gini Ratio Provinsi Bali masih lebih bagus dari target Nasional, ini tercermin bahwa ketimpangan di Provinsi Bali dapat di kendalikan oleh Pemerintah Provinsi Bali melalui Visi Misi Pemerintah Provinsi Bali yang tertuang pada RPJMD Semesta Berencana 2018-2023.

### Solusi Permasalahan :

Pemerintah Provinsi Bali telah melaksanakan berbagai Upaya pemerataan Ekonomi di Provinsi Bali, langkah yang dilaksanakan meliputi :

1. Pembangunan Desrinasi Pariwisata Baru di Kabupaten Klungkung dengan membangun Pengembangan Pusat Kebudayaan Bali;
2. Mempercepat akses penyaluran komoditas dari kabupaten ke Kota, dengan membangun Shortcut Singaraja-Mengwitani;
3. Mengembangkan Bandara Udara Baru di Utara Provinsi Bali;
4. Mengembangkan jalan Tol Gilimanuk-mengwi;



5. Mempercepat proyek Pelabuhan Segitiga Sanur- Nusa Penida-Nusa Ceningan
6. Membina dan memberikan bimbingan UMKM malai tahap Produksi, Promosi dan Pemasaran;
7. Mengembangkan Pariwisata Berbasis Desa Adat di seluruh Desa di Provinsi Bali;

### 3.6 Investasi dan

#### 3.6.1 Jumlah Ekspor

Kinerja komponen investasi pada triwulan IV 2021 tercatat tumbuh 1,24% (yoy), membaik dibandingkan dengan triwulan II 2021 yang mengalami kontraksi - 2,91% (yoy). Perbaikan kinerja investasi tersebut didorong oleh proyek pengembangan Pelabuhan Benoa, Bandara I Gusti Ngurah Rai, pengerjaan Jalan *Shortcut* Singaraja- Mengwitani serta proyek Pelabuhan Segitiga Sanur-Nusa Penida-Nusa Ceningan. Selain itu, perbaikan kinerja investasi juga didorong oleh berlanjutnya pengerjaan proyek perhotelan di Kawasan Nusa Dua, Badung.

**Tabel 3.14 Perbandingan Capaian/Realisasi Investasi, Ekspor dan Impor Bali Tahun 2020 s.d. Tahun 2021.**

NO	Indikator kinerja	Capaian Tahun 2020	2021			Target akhir tahun renstra 2023	Capaian s/d 2021 trhdp 2023 (%)
			Target	Realisasi	Capaian %		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Investasi	7,63	22,50	21.15	94	28,10	75,26
2	Jumlah Ekspor	US\$ 41	626	110	17,57	684,662	16,08

Sumber : Biro Organisasi Setda Provinsi Bali Tahun 2022

Kinerja investasi yang membaik pada triwulan laporan juga terkonfirmasi dari penjualan semen serta realisasi penanaman modal asing (PMA). Penjualan semen di Bali pada triwulan laporan tercatat tumbuh 1,83% (yoy), membaik dibandingkan dengan triwulan II 2021 -7,98% (yoy) (Grafik 1.8). Selain itu, realisasi PMA sektor hotel dan restoran pada triwulan laporan tercatat tumbuh 5,91%(yoy),



lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat kontraksi 31,25% (yoy) (Grafik 1.9).

Neraca perdagangan Provinsi Bali (antardaerah dan luar negeri) pada triwulan III 2021 mencatatkan defisit setelah mengalami surplus pada triwulan sebelumnya. Neraca perdagangan gabungan (luar negeri dan antar daerah) tercatat defisit sebesar Rp1,2 triliun pada triwulan III 2021, setelah pada triwulan sebelumnya surplus Rp740 miliar. Defisit ini terutama bersumber dari meningkatnya impor luar negeri dan meningkatnya defisit perdagangan antar daerah.

Defisit neraca perdagangan antardaerah Bali pada triwulan III 2021 meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Pada triwulan laporan, defisit neraca perdagangan antardaerah Bali tumbuh 160,84% (yoy), meningkat dibanding triwulan sebelumnya -56,80% (yoy). Peningkatan nilai defisit ini terutama disebabkan oleh penurunan nilai ekspor antardaerah. Ekspor antar daerah Bali antara lain dilakukan dengan daerah di Pulau Jawa seperti Banyuwangi khususnya komoditas bawang merah. Sementara itu, Bali melakukan impor beberapa komoditas seperti beras dan cabai merah dari Surabaya dan Banyuwangi.

Kinerja ekspor luar negeri Provinsi Bali melambat pada triwulan laporan ditengah impor yang meningkat. Ekspor luar negeri Bali tumbuh 0,49% (yoy) pada triwulan III 2021, melambat dibandingkan dengan triwulan II 2021 yang tumbuh 10,81% (yoy). Kinerja ekspor luar negeri yang melambat bersumber dari masih tertahannya kinerja ekspor jasa ditengah masih belum dibukanya penerbangan ke Bali untuk wisatawan mancanegara pada triwulan laporan. Selain itu, kinerja ekspor barang pada triwulan laporan juga melambat. Kinerja ekspor jasa Provinsi Bali pada Tahun 2021 masih terkontraksi sebagaimana triwulan sebelumnya.

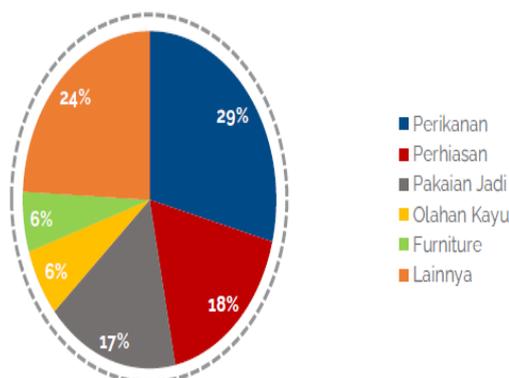
Kedatangan wisman tercatat tumbuh -100% (yoy) pada triwulan laporan, menurun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya -95,44% (yoy) (Grafik 1.10). Masih dalamnya penurunan kunjungan wisman disebabkan karena masih berlangsungnya kebijakan *travel restriction* antarnegara pada triwulan laporan baik

dilakukan oleh Indonesia maupun oleh negara asal wisman. Penurunan kedatangan wisman terjadi pada seluruh pasar negara asal wisman. Pasar wisman utama Bali didominasi oleh wisman dari Australia, Tiongkok, dan India.

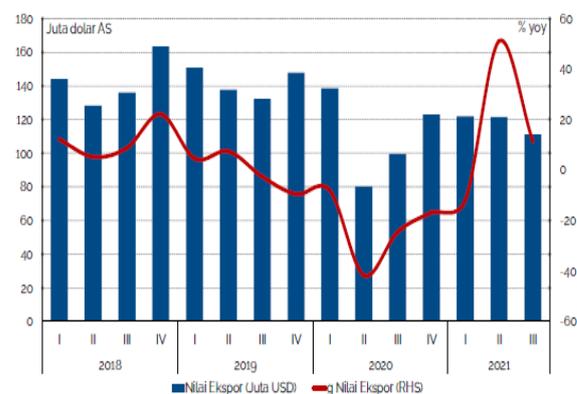
Selain itu, kinerja ekspor barang Bali juga mengalami perlambatan pada triwulan laporan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Ekspor barang Bali tercatat tumbuh 11,32% (yoy), melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh 51,15% (yoy). Perlambatan kinerja tersebut terjadi pada sebagian besar ekspor barang utama yaitu perikanan (pangsa 25%), pakaian jadi (17%), dan perhiasan (18%).

Perlambatan kinerja ekspor barang Bali terutama bersumber dari perlambatan ekspor ke AS, Australia, dan Tiongkok. Ekspor Bali ke beberapa negara mitra dagang utama menunjukkan perlambatan. Ekspor barang Bali ke pasar utama seperti AS (pangsa 40%) dan Australia (11%) masing-masing tumbuh 41,00% (yoy) dan 12,47% (yoy), meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yaitu 70,45% (yoy) dan 74,10% (yoy). Sementara itu, ekspor barang Bali ke Jepang (pangsa 5%) tumbuh -16,71% (yoy) pada triwulan III 2021, membaik dibandingkan dengan triwulan sebelumnya 45,12% (yoy).

**Grafik 3.8 Pangsa Nilai Ekspor Komoditas 2021**



**Grafik 3.9 Perkembangan Ekspor Barang 2021**



Sumber : Bea dan Cukai Provinsi Bali 2021



Berdasarkan data yang diperoleh dari dinas Koperasi dan UMKM, unit usaha di Bali didominasi oleh usaha skala mikro yang mencapai 87,1% dari total 482,48 ribu unit usaha. Sementara itu, Usaha Kecil Menengah (UKM) baru sekitar 12,8% dan usaha besar 0,1% dari total keseluruhan usaha. Secara sektoral, UKM di Bali didominasi oleh sektor perdagangan dan industri pengolahan. Jumlah tenaga kerja yang bekerja dalam UKM berjumlah 526,12 ribu tenaga kerja. Salah satu contoh sukses UKM *go global* adalah Koperasi Kerta Semaya Samaniya (Koperasi KSS) di Jembrana, Bali.

Koperasi KSS yang menjadi contoh sukses UKM yang melakukan ekspor langsung dengan kontrak. Koperasi KSS bersama 38 kelompok tani kakao mampu menghasilkan biji kakao fermentasi sekitar 50 ton per tahun, dengan nilai penjualan mencapai Rp 2,8 miliar. Penjualan biji kakao fermentasi dilakukan melalui perusahaan besar domestik (40%) dan pasar ekspor (60%). Penjualan ekspor dilakukan langsung ke buyer global dengan terikat kontrak. Beberapa negara yang menjadi pasar ekspor yaitu diantaranya Prancis, Jepang, Swiss, dan Belanda.

Perjalanan panjang Koperasi KSS, memasuki pasar global dimulai sejak adanya pendampingan melalui program kakao lestari untuk meningkatkan produksi. Pendampingan ini menyebabkan koperasi memperoleh sertifikat kakao berkelanjutan dari UTZ pada tahun 2011. Kemudian, sejak tahun 2015, koperasi mampu melakukan ekspor ke perusahaan coklat global di Perancis.

Kunci sukses dari Koperasi KSS adalah menjalankan model kemitraan *contract farming* dengan kelompok tani kakao di Jembrana, Bali. Hal yang menjadi faktor pendukung keberhasilan adalah adanya pendampingan dari berbagai pihak yaitu Usaha Kalimantan, BI Bali, LPEI, Bea Cukai untuk menerapkan *good agriculture practice* dan *good handling practice* sehingga menghasilkan biji kakao yang berkualitas. Pendampingan terkait penguatan manajemen koperasi juga telah dilakukan yaitu diantaranya adalah melakukan MoU dengan kelompok tani untuk menjamin kepastian pasokan dan standarisasi kualitas. Selanjutnya, dengan proses produksi yang baik, Koperasi KSS melakukan kerjasama dengan berbagai pihak yaitu LPEI dan Buyer untuk bisa mendapat beberapa sertifikasi internasional

yaitu UTZ, Rainforest, USDA dan Fairtrade sehingga mampu menjual produk ke buyer Global.

**Gambar 3.3 Bisnis Model Ekspor Komoditas Kakao Melalui Kemitraan**



Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Bali Tahun 2021

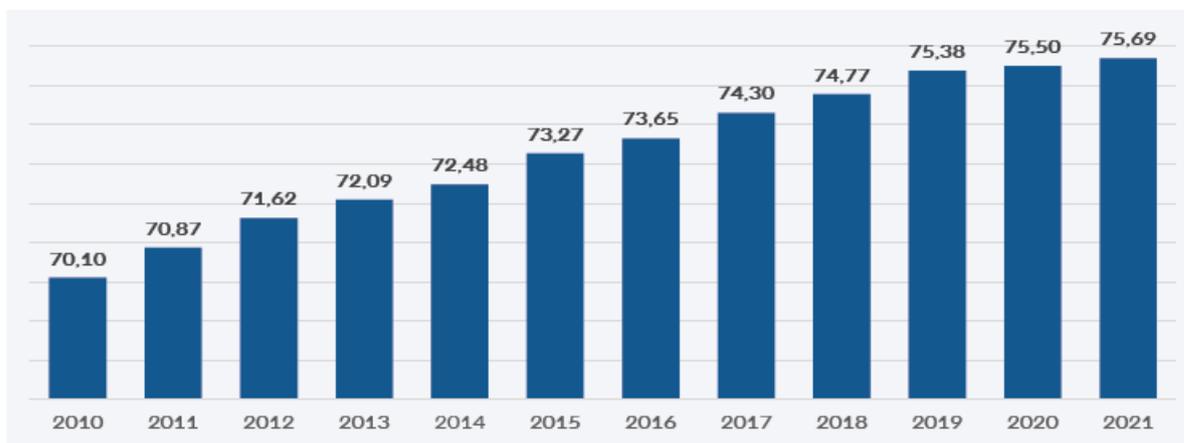
### Solusi Permasalahan :

Pemerintah Daerah telah melakukan berbagai upaya untuk mendukung UMKM *go export*. Dinas koperasi dan UKM telah melakukan *business matching* dengan usaha besar, pameran produk, serta peningkatan kapasitas untuk digitalisasi. Kantor Bea Cukai telah melakukan asistensi klinik ekspor serta fasilitasi program Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) IKM. Sementara itu Dinas Perindustrian telah mendorong UKM untuk masuk ke *e-commerce*.

### 3.7 Indeks Pembangunan Manusia

Secara umum, pembangunan manusia Bali tercatat mengalami kemajuan selama periode 2010 hingga 2021. IPM Bali tercatat meningkat dari 70,10 pada tahun 2010 menjadi 75,69 pada tahun 2021. Selama periode tersebut, IPM Bali rata-rata tumbuh sebesar 0,70 persen per tahun dan berada pada level “tinggi”. Jika dilihat selama setahun terakhir, IPM Bali tahun 2021 tumbuh 0,25 persen atau meningkat 0,19 poin dibanding tahun 2020. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa pembangunan manusia di Bali tetap berjalan meskipun masih dalam masa pandemi.

**Grafik 3.8 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Bali 2010-2021**



Sumber : BPS Provinsi Bali Tahun 2021 (Data diolah B.Organisasi)

Pencapaian pembangunan manusia diukur dengan memperhatikan tiga aspek esensial yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Oleh karena itu, peningkatan capaian IPM sangat bergantung pada capaian setiap komponennya. Pada tahun 2021, hanya komponen pengeluaran riil per kapita yang mengalami penurunan sedangkan tiga komponen lainnya mengalami peningkatan.

**Tabel 3.15 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Bali Menurut Komponen**

Komponen	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)	Tahun	70,61	70,78	70,94	71,11	71,20	71,35	71,41	71,46	71,68	71,99	72,13	72,24
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	11,71	12,12	12,26	12,40	12,64	12,97	13,04	13,21	13,23	13,27	13,33	13,40
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	7,74	7,77	8,05	8,10	8,11	8,26	8,36	8,55	8,65	8,84	8,95	9,06
Pengeluaran Riil per Kapita yang disesuaikan (PPP)	Rp 000	12.074	12.307	12.530	12.738	12.831	13.078	13.279	13.573	13.886	14.146	13.929	13.820
IPM		70,10	70,87	71,62	72,09	72,48	73,27	73,65	74,30	74,77	75,38	75,50	75,69
Pertumbuhan IPM	%	-	1,10	1,06	0,66	0,54	1,09	0,52	0,88	0,63	0,82	0,16	0,25

Sumber : BPS Provinsi Bali Tahun 2021 (Data diolah Biro Organisasi)

### Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 201

**Tabel 3.16 Perbandingan Capaian/Realisasi Indeks Pembangunan Manusia Bali Tahun 2020 s.d. Tahun 2021.**

NO	Indikator kinerja	Capaian Tahun 2020	2021			Target akhir tahun renstra 2023	Capaian s/d 2021 trhdp 2023 (%)
			Target	Realisasi	Capaian %		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	IPM	75,50	75,61	75,69	100,10	80	94,61

Sumber : Biro Organisasi Setda Prov. Bali Tahun 2022

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bali tahun 2021 tercatat meningkat dan berada di atas indeks nasional. IPM Bali tahun 2021 tercatat sebesar 75,69, lebih tinggi 0,25% (yoy) dibanding tahun sebelumnya. Peningkatan IPM Bali didorong oleh peningkatan hampir pada seluruh indikator pembentuk IPM, yaitu Umur Harapan hidup Saat Lahir (UHH), Harapan Lama Sekolah (HLS) serta Rata-rata Lama Sekolah (RLS), yang masing-masing mengalami kenaikan sebesar 0,15% (yoy), 0,53% (yoy), dan 1,23% (yoy). Sementara itu, indikator pengeluaran



per kapita tercatat menurun 0,78% (yoy). Peningkatan IPM mengindikasikan inklusifitas Bali, meskipun perekonomian masih tercatat melambat.

#### 4 Capaian Indikator Kinerja Utama dalam Dokumen Perjanjian Kinerja

Realisasi pelaksanaan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Bali terdiri dari 22 (dua puluh dua) aspek yang menjadi prioritas pembangunan daerah Bali menuju Target RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2021 dapat disajikan dalam table terlampir, dan pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

**Tabel 3.17 Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2021;**

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target 2021	Realisasi 2021
1	2	3	4	5
1	Terpenuhinya kebutuhan dasar Krama Bali dengan kualitas layak	Tingkat Inflasi Bali	3.00	1,09
		Persentase Ketersediaan pangan utama	100	100
2	Terwujudnya swasembada pangan Krama Bali dan daya saing pertanian	Indeks ketahanan pangan	80	84,45
3	Meningkatnya diversifikasi dan optimalisasi potensi sumber daya pangan lokal	Nilai Tambah Produk Pertanian (NTPP)	31	31
4	Meningkatnya kualitas hasil pertanian Krama Bali	Nilai Tukar Petani (NTP)	105	93,40
		Nilai Tukar Nelayan (NTN)	117.9	101.50
5	Meningkatnya derajat kesehatan Krama Bali	Umur Harapan Hidup	72,3	72.24
6	Terwujudnya wajib belajar 12 Tahun yang berkualitas	Rata-rata lama sekolah	10,56	9,06
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk usia 16-18 Tahun	82.92	82,96



1	2	3	4	5
7	Meningkatnya pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang terjangkau, merata, adil, dan berkualitas	Angka harapan lama sekolah	13.77	13,40
8	Terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) Krama Bali yang unggul dan berdaya saing tinggi	Indeks Pembangunan Manusia	75.61	75.69
9	Meningkatnya daya saing SDM Krama Bali	Indeks Daya Saing SDM Bali	70	70
10	Terwujudnya kesejahteraan sosial krama bali	Persentase Kemiskinan	1,90	4,71
11	Terwujudnya tenaga kerja yang berkompoten dan berdaya saing	Tingkat pengangguran terbuka	1.07	5,37
12	Meningkatnya kompetensi tenaga	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	76,30	73.54
13	Terwujudnya tata kehidupan Krama Bali berdasarkan nilai-nilai Sad Kerthi	Indeks Kebahagiaan	73,98	73,98
14	Meningkatnya pasar Pariwisata Bali	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	45	n/a
15	Meningkatnya pasar pariwisata Bali di pasar domestik dan global	Jumlah Devisa sektor pariwisata	9,620	n/a
16	Meningkatnya kualitas pelayanan kepariwisataan	Indeks Kepuasan wisatawan	81	n/a
17	Terwujudnya pemerataan pertumbuhan ekonomi Bali	Persentase Pertumbuhan Ekonomi	6,60	4,52
18	Berkembangnya perekonomian berbasis budaya bali	Kontribusi KUMKM terhadap PDRB Bali	12,50	n/a
19	Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar, laut dan udara secara terintegrasi an terkoneksi mendukung pertumbuhan perekonomian baru	Indeks konektivitas	2,5	2.5



1	2	3	4	5
20	Meningkatnya rasa aman Krama Bali dan Wisata melakukan aktivitas kehidupannya	Angka Kriminalitas	3.200	2.923
21	Terwujudnya tata kehidupan Krama Bali yang Madani sesuai dengan nilai-nilai Budaya Bali	Indeks demokrasi	81	82,37
		Indeks Pemberdayaan gender	64,75	94.01
22	Meningkatnya keharmonisan tata kehidupan Krama Bali berbasis wilayah dan lingkungan	Persentase Daya dukung lingkungan	17,46	n/a
23	Terwujudnya ekosistem yang berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	63,21	71,98
		Mitigasi Gas Rumah Kaca (GRK)	13,3	n/a
		Persentase bauran Energi Baru dan Terbarukan (EBT)	7,14	n/a
24	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	72	n/a

Sumber : Perangkat Daerah Provinsi Bali, Tahun 2021 (data diolah B.organisasi)

**Tabel 3.18 Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target dalam pembangunan jangka menengah**

NO	Indikator kinerja	Capaian Tahun 2020	2021			Target akhir tahun renstra 2023	Capaian s/d 2021 trhdp 2023 (%)
			Target	Realisasi	Capaian %		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Tingkat Inflasi Bali	0,62	3,00	1,09	275	3,00	275
2	Ketersediaan pangan utama	100	100	100	100	100.00	100
3	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB	70	80	84,45	105,68	100	84,54
4	Nilai Tambah Produk Pertanian (NTPP)	29	31	31	100	35.00	88,57
5	Nilai Tukar Petani (NTP)	104.93	105	93,40	88,95	106.00	88,11
6	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	98,66	117,9	101.50	86,08	119.20	84.65
7	Umur Harapan Hidup	71.68	72,3	72.24	99,91	72.68	99,39
8	Rata-rata lama sekolah	9.89	10,56	9,06	85,79	11,40	79.47
9	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk usia 16-18 Tahun	82.54	82.92	82,96	100,04	83,30	99,59
10	Angka harapan lama sekolah	13.49	13.77	13,40	97,31	14,05	95.37



1	2	3	4	5	6	7	8
11	Indeks Pembangunan Manusia	74.77	75.61	75.69	100.10	80	94.61
12	Indeks Daya Saing SDM Bali	n/a	70	70	100	75	93.33
13	Persentase Kemiskinan	3.61	1,90	4,71	40.33	1,00	21.23
14	Tingkat pengangguran terbuka	1.52	1.07	5,37	19.92	0.9	16.75
15	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	73.87	76,30	73.54	96.38	76,80	95.75
16	Indeks Kebahagiaan	72.48	73,98	73,98	100	74,98	98.66
17	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	45	45	n/a	n/a	45	n/a
18	Jumlah Devisa sektor pariwisata	19,458,000	9,620	n/a	N/a	12.015.000	n/a
19	Indeks Kepuasan wisatawan	79	81	n/a	n/a	85	n/a
20	Pertumbuhan Ekonomi	5.34	6,60	4,52	68.48	7.00	64.28
21	Kontribusi KUMKM terhadap PDRB Bali	n/a	12,50	n/a	n/a	13	n/a
22	Indeks konektivitas	2.5	2,5	2.5	100	2.5	100
23	Angka Kriminalitas	4.037	3.200	2.923	91.34	2.262	70.68
24	Indeks demokrasi	82.37	81	82,37	101.23	81	101.37



1	2	3	4	5	6	7	8
25	Indeks Pemberdayaan gender	64.18	64,75	94.01	145.18	65	144.63
26	Persentase Daya dukung lingkungan	n/a	17,46	n/a	n/a	17.82	n/a
27	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	62.62	63,21	71,98	113.87	64,34	111.87
28	Mitigasi Gas Rumah Kaca (GRK)	8.57	13,3	n/a	n/a	12,29	n/a
29	Persentase bauran Energi Baru dan Terbarukan (EBT)	0	7,14	n/a	n/a	20	n/a
30	Indeks Reformasi Birokrasi	69,31	72	n/a	n/a	76	n/a

Sumber : Perangkat Daerah Provinsi Bali, Tahun 2021 (data diolah B. Organisasi)



### 3.4 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Dengan Hasil (Kinerja) yang telah Dicapai.

#### 3.4.1 Capaian Kinerja Pemerintah Provinsi Bali 2021

**Tabel 3.19 Perbandingan Capaian/Realisasi Misi RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2020 s.d. Tahun 2021.**

NO	Indikator kinerja	Capaian Tahun 2020	2021			Target akhir tahun renstra 2023	Capaian s/d 2021 trhdp 2023 (%)
			Target	Realisasi	Capaian %		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ketersediaan pangan utama	100	100	100	100	100.00	100
3	Indeks Ketahanan Pangan	70	80	84,45	105,68	100	84,54
4	Nilai Tambah Produk Pertanian (NTPP)	29	31	31	100	35.00	88,57
5	Nilai Tukar Petani (NTP)	104.93	105	93,40	88,95	106.00	88,11
6	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	98,66	117,9	101.50	86,08	119.20	84.65

Sumber : Biro Organisasi Setda Provinsi Bali Tahun 2021

Capaian kinerja tahun 2021 pada komponen peningkatan IKP lebih dari 80% dengan target 80% mengalami kenaikan 105,58% dari tahun 2020. Pada komponen peningkatan jumlah produksi tanaman pangan mengalami penurunan produksi sebesar 786101 ton atau 93,18%. Pada komponen jumlah peningkatan produksi tanaman hortikultura mengalami kenaikan sebesar 114,47% atau 115970 ton dari target 101805 ton, komponen jumlah peningkatan produksi tanaman perkebunan mengalami penurunan sebesar 98,94% atau 94119 ton dari target 94646 ton, komponen jumlah populasi ternak lokal bali (ternak) mengalami kenaikan populasi dari target 446893 ekor, komponen jumlah kasus sakit hewan menular strategis dan zoonosis (kasus rabies dan flu burung) mengalami



peningkatan kasus rabies sebesar 221 kasus dari target 100 kasus. Penurunan produksi disebabkan oleh :

1. Adanya alih fungsi lahan sawah dan adanya perbaikan jaringan irigasi
2. Terjadi pengalihan komoditi tanaman dari padi, jagung atau kedelai ke jenis tanaman yang lebih menguntungkan seperti jagung manis, semangka dan sayuran dataran rendah.
3. Anomali iklim, dimana curah hujan yang kurang menyebabkan produksi komoditi sayuran berkurang.
4. Adanya pandemic Covid -19
5. Terjadinya penjualan ternak yang tidak disertai dengan penambahan bibit baru diakibatkan daya beli kurang

Sedangkan untuk Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Bali tercatat 93,40 pada bulan Oktober 2021, naik 0,43 persen dibandingkan kondisi bulan sebelumnya yang tercatat 93,00. Kenaikan ini dipengaruhi oleh naiknya indeks yang diterima petani (**It**) sebesar 0,61 persen, lebih tinggi dibandingkan kenaikan indeks yang dibayar petani (**Ib**) sebesar 0,18 persen. **It** tercatat meningkat dari 99,95 menjadi 100,56 pada bulan Oktober 2021. Sedangkan **Ib** tercatat naik dari 107,48 menjadi 107,67.

NTP Provinsi Bali pada bulan Oktober 2021 masih berada di bawah angka 100. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam tingkatan tertentu nilai tukar produk yang dihasilkan petani belum mampu untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga petani, yang terdiri atas dua hal pokok, yaitu konsumsi rumah tangga dan biaya produksi pertaniannya. Dari 5 subsektor yang menjadi komponen penyusunan indeks NTP, hanya subsektor perikanan yang mampu mencapai angka 100 di bulan Oktober 2021.



Tabel 3.20 Nilai Tukar Petani Provinsi Bali September 2021 s.d Oktober 2021

Subsektor	Bulan		Persentase Perubahan Indeks
	September 2021	Oktober 2021	
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>1. Tanaman Pangan (NTPP)</b>	<b>91,87</b>	<b>92,58</b>	<b>0,78</b>
a. Indeks Diterima Petani	98,61	99,60	1,00
- Padi	98,18	99,35	1,19
- Palawija	104,90	103,21	-1,61
b. Indeks Dibayar Petani	107,34	107,58	0,22
- Indeks Konsumsi Rumah tangga	106,95	107,19	0,23
- Indeks BPPBM	108,55	108,76	0,20
<b>2. Hortikultura (NTPH)</b>	<b>90,42</b>	<b>90,95</b>	<b>0,58</b>
a. Indeks Diterima Petani	97,74	98,46	0,73
- Sayur-sayuran	94,71	96,05	1,42
- Buah-buahan	102,28	102,06	-0,21
- Tanaman Obat-Obatan	93,24	94,15	0,98
b. Indeks Dibayar Petani	108,10	108,26	0,15
- Indeks Konsumsi Rumah tangga	108,16	108,28	0,11
- Indeks BPPBM	107,80	108,13	0,31
<b>3. Tanaman Perkebunan Rakyat (NTPR)</b>	<b>86,08</b>	<b>88,22</b>	<b>2,49</b>
a. Indeks Diterima Petani	91,74	94,19	2,67
- Tanaman Perkebunan Rakyat (TPR)	91,74	94,19	2,67
b. Indeks Dibayar Petani	106,59	106,77	0,17
- Indeks Konsumsi Rumah tangga	106,74	106,88	0,13
- Indeks BPPBM	106,05	106,39	0,32
<b>4. Peternakan (NTPT)</b>	<b>99,81</b>	<b>98,67</b>	<b>-1,15</b>
a. Indeks Diterima Petani	107,93	106,85	-0,99
- Ternak Besar	112,03	111,74	-0,26
- Ternak Kecil	110,55	108,17	-2,15
- Unggas	101,94	101,05	-0,88
- Hasil Ternak	105,00	103,53	-1,40
b. Indeks Dibayar Petani	108,13	108,30	0,15
- Indeks Konsumsi Rumah tangga	106,42	106,75	0,30
- Indeks BPPBM	110,11	110,09	-0,01
<b>5. Perikanan (NTNP)</b>	<b>101,97</b>	<b>100,92</b>	<b>-1,04</b>
a. Indeks Diterima Petani	107,51	106,72	-0,73
- Tangkap	107,68	106,72	-0,89
- Budidaya	106,17	106,75	0,55
b. Indeks Dibayar Petani	105,43	105,75	0,31
- Indeks Konsumsi Rumah tangga	106,10	106,47	0,35
- Indeks BPPBM	104,64	104,90	0,25
<b>NTP Gabungan</b>	<b>93,00</b>	<b>93,40</b>	<b>0,43</b>
a. Indeks Diterima Petani	99,95	100,56	0,61
b. Indeks Dibayar Petani	107,48	107,67	0,18
- Indeks Konsumsi Rumah tangga	106,90	107,13	0,21
- Indeks BPPBM	108,25	108,44	0,18

Sumber : BPS Provinsi Bali Tahun 2021 (Data diolah Biro Organisasi)



Dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) tercatat sebesar 101,05 turun 1,18 persen dari bulan sebelumnya yang tercatat 102,27. Penurunan ini disebabkan oleh **It** yang turun 0,89 persen, sebaliknya **Ib** tercatat naik sebesar 0,30 persen. Penurunan **It** dari 107,68 menjadi 106,72 disebabkan oleh turunnya indeks harga pada kelompok penangkapan ikan di perairan umum (khususnya ikan mujair dan belut) yang turun 1,16 persen, begitu pula pada kelompok penangkapan ikan di laut (khususnya ikan tongkol, cumi-cumi, dan ikan lemuru) yang juga turun 0,89 persen. Di sisi lain, **Ib** yang meningkat dari 105,29 menjadi 105,60 disebabkan oleh naiknya indeks BPPBM sebesar 0,22 persen dan indeks KRT yang juga naik, yaitu sebesar 0,36 persen.

Indeks NTPi bulan Oktober 2021 naik 0,16 persen, dari 99,66 pada bulan lalu menjadi 99,82. Hal ini terjadi karena **It** meningkat 0,55 persen, sementara **Ib** naik lebih kecil yaitu 0,38 persen.

**It** yang meningkat dari 106,17 menjadi 106,75 disebabkan oleh kenaikan indeks kelompok budidaya air tawar yang naik 1,29 persen khususnya udang air tawar dan ikan gurame tawar. Sebaliknya, indeks kelompok budidaya air payau tercatat mengalami penurunan, yaitu sedalam 3,45 persen.

Sementara itu, **Ib** yang tercatat naik dari 106,54 menjadi 106,94 dipengaruhi oleh naiknya indeks KRT dan indeks BPPBM masing-masing sebesar 0,31 persen dan 0,43 persen.

**Tabel 3.21 Nilai Tukar Nelayan dan Nilai Tukar Pembudidayaan Ikan September 2021-oktober 2021**

Subsektor	Bulan		Persentase Perubahan
	September 2021	Oktober 2021	
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>Nilai Tukar Nelayan (NTN)</b>	<b>102,27</b>	<b>101,05</b>	<b>-1,18</b>
a. Indeks Diterima Petani	107,68	106,72	-0,89
- Penangkapan Di Perairan Umum	104,39	103,18	-1,16
- Penangkapan Di Laut	107,68	106,73	-0,89
b. Indeks Dibayar Petani	105,29	105,60	0,30
- Indeks Konsumsi Rumah tangga	106,05	106,43	0,36
- Indeks BPPBM	104,40	104,63	0,22
<b>Nilai Tukar Pembudidayaan Ikan (NTPi)</b>	<b>99,66</b>	<b>99,82</b>	<b>0,16</b>
a. Indeks Diterima Petani	106,17	106,75	0,55
- Budidaya Air Tawar	105,27	106,64	1,29
- Budidaya Air Payau	111,25	107,41	-3,45
b. Indeks Dibayar Petani	106,54	106,94	0,38
- Indeks Konsumsi Rumah tangga	106,51	106,84	0,31
- Indeks BPPBM	106,56	107,01	0,43

Sumber : BPS Provinsi Bali Tahun 2021 (Data diolah B.Organisasi)

### Perbandingan Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya dan Nasional

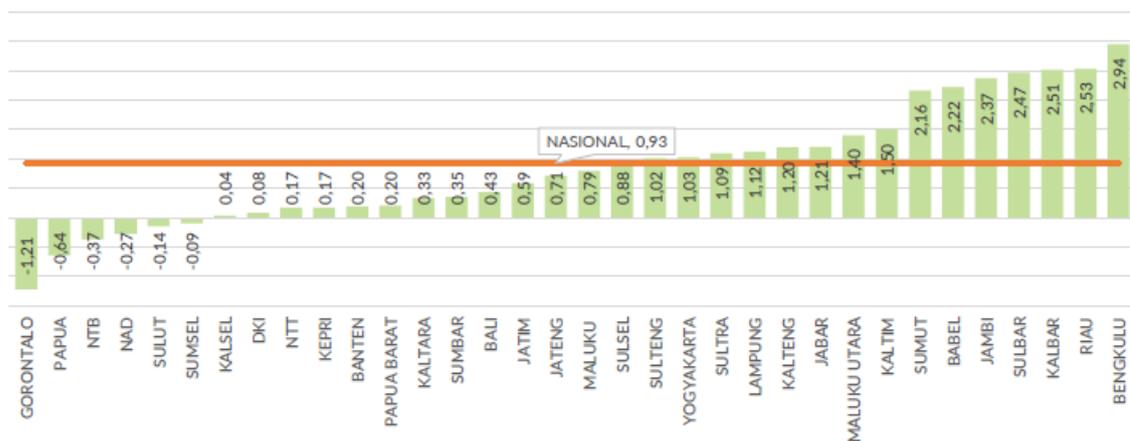
NTP Januari - Oktober 2021 menggambarkan NTP yang terjadi selama tahun berjalan. Indeks NTP Januari - Oktober 2021 tercatat lebih rendah 2,10 persen dibandingkan indeks NTP Tahun 2020 pada periode yang sama. Penurunan terdalam terjadi pada Subsektor Tanaman Pangan sebesar 7,95 persen. Indeks NTP Januari - Oktober 2021 tertinggi terjadi pada Subsektor Perikanan yakni sebesar 100,03 dan terendah terjadi pada Subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat yakni sebesar 83,67.

Secara nasional indeks NTP gabungan bulan Oktober 2021 tercatat 106,67 naik 0,93 persen dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh indeks harga yang diterima petani (**It**) nasional yang meningkat sebesar 1,05 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan kenaikan yang terjadi pada indeks harga yang dibayar petani (**Ib**) sebesar 0,12 persen.

**Tabel 3.22 Nilai Tukar Petani Bali dan Nasional Tahun 2021**

Indeks	Provinsi Bali			Nasional		
	September 2021	Oktober 2021	%	September 2021	Oktober 2021	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Indeks yang Diterima Petani	99,95	100,56	0,61	114,07	115,26	1,05
Indeks yang Dibayar Petani	107,48	107,67	0,18	107,94	108,06	0,12
NTP	93,00	93,40	0,43	105,68	106,67	0,93

Sumber : BPS Provinsi Bali Tahun 2021 (Data diolah B.Organisasi)

**Grafik 3.10 Perubahan Indeks NTP Menurut Provinsi di Indonesia, Oktober 2021**

Sumber : BPS Provinsi Bali Tahun 2021 (data diolah B.Organisasi)

Jika dilihat perubahan indeks NTP secara nasional menurut provinsi, kenaikan indeks NTP paling tinggi terjadi di Provinsi Bengkulu, yakni sebesar 2,94 persen dan kenaikan paling rendah terjadi di Provinsi Kalimantan Selatan dengan kenaikan sebesar 0,04 persen. Jika dilihat dari penurunan indeks NTP, penurunan terdalam terjadi di Provinsi Gorontalo sebesar 1,21 persen, sedangkan penurunan terdangkal terjadi di Provinsi Sumatera Selatan sebesar 0,09 persen.

### Langkah Strategis capaian kinerja 2021

Pada tahun 2021 Indonesia, khususnya Provinsi Bali diterpa pandemi wabah Covid-19 hal ini menyebabkan terjadinya pembatasan sosial sehingga menyebabkan penurunan tingkat pendapatan masyarakat terutama petani untuk



mengatasi hal tersebut Dinas Pertanian melakukan langkah – langkah strategis antara lain :

1. Melaksanakan refofusing anggaran baik APBD dan APBN yang diprioritaskan dalam penanggulangan dampak Covid 19.
2. Program padat karya bangunan embung dan rehabilitasi jaringan irigasi.
3. Program Fasilitasi asuransi usaha tani padi (AUTP) dan asuransi usaha tani ternak (AUTT).

**Tabel 3.23 Perbandingan Capaian/Realisasi RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2020 s.d. Tahun 2021.**

NO	Indikator kinerja	Capaian Tahun 2020	2021			Target akhir tahun renstra 2023	Capaian s/d 2021 trhdhp 2023 (%)
			Target	Realisasi	Capaian %		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Umur Harapan Hidup	72,13	72,3	72.24	99.91	72.50	99.64
3	Rata-rata lama sekolah	9,31	10,56	9,06	87.66	11,40	87.66
4	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk usia 16-18 Tahun	82,96	82,92	82,96	100,04	83,3	99,59
5	Angka harapan lama sekolah	13,33	13,77	13,40	97.31	14,05	100.52
6	Indeks Pembangunan Manusia	75,50	75,61	75.69	100.10	80	94,61
7	Indeks Daya Saing SDM Bali	66,86	70	70	100	75	93.33

Sumber : Biro Organisasi Setda Provinsi Bali Tahun 2021

Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2010 hingga 2021, Capaian umur harapan Hidup p

ada Tahun 2021 dengan capaian 102.39% dalam katogori melampau target yang telah ditetapkan di Tahun 2021. Sedangkan diakhir RPJMD 2018-2023



capaian UHH Provinsi Bali tercapat telah melampaui target akhir dengan capaian 102.11%.

UHH merupakan indikator komposit dari indikator kesehatan, indikator pendidikan dan indikator ekonomi. Untuk indikator kesehatan, yang berperan adalah akses pelayanan kesehatan yang meliputi tercukupinya sarana, parasarana dan alat kesehatan, sumber daya manusia kesehatan yang kompeten, upaya kesehatan yang optimal baik upaya kesehatan perorangan, upaya kesehatan rujukan maupun upaya kesehatan masyarakat serta sanitasi dan kesehatan lingkungan. Peningkatan UHH Provinsi Bali dari tahun ke tahun tidak terlepas dari adanya pemanfaatan sarana kesehatan yang optimal, ketersediaan dan sebaran tenaga kesehatan diseluruh Provinsi Bali yang makin meningkat dan adanya Jaminan Kesehatan Nasional Krama Bali Sejahtera untuk pembiayaan kesehatan.

Untuk mendukung Capaian Kinerja Pemerintah Provinsi Bali tercapai, ada beberapa sasaran yang mendukung tercapainya UHH provinsi Bali, antara lain tersaji pada tabel 3.24.

**Tabel 3.24 Indikator Pendukung tercapainya UHH provinsi Bali Tahun 2021**

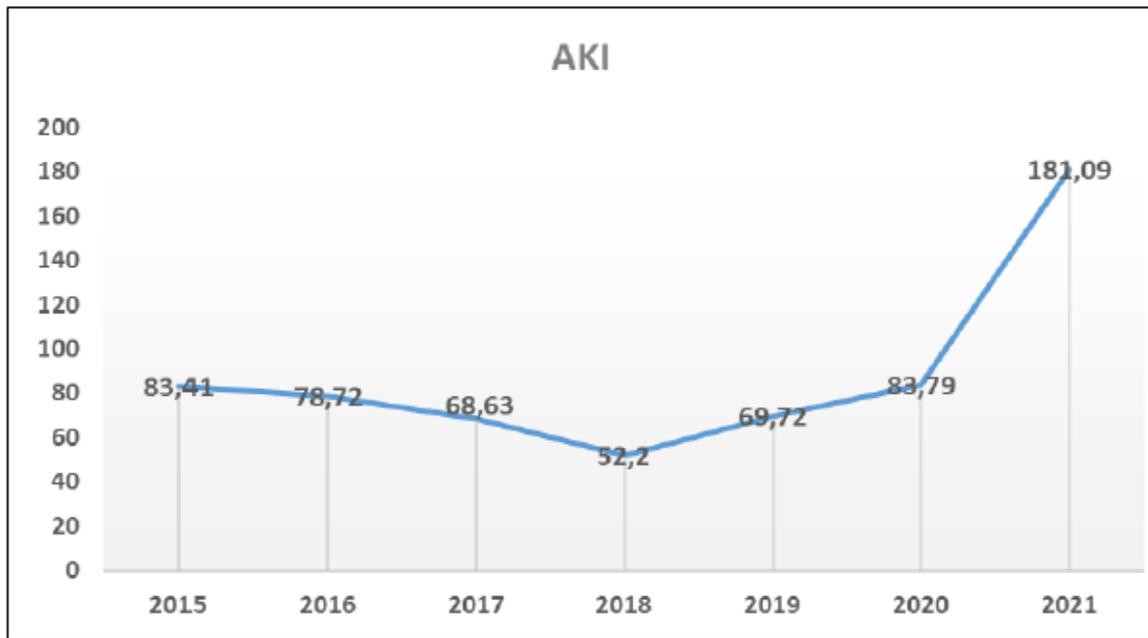
Indikator Kinerja Utama		Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.1	Angka kematian ibu (AKI).	/ 100.000 KH	67	181,09	-70.28
1.2	Angka Kematian Bayi (AKB)	/ 1000 KH	20	5,1	171.5
1.3	Angka Kesakitan Penyakit Menular	/100.000 KH	106	55,18	144.82
1.4	Proporsi Balita Gizi Buruk/ Kurang	Persentase	9,5	1,9	180

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Tahun 2021

Kematian ibu merupakan salah satu indikator derajat kesehatan suatu masyarakat, yang kejadiannya sangat dipengaruhi oleh berbagai aspek baik aspek klinis, aspek sistem pelayanan kesehatan, maupun faktor-faktor non kesehatan. Kondisi pandemi Covid-19 memberikan kontribusi yang besar terhadap kesehatan secara umum termasuk kesehatan maternal maupun neonatal. Hal ini bisa dilihat

dari terjadinya peningkatan kematian ibu yang sangat signifikan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021.

**Grafik 3.11 Angka Kematian Ibu Provinsi Bali Tahun 2015-2021**



Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2021

Pada grafik di atas dapat dilihat bahwa Angka Kematian ibu terjadi penurunan dari tahun 2015-2018, pada tahun 2015 sebesar 83,41 per 100.000 KH, tahun 2016 sebesar 78,72 per 100.000 KH, tahun 2017 sebesar 62,69 per 100.000 KH, tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 54,03 per 100.000 KH. Mulai tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 69,72 per 100.000 KH dan tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 83,79 per 100.000 KH dan tahun 2021 merupakan angka tertinggi yaitu 181,09 per 100.000 KH.

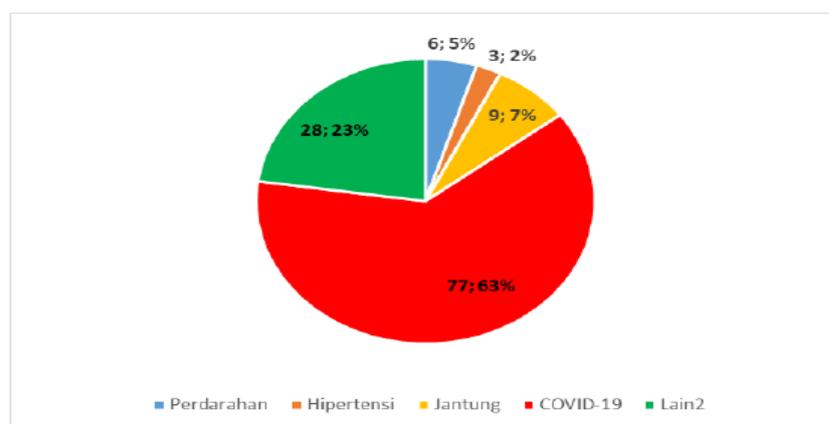
Peningkatan kematian ibu pada tahun 2021 menjadi 118 kasus, secara absolut terjadi di semua kabupaten/kota, dan terbanyak di kabupaten Buleleng 28 kasus, Kota Denpasar 20 kasus, Badung 18, Tabanan 17 dan Gianayr 13 kasus.. Penurunan kematian ibu hanya terjadi di Kabupaten Bangli yaitu hanya 3 kasus yang pada tahun sebelumnya sebesar 6 kasus. Jumlah kematian ibu per kabupaten/kota kami sajikan dalam tabel 3.25 di bawah ini.

**Tabel 3.25 Jumlah Kematian Ibu di Kabupaten/Kota 2016-2021 (Nop)**

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH KEMATIAN					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jembrana	5	5	3	5	5	8
2	Tabanan	7	3	4	4	4	17
3	Badung	0	5	3	3	12	18
4	Gianyar	7	3	2	7	4	13
5	Klungkung	1	2	4	5	2	4
6	Bangli	3	4	1	6	6	3
7	Karangasem	7	6	4	4	8	7
8	Buleleng	13	9	10	9	7	28
9	Denpasar	7	8	4	2	8	20
10	Prov. Bali	50	45	35	45	56	118

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2021

Berdasarkan hasil Audit Maternal dan Perinatal (AMP) yang dilaksanakan di Kabupaten/Kota dan Provinsi, kematian ibu yang terjadi didominasi oleh karena disertai Covid-19, yang sampai saat ini masih sangat sulit untuk mengatasinya, walaupun mendapatkan pelayanan di fasilitas rujukan. Penyebab kematian ibu di Provinsi Bali dapat dilihat pada grafik 3.11 di bawah ini.

**Grafik 3.12 Penyebab Kematian Ibu di Provinsi Bali**

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Bali 2021



Penyebab kematian terbanyak adalah masalah non obstetric antara lain karena Covid-19 sebesar 63%, lain-lain 23%, penyakit jantung dan peredaran darah 7%. Masih ada kematian yang disebabkan karena perdarahan 5% dan hipertensi/pre eklamsia 2%.

Berdasarkan hasil Audit Maternal dan perinatal yang dilakukan di Kabupaten/Kota, secara umum kasus kematian oleh karena obstetric sesungguhnya masih bisa dicegah, jika upaya yang kita melakukan upaya yang sesuai standar. Deteksi dini faktor risiko kepada calon ibu sangat penting dilakukan sehingga kehamilan betul-betul direncanakan pada kondisi ibu yang dipersiapkan kesehatannya. Demikian pula jika terjadi kehamilan hendaknya melakukan pemeriksaan sedini mungkin (kontak ke tenaga kesehatan pada usia kehamilan < 12 minggu) maka deteksi dini masalah/penyakit yang diderita ibu dapat dilakukan melalui antenatal terpadu bekerjasama dengan lintas program dan pemeriksaan fisik dilakukan oleh dokter umum serta pemeriksaan penunjang laboratorium sesuai dengan standar.

Kemampuan tenaga kesehatan dan setiap fasilitas pelayanan kesehatan untuk melakukan deteksi secara dini adanya faktor risiko baik melalui pemeriksaan fisik maupun penunjang seperti laboratorium sesuai standar harus dipenuhi bagi setiap ibu hamil, yang merupakan haknya, termasuk juga kemampuan penanganan kegawatdaruratan Obstetri baik pada penanganan awal maupun lanjutan. Peran dokter umum di dalam pelayanan kesehatan ibu juga sangat penting untuk melakukan deteksi dan intervensi terhadap masalah-masalah terkait kesehatan pada ibu hamil.

Kematian ibu yang disertai dengan Covid-19, pada awal pandemic sampai puncaknya pada bulan Juli-Agustus 2021 sangat sulit dikendalikan. Hal ini disebabkan karena ketidak siapan fasilitas kesehatan, baik dari aspek sarana maupun sumber daya manusia yang ada maupun manajemen rumah sakit. Sarana Alat Pelindung Diri (APD) terbatas, ruangan rawat inap penuh, peralatan dan sarana isolasi terbatas, SDM berkurang, karena terdampak Covid-19 juga menambah permasalahan yang dihadapi fasilitas kesehatan. Pelaksanaan



vaksinasi Covid-19 sudah mulai berjalan sejak awal tahun namun berdasarkan kajian yang dilaksanakan di RSUP Sanglah terhadap kematian ibu yang disertai dengan Covid-19, didapatkan bahwa suami dari ibu tersebut rata-rata belum mendapatkan vaksinasi.

Dari sisi masyarakat juga mengalami penurunan untuk datang ke fasilitas kesehatan, termasuk ibu hamil, sehingga sebagian besar kasus kematian ibu datang ke fasilitas kesehatan dalam kondisi berat. Berdasarkan hasil audit kasus kematian ibu di RSUP Sanglah, sebagian besar ibu hamil datang sendiri tanpa melalui rujukan dari tenaga kesehatan/fasilitas kesehatan.

Kematian ibu sebagian besar terjadi di rumah sakit (91%), namun masih ada kasus kematian dalam perjalanan ke fasilitas kesehatan (8%) dan di rumah (1%). Kondisi pandemic covid-19 sangat memengaruhi kecepatan untuk mencapai fasilitas kesehatan, adanya rasa takut ke fasilitas kesehatan merupakan salah satu faktor penyebabnya. Sistem rujukan juga mengalami perubahan yang sangat besar, dengan mempertimbangkan kemampuan fasilitas rujukan dalam menangani kasus kegawatdaruratan obstetric yang dikaitkan dengan covid-19. Hal ini akan mendorong para pemangku kebijakan dalam menyusun program kegiatan dalam percepatan penurunan AKI lebih focus kepada fasilitas rujukan, tanpa mengabaikan fasilitas kesehatan pertama dan jaringannya. Walaupun kematian karena terlambat satu (T1) dapat dihindarkan, pemerdayaan masyarakat tetap dilaksanakan dengan melibatkan lintas sektor terkait, karena masih sering terjadi kesulitan mencapai fasilitas kesehatan karena masalah social seperti kepercayaan, biaya, dan perilaku lainnya, pada wilayah tertentu seperti masalah penduduk pendatang.

### **Faktor Pendukung dalam Meningkatkan Kesehatan Ibu Hamil dan Melahirkan**

Secara geografis Bali merupakan pulau yang kecil dengan 8 kabupaten dan 1 kota, dengan jumlah penduduk 4,380,824 jiwa. Hampir semua wilayah dapat terjangkau dengan transportasi modern, termasuk daerah kepulauan di Kecamatan Nusa Penida. Fasilitas Kesehatan di tiap kecamatan terdapat antara 1 - 6 Puskesmas, setiap Desa terdapat minimal satu Bidan di Desa. Setiap



Kabupaten/Kota memiliki minimal satu Rumah Sakit Umum Daerah yang semuanya mampu PONEK ditambah dengan beberapa Rumah Sakit Swasta yang juga mampu PONEK serta Provinsi Bali juga memiliki satu Rumah Sakit Umum Pusat sebagai pusat rujukan Regional Timur.

Selain keadaan geografis, adanya tenaga kesehatan profesional sangat memadai untuk mendukung upaya penurunan kematian ibu, antara lain dokter spesialis kebidanan dan kandungan di tiap rumah sakit daerah minimal ada 3 bahkan sampai 9 orang, dokter spesialis anaestesi minimal satu orang dan dr spesialis anak minimal ada 2 orang.

Komitmen pemerintah daerah melalui Perangkat Daerah terkait juga melakukan upaya-upaya seperti adanya. Penyusunan Manual Rujukan Maternal dan Neonatal yang diatur dengan Peraturan Bupati di Kabupaten Karangasem, Bangli, Buleleng dan Jembrana. Sementara kabupaten/kota yang lain diatur dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Disamping itu danya pembinaan atau pendampingan dokter spesialis ke Puskesmas yang difasilitasi oleh dinas kesehatan bekerja sama dengan RS PONEK dan Organisasi POGI.

Terbentuknya Tim AMP di Kabupaten baik melalui SK Bupati maupun Peraturan Bupati juga memegang peranan penting dalam pembahasan kasus-kasus kematian ibu dan neonatal serta kasus-kasus niernis yang akhirnya bisa merumuskan rekomendasi sebagai tindak lanjut AMP. Rekomendasi bisa dalam bentuk advokasi, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan atau pembinaan secara individual kepada tenaga kesehatan yang bisa dilakukan oleh atasan langsung maupun organisasi profesi.

Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 yang dicanangkan mulai tanggal 19 Agustus 2021 di Kabupaten Badung yang selanjutnya diikuti oleh kabupaten/kota lainnya memberikan kontribusi yang cukup besar dalam upaya percepatan penurunan kematian ibu.



## **Faktor Penghambat dalam Meningkatkan Kesehatan Ibu Hamil dan Melahirkan**

Peningkatan Kematian Ibu di Provinsi Bali sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang menghambat dalam peningkatan kesehatan ibu antara lain :

1. Walaupun akses masyarakat ke fasilitas kesehatan sudah baik, tetapi masa pandemic covid-19 menyebabkan kunjungan ke fasilitas kesehatan menurun. Kegiatan yang berbasis peningkatan pemberdayaan masyarakat seperti kelas ibu dan posyandu tidak berjalan selama penerapan PPKM
2. Sumber daya manusia kesehatan sudah mencukupi, namun distribusinya belum merata untuk mendukung kualitas pelayanan, focus kegiatan pada upaya terkait pandemic covid-19 yaitu tracing, testing dan treatment serta vaksinasi covid-19.
3. Walaupun kita memiliki puskesmas dan jaringannya yang sudah cukup banyak, namun kesiapan dalam memberikan pelayanan masih kurang. Hal ini disebabkan karena kepatuhan terhadap standar. Keterbatasan sarana juga menjadi perhatian seperti sarana pendukung laboratorium
4. Kesiapan fasilitas rujukan juga masih kurang, walaupun dari segi jumlah sudah memadai. Sering ditemukan bahwa fasilitas rujukan yang ada di kabupaten/kota belum mampu melakukan penanganan kegawatdarutanan tepat waktu (tindakan SC kurang dari 30 menit). Rumah sakit PONEK belum sepenuhnya menerapkan waktu kerja 24 jam 7 hari.

## **Upaya Pencapaian Untuk Meningkatkan Kesehatan Ibu Hamil Dan Melahirkan**

Permasalahan di atas menjadi tantangan bagi kita semua, beberapa upaya yang telah dilaksanakan antara lain :

1. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam upaya meningkatkan pengetahuan ibu dan keluarga seperti kelas mulai dilaksanakan secara virtual menyesuaikan dengan kemampuan masyarakat. Kegiatan tatap



muka dan posyandu mulai berjalan dengan menerapkan protocol kesehatan secara ketat

2. Meningkatkan kapasitas SDM melalui kegiatan orientasi program, baik manajemen maupun teknis yang dilakukan baik secara virtual maupun tatap muka. Kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan SDM selain dilakukan provinsi dan kabupaten/kota juga dilakukan oleh kementerian kesehatan. Untuk kabupaten lokus ada peningkatan kapasitas dokter umum dalam upaya penurunan kematian ibu melalui blended learning yaitu metode pembelajaran dengan virtual dan tatap muka melalui OJT di RSUD maupun puskesmas
3. Peningkatan kapasitas rumah sakit melalui pendampingan rumah sakit vertikal (RSUP Sanglah) terhadap RSUD Karangasem, RSUD Tabanan, RSUD Bangli dan RSUD Singaraja. Pemantauan dilakukan melalui sistim informasi kesehatan maternal dan neonatal (Simatneo)
4. Kegiatan manajemen program melalui penguatan PWS-KIA, penyelenggaraan Audit Maternal Perinatal dan Surveilans Respons Beberapa rekomendasi yang berdasarkan hasil AMP di kabupaten/kota antara lain :
  - a. Meningkatkan pemantauan terutama kasus-kasus risiko tinggi, yang dilakukan oleh Puskesmas sebagai penganggungjawab wilayah bekerja sama dengan fasilitas rujukan melalui penerapan rujukan balik dan WhatsApp Group.
  - b. Peningkatan peran dokter umum dalam upaya mendeteksi masalah kesehatan pada ibu hamil serta tatalaksana kasus sedini mungkin.
  - b) Penguatan Tim PONED dalam penanganan kegawatdaruratan obstetric dan neonatal focus pada stabilisasi pra rujukan.
  - c) Penguatan Tim PONEK di rumah sakit baik dari jumlah tim maupun manajemen yang mendukung terhadap kesipan rumah sakit. Peningkatan peran lintas sector dalam menggerakkan masyarakat dan organisasi profesi dalam pembinaan anggotanya



- d) Review terhadap Manual Rujukan Maternal dan Neonatal, menyesuaikan dengan kondisi fasilitas kesehatan (penambahan jumlah dan kemampuan rumah sakit) dan system pembiayaan.
- e) Mendorong percepatan vaksinasi covid-19 pada ibu hamil di kabupaten/kota

Melanjutkan Faktor Umur Harap Hidup Provinsi Bali, selanjutnya angka **Kematian Bayi Maupun Angka Kematian Balita** Berdasarkan target Renstra Provinsi Bali di Tahun 2021 yakni 20 per 1000 KH, capaian AKB Tahun 2021 masih tergolong rendah yaitu 5,7 per 1000 KH. Meskipun angka ini meningkat dari tahun sebelumnya namun tidak melebihi dari AKB yang tertinggi selama 5 tahun terakhir di tahun 2016 yaitu 6,2 per 1000 KH. Angka kematian Bayi (AKB) selama 5 tahun.

Beberapa Upaya telah dilaksanakan Pemerintah Provinsi Bali untuk menurunkan angka kematian bayi maupun angka kematian balita antara lain :

1. Mendorong Kabupaten/Kota untuk melakukan monitoring dan melakukan upaya-upaya pelayanan kesehatan balita yang memungkinkan dilakukan pada masa pandemic seperti memanfaatkan pertemuan melalui daring dengan media whatapps grup,instagram, zoom dan lain sebagainya.
2. Merencanakan refreshing program kesehatan bayi dan balita kepada beberapa pengelola program untuk kegiatan yang mendukung Pelayanan Kesehatan Balita seperti SDIDTK, MTBS, Kelas Balita.
3. Mendorong pengelola program untuk melakukan optimalisasi program kesehatan bayi dan balita melalui kelas ibu balita secara online melalui whatapps grup, kunjungan rumah bayi resti, mendorong masyarakat untuk tetap mendapatkan layanan rutin seperti imunisasi dengan menggunakan protocol kesehatan.
4. Melakukan pemantauan kegiatan secara rutin melalui Monitoring dan evaluasi kegiatan baik ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota maupun Puskesmas.



Selanjutnya **Indikator angka kesakitan** penyakit menular diukur dengan *incidence rate* kasus Demam Berdarah Dengue (DBD). Capaian indikator angka kesakitan ini apabila makin kecil maka dikatakan semakin baik. *Incidence Rate* adalah untuk melihat frekuensi penyakit atau kasus baru yang berjangkit di masyarakat pada kurun waktu tertentu (1 tahun) dibandingkan dengan jumlah penduduk yang mungkin terkena penyakit tersebut. Selama lima tahun *Incidence Rate* DBD berfluktuatif dan paling tinggi terjadi pada tahun 2016 sebesar 506,80 per 100.000 penduduk. Pada tahun 2018 *Incidence Rate* DBD mencapai target yaitu sebesar 20,93 per 100.000 penduduk, dimana target dalam RPJMD adalah sebesar 100 per 100.000 penduduk.

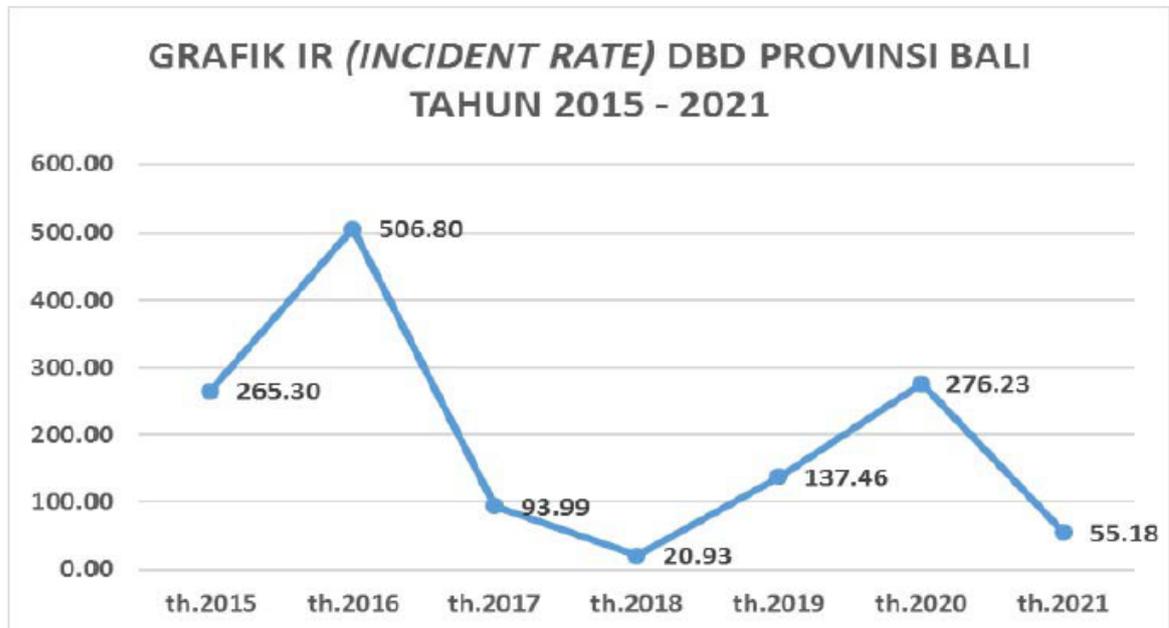
Hal ini menunjukkan kejadian penyakit DBD di Provinsi Bali tahun 2018 ini jauh menurun dibandingkan dengan tahun 2017 yang mencapai 93,99 per 100.000 penduduk. Namun, pada tahun 2019 realisasi pencapaian IR DBD provinsi Bali adalah 137,46 /100.000 penduduk. Ini artinya target yang dipasang belum dapat tercapai sebab program menargetkan IR kasus DBD ini adalah 100 per 100.000 penduduk. Demikian juga halnya yang terjadi pada tahun 2020, *Incidence Rate (IR)* DBD Provinsi Bali belum bisa mencapai target. IR DBD pada tahun 2020 ini adalah sebesar 276,23/100.000 penduduk jauh lebih tinggi target yaitu 108/100.000 penduduk.

Sedangkan *Incidence Rate* tahun 2021 sampai dengan bulan November 2021 sebesar 55,18 per 100.000 penduduk atau target yang ditetapkan sebesar 100/100.000 pddk dapat tercapai. Tetapi kita harus tetap waspada karena ada kemungkinan kasus kasus DBD pada masa Pandemi Covid-19 ini ada yang tidak ternotifikasi atau dilaporkan karena adanya beberapa kesamaan gejala antara Covid-19 dan gejala DBD. Dibutuhkan kejelian dan ketelatenan petugas kesehatan dan pemeriksaan yang lebih komprehensif (termasuk pemeriksaan lab) dalam penegakan diagnostiknya.

Meskipun *Incidence Rate DBD* beberapa tahun terakhir belum mencapai target, tetapi Angka kematian atau *Case Fatality Rate (CFR)* DBD Provinsi Bali rata rata dibawah 1 % setiap tahunnya, dimana target *CFR DBD* yang ditetapkan

dibawah 1% (< 1%). Target ini dapat dilihat baik dalam Renstra maupun Renja Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2021. Tren *Inciden Rate* DBD dapat dilihat pada grafik 3.12 dibawah ini.

**Grafik 3.13 Tren Incidence Rate (IR) DBD di Provinsi Bali Tahun 2015-2021**



Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2021

Grafik diatas menggambarkan adanya tren peningkatan dan penurunan angka kesakitan atau incidence rate kasus DBD selama periode waktu tahun 2015 sampai dengan tahun 2021. Target IR DBD yaitu 100/100.000 pddk sesuai yg ditetapkan dalam Renstra dan RPJMD Dinas Kesehatan Provinsi Bali hanya tercapai pada Tahun 2017, 2018, dan 2021 saja. Tetapi kalau dibandingkan dengan target Incidence Rate DBD Nasional yaitu sebesar 49/100.000 penduduk hanya tercapai pada tahun 2018 saja. Beberapa factor yang mempengaruhi naik turunnya IR DBD di Provinsi Bali adalah :

1. Peran serta masyarakat dalam melakukan Gerakan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) sangat kurang dan tidak dilakukan secara berkala dan berkesinambungan Kegiatan PSN secara serentak yang dilakukan oleh masyarakat sendiri hampir tidak ada, kegiatan PSN hanya dilakukan oleh petugas puskesmas dan para Jumantik yang ada di masing-masing desa



- atau banjar-banjar. Keberadaan Jumantik pun tidak merata di seluruh kabupaten/kota. Ada kabupaten atau kota yang punya Jumantik disetiap banjar, tapi ada kabupaten yang ditingkat desapun keberadaan tenaga jumantiknya tidak merata. Kalau saja seluruh masyarakat mau bahu membahu melaksanakan kegiatan PSN secara serentak dan berkesinambungan dapat dipastikan kasus akan menurun secara signifikan
2. Perubahan cuaca juga sangat berpengaruh terhadap perkembangbiakan dan kepadatan populasi nyamuk. Musim hujan yang tidak menentu akan dapat memberikan kesempatan nyamuk untuk berkembang biak sehingga kepadatan nyamuk (vector) pun akan meningkat dan resiko masyarakat akan tergigit nyamuk juga akan lebih tinggi. Hal ini dapat meningkatkan penularan penyakit DBD di masyarakat
  3. Banyak pembangunan fisik yang dikerjakan tdk berwawasan lingkungan sehingga menimbulkan banyak genangan air yang memudahkan nyamuk untuk berkembang biak.

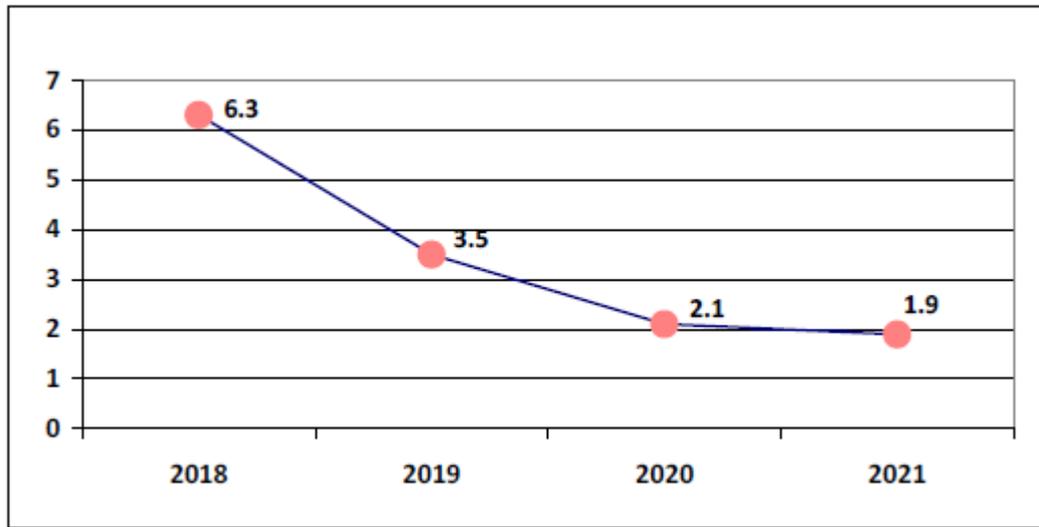
Selanjutnya, indikator pendukung terakhir dari UHH adalah **Proporsi balita gizi buruk/kurang:**

PMK No 2 Tahun 2020 tentang Standar Antropometri Anak menyatakan indeks Berat Badan menurut Panjang Badan (BB/PB) atau Berat Badan menurut Tinggi Badan (BB/TB) menggambarkan apakah berat badan anak sesuai terhadap pertumbuhan panjang atau tinggi badannya. Indeks ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi anak gizi kurang (*wasted*), gizi buruk (*severely wasted*) serta anak yang memiliki risiko gizi lebih (*possible risk of overweight*).

Kondisi gizi buruk biasanya disebabkan oleh penyakit dan kekurangan asupan gizi yang baru saja terjadi (akut) maupun yang telah lama terjadi (kronis). Sesuai dengan standar WHO, suatu wilayah disebut mengalami masalah gizi masyarakat jika proporsi balita gizi kurang > 5%. Masalah ini dianggap serius bila proporsi balita gizi kurang sebesar 10,1% - 15,0%, dan dianggap kritis bila proporsi balita gizi kurang di atas 15,0%.

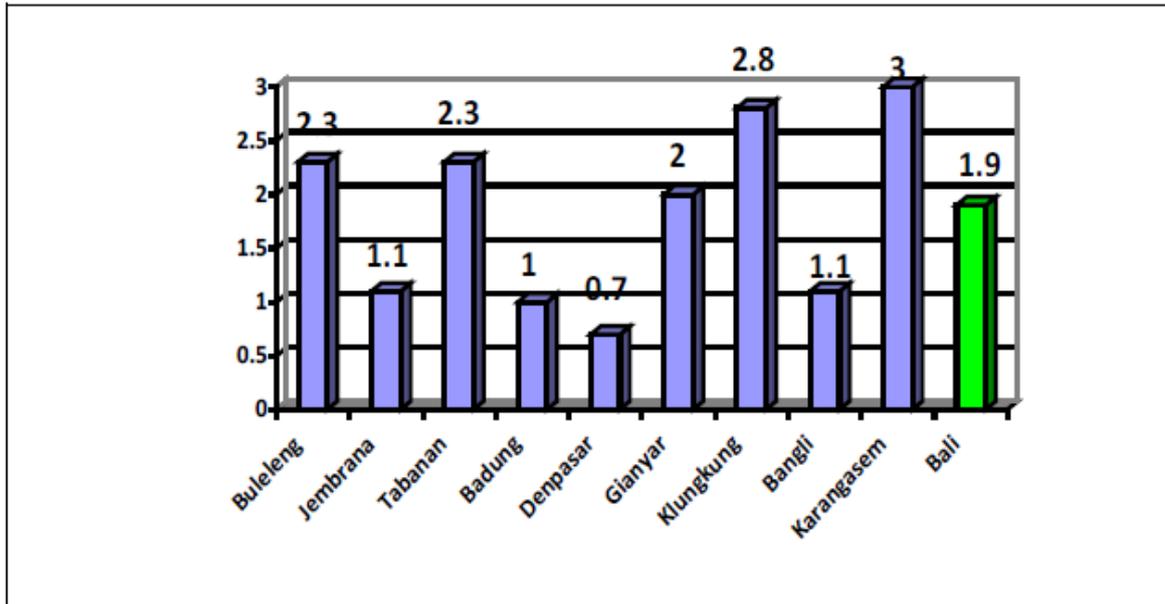
Gizi buruk adalah salah satu faktor yang dapat meningkatkan resiko terjadinya stunting dan merupakan penyebab tidak langsung kematian pada balita. Selain kurangnya jumlah dan kualitas makanan yang dikonsumsi dan atau adanya penyakit penyerta, balita gizi buruk juga rentan terkena penyakit infeksi sehingga dibutuhkan penanganan secara cepat dan tepat.

**Grafik 3.14 Proporsi balita gizi buruk/kurang Tahun 2018-2021**



Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Bali 2021

Berdasarkan grafik diatas terlihat, bahwa proporsi balita gizi buruk/kurang telah mengalami penurunan signifikan dari tahun 2018 sebesar 6,3% menjadi sebesar 3,5% pada tahun 2019, tahun 2020 sebesar 2,1% dan pada tahun 2021 menjadi 1,9%.

**Grafik 3.15 Proporsi balita gizi buruk/kurang per Kab/kota Tahun 2021**

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2021

### Faktor Pendukung Meningkatkan Gizi Balita

Sejalan dengan target RPJMN 2020-2024 untuk menurunkan prevalensi stunting menjadi 14% dan wasting menjadi 7% pada tahun 2024, pemerintah telah memberi perhatian yang serius terhadap upaya percepatan perbaikan gizi masyarakat. Pemerintah pusat memberikan dana yang cukup besar kepada daerah (provinsi, kabupaten/kota, desa) melalui mekanisme Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, DAK Nonfisik serta Dana Desa. Juknis DAK Fisik dan Non Fisik disusun dengan baik agar pembiayaan kegiatan tidak tumpang tindih dan adanya prioritas menu-menu kegiatan yang harus dilaksanakan daerah setiap tahunnya. Beberapa contoh pemanfaatan dari DAK Fisik dan Non Fisik yang telah dilaksanakan dalam mendukung peningkatan status gizi balita di Provinsi Bali antara lain :

1. Pengadaan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi ibu hamil KEK dan balita gizi kurang
2. Pengadaan alat-alat antropometri kit Posyandu



3. Perekrutan tenaga kontrak gizi di Puskesmas dalam mendukung percepatan input data e-PPGBM
4. Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan gizi
5. Pelaksanaan 8 aksi konvergensi stunting bagi kabupaten yang ditetapkan sebagai lokus stunting dengan pembiayaan dari BOK Stunting
6. Pelaksanaan pertemuan koordinasi/konvergensi LP LS, kegiatan bimbingan teknis dan monitoring evaluasi kegiatan gizi.

### **Faktor Penghambat Meningkatkan Gizi Balita**

Permasalahan gizi khususnya kekurangan gizi pada balita disebabkan oleh banyak faktor baik secara langsung dan tidak langsung. Untuk mengetahui penyebab tersebut, dilakukan surveilans gizi sehingga mendapatkan informasi yang cepat, akurat, teratur dan berkelanjutan. Kegiatan surveilans gizi yang telah dilaksanakan selama ini masih belum optimal untuk analisis faktor determinan. Data faktor determinan yang menyebabkan masalah gizi balita belum dikaji dengan baik sehingga kurang mampu merumuskan aksi yang tepat sasaran dan efektif.

Pandemi Covid-19 juga turut menghambat pelaksanaan surveilans gizi antara lain: tambahan beban kerja bagi petugas gizi puskesmas sebagai petugas vaksinator, atau sebagai petugas tracing. Situasi PPKM yang menyebabkan kunjungan balita ke posyandu menurun, serta operasional posyandu menjadi kurang optimal. Selain itu, dalam hal penurunan stunting, masih diperlukan penguatan regulasi di tingkat Provinsi.

### **Upaya Pencapaian Untuk Meningkatkan Kesehatan Gizi Balita**

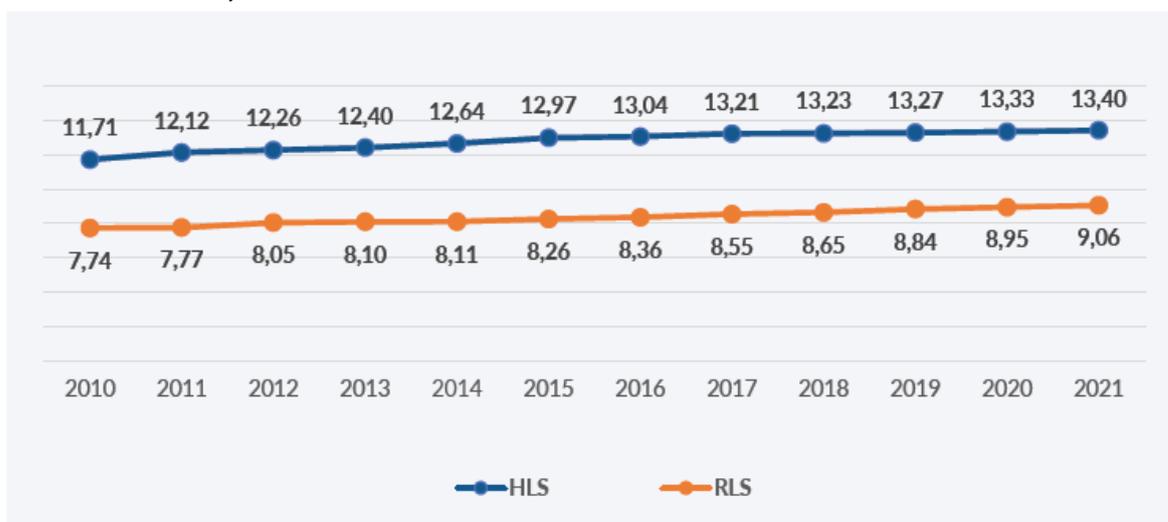
Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam mengatasi hambatan untuk meningkatkan status gizi balita antara lain :

1. Melakukan bimbingan teknis dan monitoring evaluasi secara rutin kepada petugas gizi di Kabupaten/Kota dan Puskesmas terkait pelaksanaan surveilans gizi terutama pelaporan gizi secara elektronik menggunakan aplikasi e-PPGBM

2. Melaksanakan kegiatan pertemuan koordinasi penanganan masalah gizi dengan lintas program dan lintas sektor terkait di tingkat Provinsi
3. Melaksanakan kegiatan pelatihan atau peningkatan kapasitas bagi tenaga kesehatan gizi di Kabupaten/Kota dan Puskesmas
4. Menyusun rekomendasi terkait pelaksanaan kegiatan gizi di Provinsi Bali

Sedangkan Capain Kinerja **Rata-rata Lama Sekolah** dan **Angka harapan lama sekolah** merupakan dua indikator terbentuknya **Indeks Pembangunan Manusia** Kedua indikator ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2010 hingga 2021, Harapan Lama Sekolah di Bali tercatat meningkat sebesar 1,69 tahun, sementara Rata-Rata Lama Sekolah tercatat meningkat 1,32 tahun.

**Grafik 3.16 Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Bali, 2010-2021**



Sumber : BPS Provinsi Bali Tahun 2021

Selama periode 2010 hingga 2021, Harapan Lama Sekolah penduduk usia 7 tahun ke atas secara rata-rata tercatat tumbuh sebesar 1,24 persen per tahun. Meningkatnya Harapan Lama Sekolah menjadi sinyal positif bahwa semakin besar peluang anak-anak mendapatkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Pada tahun 2021, Harapan Lama Sekolah di Bali tercatat 13,40 tahun yang berarti bahwa

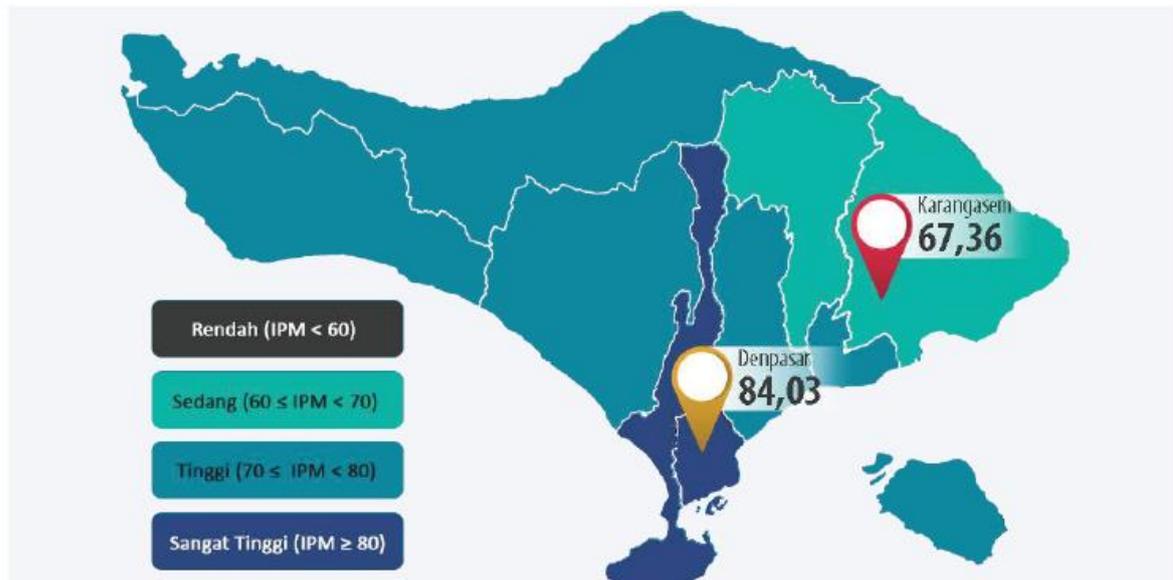


anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga lulus D1 atau semester dua di tingkat universitas.

Sementara itu, Rata-rata Lama Sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas di Bali tercatat tumbuh 1,45 persen per tahun selama periode 2010 hingga 2021. Pertumbuhan yang positif ini merupakan modal penting dalam membangun kualitas manusia Bali yang lebih baik. Pada tahun 2021, secara rata-rata penduduk Bali usia 25 tahun ke atas telah mengenyam pendidikan formal selama 9,06 tahun, atau telah menyelesaikan pendidikan tingkat SMP sederajat.

Pada tahun 2021, pencapaian pembangunan manusia di tingkat kabupaten/kota cukup bervariasi. IPM pada level kabupaten/kota berkisar antara 67,36 (Karangasem) hingga 84,03 (Denpasar). Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, UHH saat lahir berkisar antara 70,56 tahun (Karangasem) hingga 75,18 tahun (Badung). Sementara itu pada dimensi pengetahuan, HLS berkisar antara 12,35 tahun (Bangli) hingga 14,09 tahun (Denpasar), serta RLS berkisar antara 6,33 tahun (Karangasem) hingga 11,48 tahun (Denpasar). Pengeluaran riil per kapita di tingkat kabupaten/ kota berkisar antara 10,18 juta rupiah per tahun (Karangasem) hingga 19,60 juta rupiah per tahun (Denpasar).

**Gambar 3.1 IPM Bali Menurut Kabupaten/Kota dan Status Pembangunan Manusia, 2021**



Sumber : BPS Provinsi Bali Tahun 2021

**Tabel. 3.26 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bali Menurut Kabupaten/Kota, 2020-2021**

Kabupaten/Kota	UHH (Tahun)		HLS (Tahun)		RLS (Tahun)		Pengeluaran per Kapita (Rp000)		IPM Capaian		IPM Pertumbuhan (%)
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020-2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Jembrana	72,35	72,46	12,65	12,92	8,23	8,35	11.790	11.675	72,36	72,75	0,54
Tabanan	73,65	73,75	13,00	13,01	8,88	9,14	14.494	14.326	76,17	76,45	0,37
Badung	75,10	75,18	13,98	13,99	10,39	10,62	17.503	17.327	81,60	81,83	0,28
Gianyar	73,68	73,78	13,89	13,97	9,04	9,29	14.544	14.391	77,36	77,70	0,44
Klungkung	71,25	71,41	12,99	13,00	8,13	8,14	11.376	11.287	71,73	71,75	0,03
Bangli	70,52	70,62	12,34	12,35	7,17	7,18	11.268	11.201	69,36	69,37	0,01
Karangasem	70,47	70,56	12,41	12,42	6,32	6,33	10.237	10.175	67,35	67,36	0,01
Buleleng	71,83	71,95	13,07	13,08	7,24	7,25	13.463	13.362	72,55	72,56	0,01
Kota Denpasar	74,82	74,93	14,00	14,09	11,47	11,48	19.723	19.598	83,93	84,03	0,12
<b>BALI</b>	<b>72,13</b>	<b>72,24</b>	<b>13,33</b>	<b>13,40</b>	<b>8,95</b>	<b>9,06</b>	<b>13.929</b>	<b>13.820</b>	<b>75,50</b>	<b>75,69</b>	<b>0,25</b>

Sumber : BPS Provinsi Bali Tahun 2021



## **BAB IV PENUTUP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Provinsi Bali tahun 2021 merupakan media akuntabilitas yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi dan peningkatan kinerja Pemerintah Provinsi Bali. Setiap Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali telah mengimplementasikan dan mengembangkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan hasil evaluasi internal melalui Pengukuran Pencapaian Sasaran yang telah disusun dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Bali tahun 2021, kinerja Pemerintah Provinsi Bali termasuk kategori baik. Meskipun demikian, sistem penilaian kinerja tersebut akan terus dikembangkan di antara masing-masing Perangkat Daerah sehingga setiap pegawai dapat memahami pentingnya pengukuran dan penilaian kinerja sehingga dapat memberikan kontribusi yang maksimal bagi organisasi. Indikator kinerja kegiatan dan indikator sasaran juga akan disempurnakan secara terus menerus melalui upaya identifikasi, pengembangan, seleksi dan konsultasi sehingga dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran di masing-masing Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

Dari data capaian kinerja yang tersaji pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Bali ini, terlihat bahwa realisasi program-program prioritas Pemerintah Provinsi Bali pada Tahun 2021 telah berada pada jalur yang benar (*on the track*) menuju pada target-target pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Provinsi Tahun 2018-2023. Capaian kinerja indikator-indikator bidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang kemiskinan sudah berada di atas capaian nasional.



Dalam pencapaian kinerja tersebut tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang dijumpai, baik bersifat internal maupun eksternal. Untuk itu, akan dilakukan upaya peningkatan kinerja dilingkungan Pemerintah Provinsi Bali, pembangunan budaya kerja yang kondusif, penegakan disiplin pegawai dan diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan pegawai guna mengoptimalkan setiap sumber daya dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bali Semesta Berencana Tahun 2018-2023.



## GUBERNUR BALI

---

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 PEMERINTAH PROVINSI BALI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : WAYAN KOSTER

Jabatan : GUBERNUR BALI

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Denpasar, 4 Januari 2021

**GUBERNUR BALI,**

**WAYAN KOSTER**

**PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH  
PROVINSI BALI TAHUN 2021**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET 2021
1	2	3	4
1	Terpenuhinya kebutuhan dasar Krama Bali dengan kualitas layak	Tingkat Inflasi Bali	3.00
		Persentase Ketersediaan pangan utama	100
2	Terwujudnya swasembada pangan Krama Bali dan daya saing pertanian	Indeks Ketahanan Pangan	80
3	Meningkatnya diversifikasi dan optimalisasi potensi sumber daya pangan lokal	Nilai Tambah Produk Pertanian (NTPP)	31
4	Meningkatnya kualitas hasil pertanian Krama Bali	Nilai Tukar Petani (NTP)	105
		Nilai Tukar Nelayan (NTN)	117,9
5	Meningkatnya derajat kesehatan Krama Bali	Umur Harapan Hidup	72,3
6	Terwujudnya wajib belajar 12 Tahun yang berkualitas	Rata-rata lama sekolah	10,56
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk usia 16-18 Tahun	82,92
7	Meningkatnya pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang terjangkau, merata, adil, dan berkualitas	Angka harapan lama sekolah	13,77
8	Terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) Krama Bali yang unggul dan berdaya saing tinggi	Indeks Pembangunan Manusia	75,61
9	Meningkatnya daya saing SDM Krama Bali	Indeks Daya Saing SDM Bali	70
10	Terwujudnya kesejahteraan sosial krama bali	Persentase Kemiskinan	1,90
11	Terwujudnya tenaga kerja yang berkompoten dan berdaya saing	Tingkat pengangguran terbuka	1,07

1	2	3	4
12	Meningkatnya kompetensi tenaga	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	76,30
13	Terwujudnya tata kehidupan Krama Bali berdasarkan nilai-nilai Sad Kerthi	Indeks Kebahagiaan	73,98
14	Meningkatnya pasar Pariwisata Bali	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	45
15	Meningkatnya pasar pariwisata Bali di pasar domestik dan global	Jumlah Devisa sektor pariwisata	9,620
16	Meningkatnya kualitas pelayanan kepariwisataan	Indeks Kepuasan wisatawan	81
17	Terwujudnya pemerataan pertumbuhan ekonomi Bali	Persentase Pertumbuhan Ekonomi	6,60
18	Berkembangnya perekonomian berbasis budaya bali	Kontribusi KUMKM terhadap PDRB Bali	12,5
19	Meningkatnya kuantitas dan kualitas indfrastruktur dasar, laut dan udara secara terintegrasi an terkoneksi mendukung pertumbuhan perekonomian baru	Indeks konektivitas	2,5
20	Meningkatnya rasa aman Krama Bali dan Wisata melakukan aktivitas kehidupannya	Angka Kriminalitas	3.200
21	Terwujudnya tata kehidupan Krama Bali yang Madani sesuai dengan nilai-nilai Budaya Bali	Indeks domokrasi	81
		Indeks Pemberdayaan gender	64,75
22	Meningkatnya keharmonisan tata kehidupan Krama Bali berbasis wilayah dan lingkungan	Persentase Daya dukung lingkungan	17,46

1	2	3	4
23	Terwujudnya ekosistem yang berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	63,21
		Mitigasi Gas Rumah Kaca (GRK)	13,3
		Persentase bauran Energi Baru dan Terbarukan (EBT)	7,14
24	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	72

**PENGUKURAN KINERJA PEMERINTAH  
PROVINSI BALI TAHUN 2021**

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target 2021	Realisasi 2021
1	2	3	4	5
1	Terpenuhinya kebutuhan dasar Krama Bali dengan kualitas layak	Tingkat Inflasi Bali	3.00	1,09
		Persentase Ketersediaan pangan utama	100	100
2	Terwujudnya swasembada pangan Krama Bali dan daya saing pertanian	Indeks ketahanan pangan	80	84,45
3	Meningkatnya diversifikasi dan optimalisasi potensi sumber daya pangan lokal	Nilai Tambah Produk Pertanian (NTPP)	31	31
4	Meningkatnya kualitas hasil pertanian Krama Bali	Nilai Tukar Petani (NTP)	105	93,40
		Nilai Tukar Nelayan (NTN)	117.9	101.50
5	Meningkatnya derajat kesehatan Krama Bali	Umur Harapan Hidup	72,3	72.24
6	Terwujudnya wajib belajar 12 Tahun yang berkualitas	Rata-rata lama sekolah	10,56	9,06
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk usia 16-18 Tahun	82.92	82,96

1	2	3	4	5
7	Meningkatnya pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang terjangkau, merata, adil, dan berkualitas	Angka harapan lama sekolah	13.77	13,40
8	Terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) Krama Bali yang unggul dan berdaya saing tinggi	Indeks Pembangunan Manusia	75.61	75.69
9	Meningkatnya daya saing SDM Krama Bali	Indeks Daya Saing SDM Bali	70	70
10	Terwujudnya kesejahteraan sosial krama bali	Persentase Kemiskinan	1,90	4,71
11	Terwujudnya tenaga kerja yang berkompoten dan berdaya saing	Tingkat pengangguran terbuka	1.07	5,37
12	Meningkatnya kompetensi tenaga	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	76,30	73.54
13	Terwujudnya tata kehidupan Krama Bali berdasarkan nilai-nilai Sad Kerthi	Indeks Kebahagiaan	73,98	73,98
14	Meningkatnya pasar Pariwisata Bali	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	45	n/a
15	Meningkatnya pasar pariwisata Bali di pasar domestik dan global	Jumlah Devisa sektor pariwisata	9,620	n/a
16	Meningkatnya kualitas pelayanan kepariwisataan	Indeks Kepuasan wisatawan	81	n/a
17	Terwujudnya pemerataan pertumbuhan ekonomi Bali	Persentase Pertumbuhan Ekonomi	6,60	4,52

18	Berkembangnya perekonomian berbasis budaya bali	Kontribusi KUMKM terhadap PDRB Bali	12,50	n/a
19	Meningkatnya kuantitas dan kualitas indfrastruktur dasar, laut dan udara secara terintegrasi an terkoneksi mendukung pertumbuhan perekonomian baru	Indeks konektivitas	2,5	2.5

1	2	3	4	5
20	Meningkatnya rasa aman Krama Bali dan Wisata melakukan aktivitas kehidupannya	Angka Kriminalitas	3.200	2.923
21	Terwujudnya tata kehidupan Krama Bali yang Madani sesuai dengan nilai-nilai Budaya Bali	Indeks domokrasi	81	82,37
		Indeks Pemberdayaan gender	64,75	94.01
22	Meningkatnya keharmonisan tata kehidupan Krama Bali berbasis wilayah dan lingkungan	Persentase Daya dukung lingkungan	17,46	n/a
23	Terwujudnya ekosistem yang berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	63,21	71,98
		Mitigasi Gas Rumah Kaca (GRK)	13,3	n/a
		Persentase bauran Energi Baru dan Terbarukan (EBT)	7,14	n/a
24	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	72	n/a

19	Meningkatnya kuantitas dan kualitas indfrastruktur dasar, laut dan udara secara terintegrasi an terkoneksi mendukung pertumbuhan perekonomian baru	Indeks konektivitas	2,6	2,6	100
20	Meningkatnya rasa aman Krama Bali dan Wisata melakukan aktivitas kehidupannya	Angka Kriminalitas	3.669	1.967	186,52
21	Terwujudnya tata kehidupan Krama Bali yang Madani sesuai dengan nilai-nilai Budaya Bali	Indeks domokrasi	80	81,38	101,72
		Indeks Pemberdayaan gender	64,55	72,27	111,95
22	Meningkatnya keharmonisan tata kehidupan Krama Bali berbasis wilayah dan lingkungan	Persentase Daya dukung lingkungan	17,29	17,76	102,71
23	Terwujudnya ekosistem yang berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	62,64	n/a	n/a
		Mitigasi Gas Rumah Kaca (GRK)	12,3	n/a	n/a
		Persentase bauran Energi Baru dan Terbarukan (EBT)	1,10	n/a	n/a
24	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	70	n/a	n/a